

LWU TIMUR

# LAPORAN AKHIR

**SURVEI KINERJA KEPEMIMPINAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2022**



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**LAPORAN AKHIR**  
**SURVEI KINERJA KEPEMIMPINAN**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan Kepada Allah S.W.T, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga buku Laporan Antara “Survei Kinerja Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur” Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah diberikan.

Laporan Akhir (*Final Report*) ini disusun sebagai tahap akhir dalam rangkaian pekerjaan “Survei Kinerja Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur”. Pekerjaan ini dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kabupaten Luwu Timur dengan PT. Trimako Abdi Konsulindo Tahun Anggaran 2022.

Tanggapan-tanggapan ataupun saran dari pembaca pada diskusi mendatang akan memperkaya dan akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan dokumen kajian kinerja kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur dan evaluasi manfaat proyek sebagaimana dimaksud dalam Tujuan dan Sasaran kegiatan ini.

Luwu Timur, Desember 2022

Penyusun

Laporan Akhir - i

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Ruang Lingkup Kegiatan .....	4
E. Manfaat .....	5
F. Sistematika Laporan.....	5
<b>BAB II METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN</b>	
A. Metodologi Pengumpulan Data .....	6
1. Pengumpulan Data Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah.....	6
2. Pengumpulan Data Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	7
B. Teknik Survei .....	8
1. Dokumen Kinerja Pemerintahan Daerah.....	8
2. Hasil Survei Kepemimpinan Kepala Daerah.....	9
3. Responden .....	9
C. Unsur Instrumen Survei.....	9
D. Metode Analisis Data .....	9
1. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah.....	9
2. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	12
3. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) .....	15

### **BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN**

#### **LUWU TIMUR**

A. Visi dan Misi .....	16
1. Visi.....	16
2. Misi .....	18
B. Kebijakan Umum Pemerintah Daerah .....	19
C. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	20

### **BAB IV HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN**

A. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah .....	25
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	26
2. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.....	27
3. Kemandirian Fiskal Daerah.....	29
4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) .....	30
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	30
6. Tingkat Kemiskinan.....	32
7. Gini Rasio .....	33
8. Indeks Pelayanan Publik.....	34
9. Indeks Demokrasi Indonesia .....	35
10. Opini BPK-RI atas LKPD.....	37
11. Penerimaan Penghargaan Pembangunan .....	38
B. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	42
1. Kinerja Kepemimpinan Birokrasi .....	42
2. Kinerja Kepemimpinan Politik.....	45
3. Kinerja Kepemimpinan Sosial .....	47
C. Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).....	51

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Rekomendasi .....	53

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Komposisi Responden .....	8
Tabel 3.1	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	21
Tabel 4.1	Kategori Indeks Kapasitas Fiskal Daerah .....	28
Tabel 4.2	Standar Penilaian Indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.....	28
Tabel 4.3	Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016-2020 .....	29
Tabel 4.4	Kategori Indeks Kemandirian Fiskal .....	30
Tabel 4.5	Standar Penilaian Indikator Indeks Penilaian Manusia (IPM) .....	31
Tabel 4.6	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur .....	32
Tabel 4.7	Standar Penilaian Indikator Tingkat Kemiskinan .....	32
Tabel 4.8	Standar Penilaian Indikator Indeks Gini Rasio.....	34
Tabel 4.9	Standar Penilaian Indikator Indeks Pelayanan Publik.....	34
Tabel 4.10	Standar Penilaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia.....	36
Tabel 4.11	Standar Penilaian Indikator Opini BPK-RI atas LKPD .....	37
Tabel 4.12	Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah .....	39
Tabel 4.13	Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dimensi Kinerja Kepemimpinan Birokrasi.....	43
Tabel 4.14	Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dimensi Kinerja Kepemimpinan Politik .....	46
Tabel 4.15	Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dimensi Kinerja Kepemimpinan Sosial.....	58

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	28
Grafik 4.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 .....	33
Grafik 4.3	Grafik Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 Tahun terakhir .....	35
Grafik 4.4	Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016-2020 .....	38

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki hak dan wewenang daerah otonom. Sedangkan, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah suatu hal yang dilakukan dalam membentuk otonomi daerah sebagai suatu kewajiban, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengolah dan mengurus sendiri urusan daerah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah adalah pelayanan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun ketentuan melayani masyarakat adalah memberikan layanan terhadap masyarakat dan memberikan layanan umum tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelayanan umum yaitu transparansi, perhitungan, kondisi, kerja sama, hak yang sama, dan kerataan hak dan kewajiban.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi tugas dan bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membagi wilayah, perancangan pembangunan serta mengembangkan otonomi daerah.

Kepemimpinan Kepala Daerah adalah kemampuan individu dan kinerja kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Daerah adalah gubernur, bupati dan wali kota yang memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kepala daerah memiliki peran penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin tinggi kualitas kepala daerah maka semakin baik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah yang berkualitas adalah kepala daerah yang memiliki kapabilitas mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu di satu sisi mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta daya saing daerah dan di sisi lain mampu menciptakan demokrasi di daerah untuk terwujudnya kedewasaan politik, stabilisasi politik, persamaan politik, dan responsivitas terhadap kebutuhan daerah.

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat IKKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah.

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) bertujuan untuk (1) mengukur dan menilai kepemimpinan Kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah; (2) menetapkan kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah; (3) memberikan penghargaan kepada kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah; (4) melakukan publikasi atas hasil pengukuran dan penilaian kepemimpinan kepala daerah; dan (5) memotivasi kepala daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone sebelah selatan, Kabupaten Luwu Utara sebelah barat. Dengan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur sebesar 6.944,88 km<sup>2</sup> terdiri dari 11 (sebelas) wilayah kecamatan.

## **B. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Daerah;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintahan; dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Membuat survei kinerja kepemimpinan dalam pemerintahan untuk mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, melakukan publikasi atas hasil pengukuran dan penilaian kepemimpinan kepala daerah serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **D. Ruang Lingkup Kegiatan**

1. Lingkup Kegiatan:
  - a. Melakukan survei dan pengumpulan data;
  - b. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner elektronik melalui aplikasi serta wawancara langsung ke responden;
  - c. Penyebaran kuesioner ke responden bersifat multistakeholder di daerah;
  - d. Responden ditetapkan secara purposive sampling berjumlah minimal 100 (seratus) orang responden dengan rasio 30:70;
  - e. Melakukan analisis hasil survei terhadap kinerja kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur; dan
  - f. Menyusun dokumen kajian survei kinerja kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.
2. Pertemuan dan pembahasan FGD (*Focus Group Discussion*).
3. Lokasi kegiatan di Kabupaten Luwu Timur.

## E. Manfaat

Menjadi bahan masukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan motivasi kepala daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur. Serta, dari Indeks Kepemimpinan Kepala dapat mendorong dan memotivasi pengabdian Kepala Daerah guna percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kinerjanya menuju kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.

## F. Sistematika Laporan

**BAB I PENDAHULUAN** memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, manfaat dan sistematika laporan.

**BAB II METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN** memuat tentang metodologi pengumpulan data, teknik survei, unsur instrumen survei dan metode analisis data.

**BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH** memuat tentang visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, serta kebijakan umum pemerintah daerah dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**BAB IV HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN** berisi tentang hasil dari survei dan pembahasan terkait kinerja kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.

**BAB V PENUTUP** memuat tentang kesimpulan dari kegiatan ini dan juga rekomendasi kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

## BAB II

### METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### A. Metodologi Pengumpulan Data

Data dan informasi pendukung di peroleh dengan melakukan survei primer dan sekunder dalam bentuk:

- Data primer diperoleh melalui kunjungan lapangan dan kuesioner untuk melihat dan mengkaji pelaku maupun *stakeholder* terkait; dan
- Data sekunder akan diperoleh melalui kajian literatur dan kunjungan instansional untuk memperoleh data mengenai kondisi pembangunan dan kinerja pemerintahan yang akan menjadi lokasi kegiatan.

Pengumpulan data terbagi oleh dua variabel utama yaitu kepemimpinan dalam pembangunan daerah dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### 1. Pengumpulan Data Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah

Data kepemimpinan dalam pembangunan daerah diinput dalam aplikasi oleh Badan Litbang Provinsi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota (atau perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kelitbangan), terdiri atas data: a) Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial dan b) Penerimaan Penghargaan Pembangunan yang diterima Pemerintah Daerah selama masa jabatan kepala daerah.

##### a. Data Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Data kinerja pembangunan ekonomi dan sosial terdiri atas: 1) Pertumbuhan Ekonomi; 2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; 3) Kemandirian Fiskal Daerah; 4) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD); 5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 6) Tingkat Kemiskinan; 7) Gini Rasio; 8) Indeks Pelayanan Publik; 9) Indeks Demokrasi Indonesia; dan 10) Opini BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

##### b. Data Penerimaan Penghargaan Pembangunan

Data penerimaan penghargaan pembangunan, meliputi: 1) Tanda Kehormatan; 2) Penghargaan Berskala Internasional; dan 3) Penghargaan Berskala Nasional.

## 2. Pengumpulan data Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

### a. Lokasi Survei

Survei dilakukan di daerah dan difasilitasi oleh Badan Litbang Provinsi dan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner elektronik melalui aplikasi untuk variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyebaran kuesioner ke responden yang bersifat *multistakeholder* di daerah. Badan Litbang Daerah atau perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kelitbangan memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dimaksud.

### c. Responden

Responden ditetapkan secara *purposive sampling* berjumlah paling sedikit 100 orang dengan rasio 30:70, terdiri atas: perwakilan responden dari unsur Pemerintah (*Government/G*) maksimal 30% dari total seluruh responden, meliputi:

- 1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik organisasi kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) dan organisasi non-kewilayahan yang mencakup Sekretariat Daerah, Asisten Kepala Daerah, Staf Ahli Kepala Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas, dan Badan; dan
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwakilan masyarakat di daerah yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebanyak 70% responden lainnya wajib berasal dari beberapa unsur, yakni: akademisi (A), dunia usaha skala mikro kecil dan dunia usaha skala menengah-besar (B), pemimpin redaksi/jurnalis media massa cetak dan/atau elektronik (M), tokoh masyarakat (E), lembaga donor (D), LSM/NGO (*Non Government Organization*), komunitas kreatif (C) dan

masyarakat yang telah merasakan dan menerima manfaat kepemimpinan kepala daerah. Dengan komposisi respondennya sebagai berikut:

**Tabel 2.1  
Komposisi Responden**

No.	Responden	Rasio (%)	Jumlah Responden (100 Orang)	Keterangan
1	<b>Pejabat Pemerintah Daerah (G)</b> (termasuk akumulasi perangkat daerah kewilayahan dan non-kewilayahan)	30	15	Dapat Disesuaikan
2	<b>Anggota DPRD (G)</b> (yang merepresentasikan setiap komisi)		15	Minimal
3	<b>Akademisi (A)</b>	70	10	Minimal
4	<b>Dunia Usaha Skala Mikro-Kecil (B)</b>		10	Minimal
5	<b>Dunia Usaha Skala Menengah-Besar (B)</b>		10	Minimal
6	<b>Pemimpin Redaksi/Jurnalis Media Massa Cetak dan/atau Elektronik (M)</b>		10	Minimal
7	<b>Tokoh Masyarakat (E)</b>		10	Minimal
8	<b>Civil Society (LSM, Lembaga Donor, Komunitas Kreatif)</b>		10	Minimal
9	<b>Masyarakat Penerima Manfaat (People Beneficiaries)</b>		10	Minimal

Sumber : Pedoman Umum Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2021

## **B. Teknik Survei**

Pengukuran dan penilaian IKKD sebagaimana dimaksud berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari :

### **1. Dokumen Kinerja Pemerintahan Daerah**

Dokumen kinerja pemerintahan daerah berupa data dan informasi dari pemerintah daerah dan atau kementerian/lembaga yang diperoleh secara tertulis dan/atau melalui sistem informasi berbasis elektronik.

## 2. Hasil Survei Kepemimpinan Kepala Daerah

Hasil survei ini berupa data dan informasi dari para responden yang dikumpulkan melalui instrumen survei yang disusun oleh Badan Litbang Kemendagri.

## 3. Responden

Responden ditetapkan secara *purposive sampling* berjumlah paling sedikit 100 orang dengan rasio 30:70, terdiri atas: perwakilan responden dari unsur pemerintah (*Government/G*) maksimal 30% dari total seluruh responden dan 70% responden lainnya berasal dari beberapa unsur masyarakat daerah.

### C. Unsur Instrumen Survei

Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Survei pada kajian ini dengan metode kuesioner/angket, sehingga instrumennya berupa kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) sesuai dengan parameter yang akan diukur dan dinilai dan telah disusun secara logis dan mudah untuk dipahami oleh responden.

### D. Metode Analisis Data

Adapun metode dalam pengolahan data Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, meliputi:

#### 1. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah

Pengukuran dan penilaian pada variabel ini didasarkan pada data dan informasi kinerja pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah daerah/atau kemeterian/lembaga berupa data dan informasi tertulis dan/atau melalui sistem informasi berbasis elektronik serta penerimaan penghargaan pembangunan yang diterima pemerintah daerah selama masa jabatan kepala daerah. Data dan informasi untuk setiap indikator pada Dimensi Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial berupa data kuantitatif.

Setiap parameter pada masing-masing indikator diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), yang meliputi:

- Skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
- Skor 4 (empat) kategori tinggi;
- Skor 3 (tiga) kategori sedang;
- Skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- Skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Pada variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah terdiri atas dua dimensi yaitu:

**a. Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial (90%)**

Pada dimensi ini terdiri lagi atas 10 (sepuluh) indikator yaitu pertumbuhan ekonomi (15%), indeks kapasitas fiskal daerah (10%), kemandirian fiskal daerah (5%), evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) (10%), indeks pembangunan manusia (15%), tingkat kemiskinan (10%), gini rasio (10%), indeks pelayanan publik (10%), indeks demokrasi indonesia (10%) dan opini BPK-RI atas LKPD (5%).

Jadi, masing-masing parameter yang berada di tiap indikator akan dinilai dengan pemberian skor (1-5). Ada 9 (sembilan) indikator dengan satu parameter maksimal pemberian skornya ada 5 (lima), sedangkan pada indikator ke sepuluh pemberian skor paling tinggi telah ditentukan adalah 3 (tiga).

Pemberian skor pada tiap parameter di dimensi ini berdasar pada hasil survei sekunder terhadap data-data yang di dapatkan terkait kinerja pemerintahan daerah dan penentuan nilai skornya berdasar pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.

Setelah pemberian skor pada tiap parameter kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mengetahui total nilai indikator. Setelah mendapatkan hasil antara perkalian skor parameter dengan dengan bobot masing-masing indikator, seluruh nilai indikator kemudian dijumlahkan untuk mengetahui total nilai indikator.

Kemudian, setelah mengetahui jumlah total nilai indikator dari hasil tersebut jumlah nilai indikator dikalikan dengan bobot dimensi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial untuk mengetahui jumlah total nilai pada dimensi Kinerja Pembangunan Ekonomi Dan Sosial (KPES) (90%).

**b. Penerimaan Penghargaan Pembangunan (10%)**

Pada dimensi ini terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu tanda kehormatan (50%), penghargaan berskala internasional dengan jenis ukuran (20%) dan penghargaan berskala nasional (30%). Dari tiap-tiap indikator memiliki masing-masing 5 (lima) parameter, jadi total parameter pada dimensi ini adalah sebanyak 15 parameter.

Jadi, masing-masing parameter yang berada di tiap indikator akan dinilai dengan pemberian skor (1-5). Setelah pemberian skor pada tiap parameter kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mengetahui total nilai indikator.

Pemberian skor pada tiap parameter di dimensi ini berdasar pada hasil survei sekunder terhadap data-data yang di dapatkan terkait penerimaan penghargaan pembangunan pemerintahan daerah dan penentuan nilai skornya berdasar pada ketentuan dalam Pedoman umum penilaian dalam rangka penganugerahan penghargaan kepemimpinan kepala daerah Tahun 2021.

Setelah mendapatkan hasil antara perkalian skor parameter dengan dengan bobot masing-masing indikator, seluruh nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk mengetahui total nilai indikator.

Kemudian, setelah mengetahui jumlah total nilai indikator dari hasil tersebut jumlah nilai indikator dikalikan dengan bobot dimensi penerimaan penghargaan pembangunan untuk mengetahui jumlah total nilai pada dimensi penerimaan penghargaan pembangunan (10%).

Kemudian, untuk mengetahui berapa jumlah total nilai maksimal pada variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah ini adalah dengan menjumlahkan total nilai dari masing-masing dimensi yaitu:

total nilai dimensi KPES + total nilai dimensi PPP

Jadi, berdasar pada hitungan di atas akan diketahui jumlah total nilai maksimal pada variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah.

## 2. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengukuran dan penilaian pada variabel ini berdasarkan pada data dan informasi hasil survei kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh tim pelaksana melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan). Kuesioner atau angket juga dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan data, hasil dari kuesioner nantinya akan dianalisa dan diukur dengan skala *likert*.

Setiap parameter pada masing-masing indikator diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), yang meliputi:

- Skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
- Skor 4 (empat) kategori tinggi;
- Skor 3 (tiga) kategori sedang;
- Skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- Skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Pada variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri atas tiga dimensi yaitu:

### a. Kinerja Kepemimpinan Birokrasi (35%)

Pada dimensi ini terdiri atas enam indikator yaitu visioner (20%), kebijakan (20%), Integritas Pemerintahan (30%), Kemampuan mendelegasikan tugas dan kewenangan (10%), pengelolaan sumber daya (10%) dan tanggung jawab (10%).

Dari tiap indikator memiliki beberapa parameter yang berbeda seperti pada indikator tanggung jawab hanya memiliki dua parameter sedangkan pada indikator integritas pemerintahan memiliki lima parameter. Jadi, pada dimensi ini memiliki enam indikator dan total 23 parameter.

Jadi, masing-masing parameter yang berada di tiap indikator akan dinilai dengan pemberian skor (1-5). Pemberian skor pada tiap

parameter di dimensi ini berdasar pada hasil survei kuesioner terhadap responden, jadi jawaban dari para responden yang menentukan pemberian skor. Setelah pemberian skor pada tiap parameter kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mengetahui total nilai indikator.

Setelah mendapatkan hasil antara perkalian skor parameter dengan dengan bobot masing-masing indikator, seluruh nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk mengetahui total nilai indikator.

Kemudian, setelah mengetahui jumlah total nilai indikator dari hasil tersebut jumlah nilai indikator dikalikan dengan bobot dimensi kinerja kepemimpinan birokrasi untuk mengetahui jumlah total nilai pada dimensi Kinerja Kepemimpinan Birokrasi (KKB) (35%).

Jumlah total nilai indikator x bobot dimensi KKB (35%)

Jadi, jumlah total nilai maksimal pada dimensi kinerja kepemimpinan birokrasi dapat diketahui berdasar pada formula di atas.

#### **b. Kinerja Kepemimpinan Politik (40%)**

Pada dimensi ini terdiri atas empat indikator yaitu Hubungan Kepala Daerah-DPRD (35%), Hubungan Kepala Daerah-FORKOPIMDA (30%), Hubungan Kepala Daerah-Partai Politik (15%) dan Hubungan Kepala Daerah-Kepala Daerah (20%).

Pada tiap indikator di dimensi kinerja kepemimpinan politik memiliki masing-masing dua parameter terkecuali pada indikator Hubungan Kepala Daerah-DPRD yang memiliki 4 parameter. Jadi, pada dimensi ini memiliki empat indikator dan total 10 parameter.

Jadi, masing-masing parameter yang berada di tiap indikator akan dinilai dengan pemberian skor (1-5). Pemberian skor pada tiap parameter di dimensi ini berdasar pada hasil survei kuesioner terhadap responden, jadi jawaban dari para responden yang menentukan pemberian skor. Setelah pemberian skor pada tiap parameter kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mengetahui total nilai indikator.

Setelah mendapatkan hasil antara perkalian skor parameter dengan dengan bobot masing-masing indikator, seluruh nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk mengetahui total nilai indikator.

Kemudian, setelah mengetahui jumlah total nilai indikator dari hasil tersebut jumlah nilai indikator dikalikan dengan bobot dimensi kinerja kepemimpinan politik untuk mengetahui jumlah total nilai pada dimensi Kinerja Kepemimpinan Politik (KKP) (40%).

Jumlah total nilai indikator x bobot dimensi KKP (40%)

Jadi, jumlah total nilai maksimal pada dimensi kinerja kepemimpinan politik dapat diketahui berdasar pada formula di atas.

### c. Kinerja Kepemimpinan Sosial (25%)

Pada dimensi ini terdiri atas lima indikator yaitu komunikatif (20%), kolaboratif untuk kemajuan daerah (20%), responsif (20%), penggerakan partisipasi masyarakat (25%) dan penegakkan etika sosial (15%), dari empat indikator tersebut total pada dimensi ini memiliki 22 parameter.

Jadi, masing-masing parameter yang berada di tiap indikator akan dinilai dengan pemberian skor (1-5). Pemberian skor pada tiap parameter di dimensi ini berdasar pada hasil survei kuesioner terhadap responden, jadi jawaban dari para responden yang menentukan pemberian skor. Setelah pemberian skor pada tiap parameter kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mengetahui total nilai indikator.

Setelah mendapatkan hasil antara perkalian skor parameter dengan dengan bobot masing-masing indikator, seluruh nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk mengetahui total nilai indikator.

Kemudian, setelah mengetahui jumlah total nilai indikator dari hasil tersebut jumlah nilai indikator dikalikan dengan bobot dimensi kinerja kepemimpinan sosial untuk mengetahui jumlah total nilai pada dimensi Kinerja Kepemimpinan Sosial (KKS) (25%).

Jumlah total nilai indikator x bobot dimensi KKS (25%)

Jadi, jumlah total nilai maksimal pada dimensi kinerja kepemimpinan sosial dapat diketahui berdasar pada formula di atas.

Kemudian, untuk mengetahui berapa jumlah total nilai maksimal pada variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah dengan menjumlahkan total nilai dari masing-masing dimensi yaitu:

total nilai dimensi KKB + total nilai dimensi KKP + total nilai dimensi KKS

Jadi, berdasar pada formula di atas dapat diketahui jumlah total nilai maksimal pada variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### 3. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)

Untuk pengukuran atau penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah digunakan formula sebagai berikut, Total Nilai Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah (1) dijumlahkan Total Nilai Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (2), kemudian bobot dari masing-masing variabel juga dijumlahkan.

Bobot Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah sebesar 30 dijumlahkan dengan Bobot Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 70, jadi nilai bobot seluruh variabel adalah 100.

Untuk total nilai maksimal variabel didapatkan berdasarkan hitungan jika seluruh tabel di isi dengan skor tertinggi semuanya, sehingga hasilnya nanti adalah total nilai maksimal variabel yang dapat dicapai. Kemudian untuk Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah selanjutnya menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah Nilai Variabel : Total Nilai Maksimal Variabel x 100

Berdasar pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah teknik penilaian untuk penetapan kepala daerah terbaik berdasarkan urutan perolehan total skor variabel, didasarkan pada skala nilai berikut:

- Skor 90 (Sembilan Puluh) – 100 (Seratus), Kategori Sangat Tinggi;
- Skor 80 (Delapan Puluh) – 89 (Delapan Puluh Sembilan) Kategori Tinggi;
- Skor 60 (Enam Puluh) – 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Kategori Sedang;
- Skor 40 (Empat Puluh) – 59 (Lima Puluh Sembilan) Kategori Rendah; dan
- Skor 0 (Nol) – 39 (Tiga Puluh Sembilan) Kategori Sangat Rendah.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

#### A. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah dengan mengacu pada batasan tersebut.

Sedangkan, Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Di samping itu, misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau tujuan mengapa sebuah instansi atau organisasi berada di masyarakat.

#### 1. Visi

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD, visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Oleh karena itu, visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi RPJMD menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi yang diusung Kabupaten Luwu Timur dalam periode Tahun 2021–2026 adalah:

***“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas  
Nilai Agama dan Budaya”***

**Berkelanjutan** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Lebih maju** mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Berlandas nilai agama dan budaya** mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

## 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui rumusan strategi dan arah kebijakan.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma pembangunan daerah dan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

### a. **Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh**

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum terkait peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara utuh.

### b. **Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas**

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan ketahanan perekonomian daerah secara merata serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

### c. **Menyediakan Infrastruktur Daerah Yang Memadai dan Lingkungan Yang Berkualitas**

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah.

### d. **Menciptakan Kepemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik**

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 akan didorong reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

**e. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat**

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.

**f. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Yang Berbasis Pada Agama dan Budaya**

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kerukunan antar ummat beragama dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah.

**B. Kebijakan Umum Pemerintah Daerah**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu pula dirumuskan kebijakan. Kebijakan pembangunan ini sendiri pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah, sehingga masyarakat dan daerah akan lebih maju, sejahtera, dan mandiri.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam pelaksanaan otonomi daerah telah menetapkan konsepsi pembangunan berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen yang ada dan terlibat pembangunan daerah. Implementasi konsepsi ini setidaknya telah berhasil membentuk landasan pembangunan yang kokoh bagi Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan pembangunan daerah terutama dalam bidang peningkatan Sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan umum perencanaan pembangunan pada Kabupaten Luwu Timur ini diarahkan untuk sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman; dan
6. Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah.

### **C. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur secara bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas pada setiap tahun berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Penekanan prioritas tersebut bukan berarti bahwa program/kegiatan/Sub kegiatan pembangunan operasional pada OPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan.

Adapun arah kebijakan berdasarkan sasaran dan strategi terkait dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan sistem belajar-mengajar dan manajemen berbasis sekolah;</li> <li>Pemenuhan sarana-prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan; dan</li> <li>Pengembangan sistem ketersediaan barang pokok dan penting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan dan penerapan kurikulum muatan lokal;</li> <li>Pemenuhan tenaga kesehatan secara merata dan proporsional; dan</li> <li>Peningkatan pendapatan masyarakat berdaya beli rendah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik secara proporsional;</li> <li>Pengembangan sistem penanganan 1.000 Hari pertama kelahiran; dan</li> <li>Penguatan sistem pengendalian inflasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kemampuan literasi masyarakat;</li> <li>Pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> secara integratif; dan</li> <li>Penguatan daya beli masyarakat atas bahan pokok dan penting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kota dan desa cerdas;</li> <li>Pemantapan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan preventif; dan</li> <li>Penguatan daya beli masyarakat atas non bahan pokok.</li> </ul>
2	Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;</li> <li>Penguatan ketahanan ekonomi desa; dan</li> <li>Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan ketahanan sosial desa;</li> <li>Pengembangan usaha ekonomi dan pendapatan asli desa; dan</li> <li>Pengembangan kerjasama desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;</li> <li>Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman desa; dan</li> <li>Penguatan ketahanan ekonomi desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan ketahanan ekologi desa;</li> <li>Pengembangan teknologi tepat guna; dan</li> <li>Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan ketahanan ekonomi desa;</li> <li>Pemantapan ketahanan sosial desa; dan</li> <li>Pemantapan ketahanan ekologi desa.</li> </ul>

No.	Sasaran	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
3	Meningkatnya kesetaraan gender (S3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengarus utamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kesejahteraan keluarga.</li> </ul>
4	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan sistem penyuluhan pertanian berbasis teknologi digital level BPP, posluhdes, poktan/gapoktan;</li> <li>Pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat; dan</li> <li>Pengembangan kapasitas SDM, manajemen, dan permodalan koperasi dan UMKM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian pangan berbasis organik/semi organik dan petani milenial; dan</li> <li>Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis teknologi digital.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan sarana/prasarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;</li> <li>Perluasan dan peningkatan skala industri manufaktur; dan</li> <li>Pengembangan daya saing pariwisata berbasis kawasan dan desitnasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;</li> <li>Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi produk SDA; dan</li> <li>Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan sistem usaha tani terpadu tanaman-ternak-ikan level kawasan maupun unit usaha tani;</li> <li>Pengembangan industri manufaktur berbasis sumberdaya lokal; dan</li> <li>Penguatan sarana/prasarana perdagangan dalam negeri dan ekspor.</li> </ul>

No.	Sasaran	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
5	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha (S5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan iklim investasi dan peluang usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produktivitas tenaga kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan pelayanan penanaman modal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan hubungan industrial pekerja dan perusahaan.</li> </ul>
6	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/jembatan serta perlengkapan sarana/prasarananya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur permukiman dan perumahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur sumberdaya air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan darat, danau, sungai dan laut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyadaran, edukasi dan penegakan aturan kepada pemangku kepentingan untuk kepatuhan terhadap RTRW dan rencana turunannya.</li> </ul>
7	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penegakan dan implementasi rencana pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara multipihak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian pencemaran limbah dan bahan berbahaya serta kerusakan lingkungan hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan kapasitas untuk adaptasi dan mitigasi bencana serta perubahan iklim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan sampah secara terpadu berbasis <i>reduce, reuse</i> dan <i>recycle</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan, penataan dan pemeliharaan runag terbuka hijau serta keanekaragaman hayati.</li> </ul>
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kompetensi SDM aparatur berbasis jabatan fungsional dan optimalisasi organisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan kinerja tata kelola keuangan; dan</li> <li>Pemantapan sistem pengawasan internal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja berbasis elektronik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayan bagi fungsi perangkat daerah; dan</li> <li>Modernisasi sistem pengelolaan arsip.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harmonisasi produk hukum daerah; dan</li> <li>Modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset.</li> </ul>

No.	Sasaran	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penajaman akurasi data penerima layanan SPM; dan</li> <li>• Penguatan sistem pelayanan publik di kecamatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan dan peningkatan kualitas layanan SPM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan pelayanan pada perangkat daerah teknis untuk layanan perizinan dan non perizinan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk inovasi pelayanan SPM dan non SPM.</li> </ul>
10	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan masyarakat untuk ketenteraman, ketertiban dan keamanan secara swakarsa; dan</li> <li>• Penegakan perda, perkada dan produk hukum daerah lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deteksi dini potensi insiden terkait suku dan ras serta konflik sosial; dan</li> <li>• Penghayatan dan pengamalan Pancasila serta pilar sebangsa lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyadaran dan edukasi demokrasi dan politik dalam masyarakat;</li> <li>• Pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghayatan dan pengamalan kesatuan berbangsa dan bernegara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan modal sosial dan solidaritas sosial antar kelompok dalam masyarakat.</li> </ul>
11	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan bina mental-spiritual;</li> <li>• Pengembangan obyek-obyek pemajuan budaya; dan</li> <li>• Pengembangan <i>Islamic Center</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan legalitas/sertifikat rumah ibadah semua agama;</li> <li>• Pengelolaan cagar budaya secara terpadu; dan</li> <li>• Wisata religius petugas agama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kerukunan antar umat beragama;</li> <li>• Pengembangan kesenian tradisional berbagai etnik; dan</li> <li>• Wisata religius petugas agama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan cagar budaya secara terpadu;</li> <li>• Pembinaan sejarah daerah; dan</li> <li>• Pengembangan sarana/prasarana ibadah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan obyek-obyek pemajuan budaya;</li> <li>• Pemantapan bina mental spiritual; dan</li> <li>• Pengembangan kesenian tradisional berbagai etnik.</li> </ul>

## BAB IV

### HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah

Variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah berbobot 30% terdiri atas dua dimensi yaitu kinerja pembangunan ekonomi dan sosial (90%) dan penerimaan penghargaan pembangunan (10%). Pada tiap dimensi terdiri oleh beberapa indikator dan juga parameter.

Pada dimensi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial terdapat 10 (sepuluh) indikator dan 12 (dua belas) parameter dan pada dimensi penerimaan penghargaan pembangunan terdapat 3 (tiga) indikator dan 15 parameter.

Setiap parameter pada masing-masing indikator diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), yang meliputi:

- Skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
- Skor 4 (empat) kategori tinggi;
- Skor 3 (tiga) kategori sedang;
- Skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- Skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Terkecuali pada indikator ke sepuluh yaitu Opini BPK-RI atas LKPD yang pemberian skor paling tinggi adalah angka 3 (tiga) dikarenakan standar penilaian parameter pada indikator ini hanya ada 3 (tiga) sesuai dengan pedoman umum penilaian.

Serta, penentuan pemberian skornya berdasar pada standar ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.

Adapun data-data yang berhasil dikumpulkan untuk menjadi dokumentasi dalam penilaian pengukuran variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

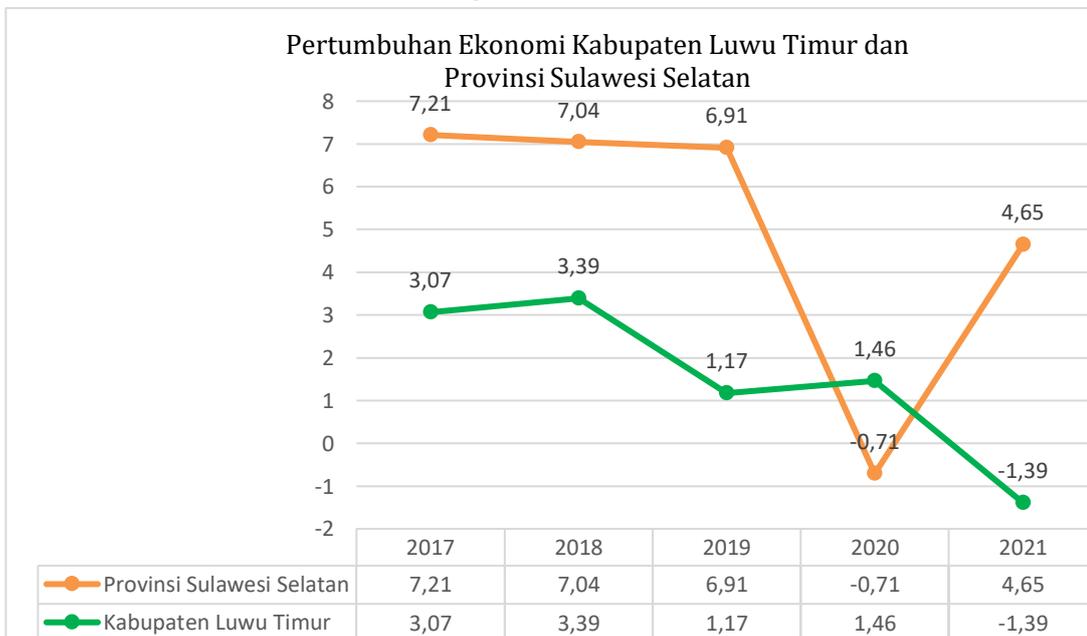
**1. Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur dalam Buku Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2022 berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021, angka PDRB atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 23,61 triliun rupiah.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 43,99 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 menurun. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 16,03 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi perlambatan ekonomi sebesar 1,39 persen.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2021 atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,65%, nilai ini tidak sebanding dengan laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur yang mengalami kontraksi sebesar -1,39%. Berikut gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

**Grafik 4.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021**



Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2022



Dari grafik di atas terlihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur yang mengalami penurunan, rata-rata angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir hanya mencapai 1,54%. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur adalah pandemi *Covid-19* serta menurunnya nilai yang dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang dimana merupakan sektor dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Luwu Timur.

Tim Penyusun memberikan skor 1 (satu) pada indikator Pertumbuhan Ekonomi sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga Permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian BPS.

## 2. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Dasar penentuan Kapasitas Fiskal Daerah adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Berdasarkan peraturan ini Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud didasarkan pada formula sebagai berikut :

$$\text{KFD}_{\text{Kab/Kota}} = \text{Pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]$$

Keterangan :

- $\text{KFD}_{\text{Kab/Kota}}$  = Kapasitas fiskal daerah suatu kabupaten/kota;
- Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan meliputi dana bagi cukai hasil tembakau, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus nonfisik, dana otonomi khusus dana desa dan hibah.

- Belanja tertentu meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil dan alokasi dana desa.

Untuk perhitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan formulasi:

$$IKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{(\sum KFD_{kabupaten/kota})/n}$$

Keterangan:

IKFD Kab/ Kota = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kab/ Kota

KFD Kab/ Kota = Kapasitas Fiskal Daerah Kab/ Kota

$\sum$  KFD Kab/ Kota = Total Kapasitas Fiskal Daerah Kab/ Kota

N = 508 (Lima Ratus Delapan) Kab/ Kota

Berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, kabupaten/kota di Indonesia dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Kategori Indeks Kapasitas Fiskal Daerah**

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0,517	Sangat Rendah
0,517 <= IKFD < 0,747	Rendah
0,747 <= IKFD < 1,168	Sedang
1,169 <= IKFD < 2,145	Tinggi
IKFD >= 2,145	Sangat Tinggi

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021

Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) sebesar **1,023** dengan kategori **sedang** berdasar pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

**Tabel 4.2**  
**Standar Penilaian Indikator**  
**Indeks Kapasitas Fiskal Daerah**

Parameter	Skor
>_2,021	5
1,137 – 2,020	4
0,770 – 1,136	3
0,548 – 0,769	2
<0,548	1

Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 3 (tiga) pada indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Peraturan Menteri Keuangan.

### **3. Kemandirian Fiskal Daerah**

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.

Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Esensi kemandirian fiskal daerah seperti yang dinyatakan Hunter (1977) yaitu pemerintah daerah dalam lingkup kewenangan sebagaimana diatur oleh undang-undang, diberikan kebebasan untuk menetapkan berbagai jenis pajak (penerimaan) maupun belanja (pengeluaran).

Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan reviu terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia. Berdasar pada Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020 Nomor 26f/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021.

Berdasar pada laporan tersebut Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016-2020 berada pada kategori **“Belum Mandiri”** dengan total nilai sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Luwu Timur**  
**Tahun Anggaran 2016-2020**

Entitas	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Luwu Timur	0,1252	0,1606	0,1806	0,2071	0,2276

*Sumber : Laporan Hasil Reviu Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020*

Reviu kemandirian fiskal daerah akan menghasilkan nilai yang berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) sehingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer). Semakin rendah nilai IKF maka semakin belum mandiri, sebaliknya semakin tinggi nilai IKF maka semakin mandiri suatu daerah. Sampurna (2018) mengelompokan kemandirian fiskal daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Kategori Indeks Kemandirian Fiskal**

Nilai IKF	Kemandirian Fiskal
0,00 <= IKF < 0,25	Belum Mandiri
0,25 <= IKF < 0,50	Menuju Kemandirian
0,50 <= IKF < 0,75	Mandiri
0,75 <= IKF < 1,00	Sangat Mandiri

*Sumber : Laporan Hasil Reviu Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020*

Tim Penyusun memberikan skor 1 (satu) pada indikator Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

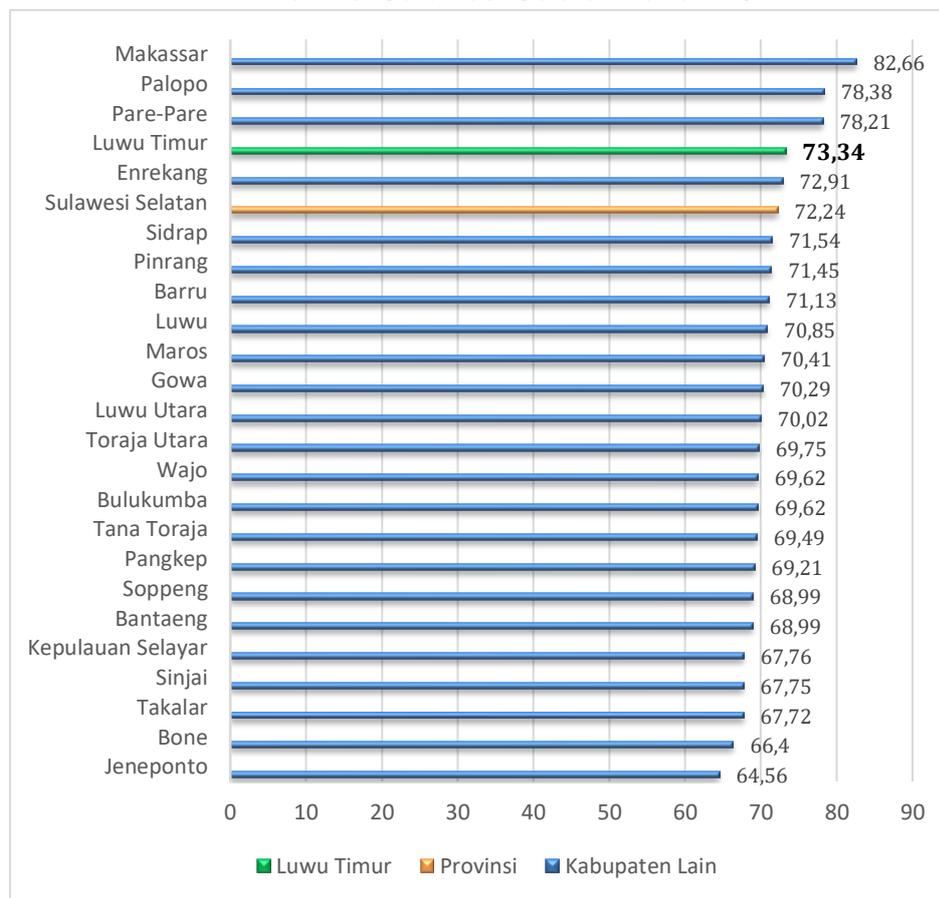
#### **4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)**

Untuk hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Kementerian Dalam Negeri, sampai saat penyusunan Ringkasan ini belum ada rilis dari Kemendagri tentang Hasil EKPPD Kabupaten/Kota.

#### **5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur dalam Buku Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2022 berdasarkan hasil penghitungan IPM menggunakan metode baru, angka IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sebesar 73.34, menempati peringkat 4 di Provinsi Sulawesi Selatan, sama dari tahun sebelumnya. Pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2017 sudah berstatus tinggi.

**Grafik 4.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021**



Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2022

Selama periode 2017-2021 angka IPM Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Selain itu, juga selalu berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 4.5**  
**Standar Penilaian Indikator**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Parameter	Skor
>_ 80,0	5
70 – 79,99	4
60 – 69,99	3
50 – 59,99	2
40 – 49,99	1

Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 4 (empat) pada indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga

permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Badan Pusat Statistik (BPS).

**6. Tingkat Kemiskinan**

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

**Tabel 4.6  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur**

<b>Data Kemiskinan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	20,82	20,99
Persentase Penduduk Miskin	6,85	6,94
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,05	1,09
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,24	0,26
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	350.576	371.947

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2022

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 mencapai 20,99 ribu jiwa. Angka ini juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat 7 persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 4.7  
Standar Penilaian Indikator  
Tingkat Kemiskinan**

<b>Parameter</b>	<b>Skor</b>
<= 4 %	5
0,4 – 5,99%	4
0,6 – 7,99%	3
0,8 – 9,99%	2
> 10%	1

Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah



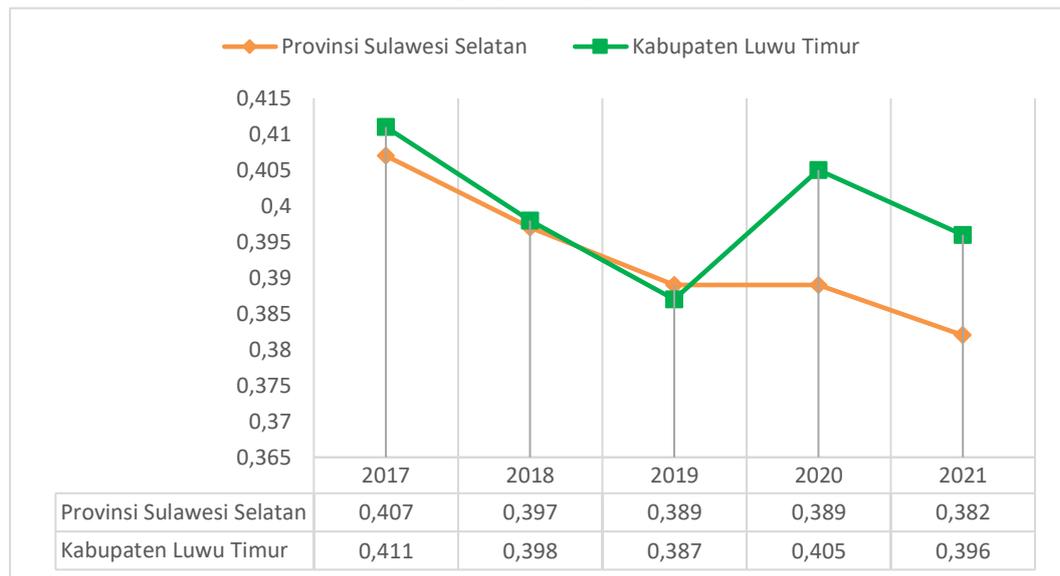
Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 3 (tiga) pada indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Badan Pusat Statistik (BPS).

**7. Gini Rasio**

Indeks gini atau rasio gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh atau untuk mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat.

Kabupaten Luwu Timur sendiri mengalami penurunan gini rasio pada tahun 2021 menjadi 0,396 dibanding pada tahun 2020 yang berada diangka 0,405 yang menandakan meningkatnya distribusi pendapatan terhadap penduduk semakin merata.

**Grafik 4.3**  
**Grafik Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam 5 Tahun terakhir**



Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Berdasar pada BPS Sulawesi Selatan nilai gini rasio Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 masih lebih tinggi dibanding nilai dari Provinsi Sulawesi Selatan, walaupun mengalami penurunan nilai tapi Kabupaten Luwu Timur tetap menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki nilai gini rasio yang lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten/Kota lain bersama dengan



Kota Makassar dan Kabupaten Soppeng yang memiliki nilai gini rasio lebih tinggi dibanding Kabupaten Luwu Timur.

**Tabel 4.8**  
**Standar Penilaian Indikator**  
**Indeks Gini Rasio**

Parameter	Skor
< 0,3	5
0,3 – 0,39	4
0,4 – 0,49	3
0,5 – 0,59	2
> 0,6	1

*Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah*

Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 4 (empat) pada indikator Indeks Gini Rasio Kabupaten Luwu TImur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Badan Pusat Statistik (BPS).

## **8. Indeks Pelayanan Publik**

Untuk hasil Indeks Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sampai saat penyusunan Ringkasan ini belum ada rilis dari Kemenpan-RB tentang Hasil Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Timur.

Berdasar pada penyampaian hasil evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik, nilai rata-rata Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah adalah 3,58 dengan kategori B (Baik).

**Tabel 4.9**  
**Standar Penilaian Indikator**  
**Indeks Pelayanan Publik**

Parameter	Skor
4,51 - 5	5
4,01 – 4,50	4
3,51 – 4	3
3,01 – 3,50	2
< 3,00	1

*Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah*

Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 3 (tiga) pada indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

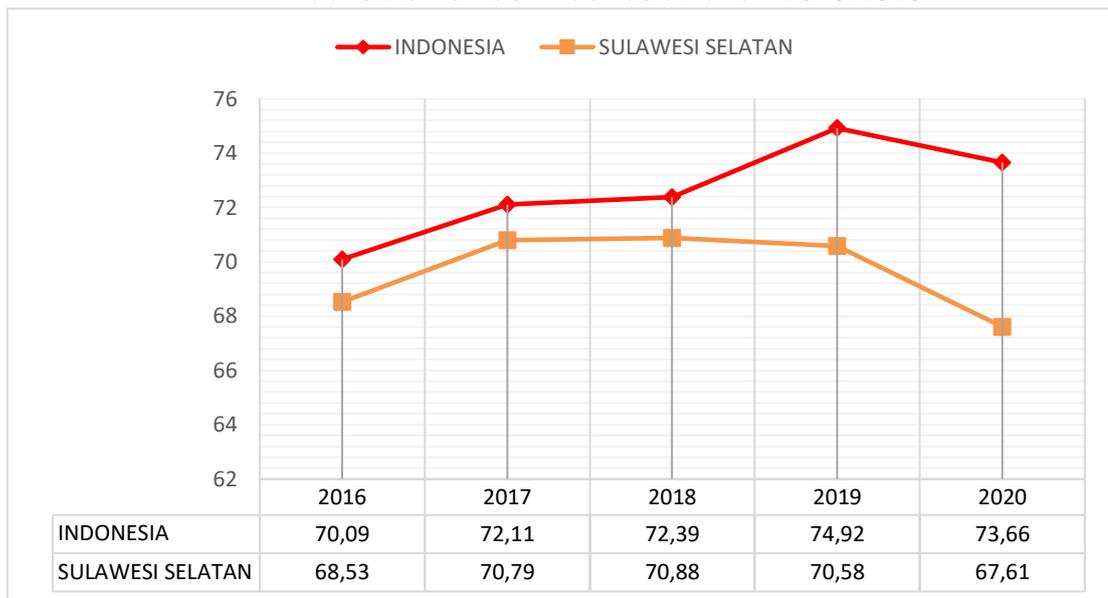
## 9. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah asesmen kondisi demokrasi di provinsi, baik dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya (aspek *procedural democracy*) maupun persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratik atau adab bernegara masyarakat (*substantive democracy*).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan pengukuran kondisi demokrasi di tingkat provinsi. Ia menghasilkan indeks demokrasi dari setiap provinsi di Indonesia. Angka indeks nasional atau indeks keseluruhan (*overall index*) yang merepresentasikan gambaran demokrasi Indonesia secara umum dalam IDI adalah rerata dari capaian provinsi-provinsi.

Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator). Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: <60 kategori “Buruk”, 60-80 “Sedang” dan > 80 kategori “Baik”. Berikut data Indeks Demokrasi Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan.

**Grafik 4.4**  
**Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasar pada data badan pusat statistik nasional Indonesia mengalami penurunan dari sebelumnya berada pada nilai 74,92 pada tahun 2019 menjadi 73,66 pada tahun 2020, begitu juga dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang bahkan menurun cukup drastis pada Tahun 2020 menjadi 67,61 setelah sebelumnya memiliki nilai 70,58 pada tahun 2019, hal ini menyebabkan Sulawesi Selatan berada pada peringkat 31 dalam indeks demokrasi Indonesia dari total 34 provinsi yang ada pada tahun 2020.

**Tabel 4.10**  
**Standar Penilaian Indikator**  
**Indeks Demokrasi Indonesia**

Parameter	Skor
>_ 90	5
80 - 89	4
70 – 79	3
60 – 69	2
< 60	1

Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 2 (dua) pada indikator Indeks Demokrasi Indonesia sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Badan Pusat Statistik (BPS).

**10. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) keuangan Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Selatan sebanyak 10 (Sepuluh) kali.

Penghargaan WTP Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pertama kali diraih pada tahun 2011 dan dapat dipertahankan hingga tahun 2021 terkecuali pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kemudian pada tahun 2014 sampai 2021 secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Tabel 4.11  
Standar Penilaian Indikator  
Opini BPK-RI atas LKPD**

<b>Parameter</b>	<b>Skor</b>
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	3
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2
Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	1

*Sumber : Pedoman Umum Penilaian dalam Rangka Penganugerahan Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah*

Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 3 (tiga) pada indikator Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



## 11. Penerimaan Penghargaan Pembangunan

Sepanjang Tahun 2021-2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berhasil mendapatkan penghargaan, diantaranya adalah:

- a. Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM RI (Penghargaan Berskala Nasional);
- b. Penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Penghargaan Berskala Nasional);
- c. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama Tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI (Penghargaan Berskala Nasional);
- d. Penghargaan Tertinggi dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan predikat “Kabupaten Informatif” Tahun 2022 dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (Penghargaan Berskala Nasional); dan
- e. Penghargaan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Penghargaan Berskala Nasional).

Jadi, berdasar pada penerimaan penghargaan Kabupaten Luwu Timur di atas Tim Penyusun memberikan skor 2 (dua) atas penghargaan yang diterima dari Lembaga/Institusi/Entitas Lain dalam Negeri, kemudian skor 3 (tiga) penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi dan skor 4 (empat) atas penghargaan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) pada indikator Penghargaan Berskala Nasional sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020.

Sedangkan pada indikator penghargaan lainnya Kabupaten Luwu Timur masih belum punya penghargaan terkait berupa tanda kehormatan dan juga penghargaan berskala internasional,

Adapun Variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah yang diukur meliputi indikator dan parameter sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.12**  
**Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam**  
**Pembangunan Daerah**

Bobot (%)			Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
Variabel	Dimensi	Indikator			
Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah (30%)	1. Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial (90%)	<b>1. Pertumbuhan Ekonomi (15%)</b> (Standar Penilaian BPS)	Nilai Pertumbuhan Ekonomi	1	15
		<b>2. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (10%)</b> (Standar Penilaian Peraturan Menteri Keuangan)	Nilai Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	3	30
		<b>3. Kemandirian Fiskal Daerah (5%)</b> (Standar Penilaian BPK)	Nilai Kemandirian Fiskal Daerah	1	5
		<b>4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (10%)</b> (Standar Penilaian Kemendagri)	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	4	40
		<b>5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (15%)</b> (Standar Penilaian BPS)	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4	60
		<b>6. Tingkat Kemiskinan (10%)</b> (Standar Penilaian BPS)	Nilai Persentase Tingkat Kemiskinan	3	30
		<b>7. Gini Rasio (10%)</b> (Standar Penilaian BPS)	Nilai Gini Rasio	4	40
		<b>8. Indeks Pelayanan Publik (10%)</b> (Standar Penilaian KEMENPAN-RB)	Nilai Indeks Pelayanan Publik	3	30

Bobot (%)			Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)	
Variabel	Dimensi	Indikator				
		<b>9. Indeks Demokrasi Indonesia (10%)</b> (Standar Penilaian BPS)	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia	2	20	
		<b>10. Opini BPK-RI atas LKPD (5%)</b> (Standar Penilaian BPK)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	3	15	
	<b>2. Penerimaan Penghargaan Pembangunan (10%)</b>	<b>1. Tanda Kehormatan (50%)</b>	Bintang		5	-
			Satyalancana		4	-
			Samkaryanugraha		3	-
			Tanda Jasa Medali		2	-
			Penghargaan		1	-
		<b>2. Penghargaan Berskala Internasional: (20%)</b>	Penghargaan dari Negara Asing		5	-
			Badan/Lembaga Internasional di bawah PBB		4	-
			Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Asing di Luar Negeri		3	-
			Lembaga Donor Internasional di Luar Negeri/Dalam Negeri		2	-
			Lembaga Internasional Lainnya di Luar Negeri/Dalam Negeri		1	-
		<b>3. Penghargaan Berskala Nasional dari: (30%)</b>	Pemerintah/Presiden		-	-
			Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)		4	120
			Pemerintah Daerah Provinsi		3	90
			Lembaga/Institusi/Entitas Lain di dalam Negeri		2	60
			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain		1	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Skor yang telah diberikan dikalikan dengan bobot nilai tiap-tiap indikator, ketika telah mendapat hasilnya kemudian seluruh nilai tersebut dijumlahkan untuk mendapat total nilai indikator.

Berdasar pada hasil pengolahan data tabel di atas nilai total skor indikator untuk dimensi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial adalah sebesar 285 dan nilai total indikator untuk dimensi penerimaan penghargaan pembangunan adalah sebesar 270.

Kemudian, untuk mendapatkan nilai total dimensi jumlah nilai total skor indikator dikalikan dengan bobot dimensi, untuk total nilai dimensi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial adalah  $285 \times 90 = 25.650$ . Sedangkan, untuk total nilai dimensi penerimaan penghargaan pembangunan adalah  $270 \times 10 = 2.700$ .

Setelah itu, untuk total nilai variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah adalah dengan menjumlahkan nilai dimensi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial dengan dimensi penerimaan penghargaan pembangunan yaitu  $25.650 + 2.700 = 28.350$ .

Jadi, total nilai variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur berdasar pada hasil pengolahan data sebelumnya adalah sebesar **28.350**.

Total nilai variabel kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasar pada hasil pengolahan data sebelumnya memiliki nilai yang sedang-rendah dikarenakan total nilai maksimal pada variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah yaitu 179.265. Sedangkan, nilai variabel kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar 28.350, cukup jauh selisihnya.

## **B. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Integritas dan Kapabilitas) berbobot 70% terdiri atas tiga dimensi yaitu kinerja kepemimpinan birokrasi (35%), kinerja kepemimpinan politik (40%) dan kinerja kepemimpinan sosial (25%).

Pada dimensi kinerja kepemimpinan birokrasi terdiri atas enam indikator dan 23 parameter, sedangkan pada dimensi kinerja kepemimpinan politik terdiri atas empat indikator dan 10 parameter dan pada dimensi kinerja kepemimpinan sosial terdiri atas lima indikator dan 22 parameter.

### **1. Kinerja Kepemimpinan Birokrasi**

Dalam pengukuran kinerja kepemimpinan sosial ada 6 (enam) indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian yaitu Visioner (20%), Kebijakan (20%), Integritas Pemerintahan (30%), Kemampuan Mendelegasikan Tugas dan Kewenangan (10%), Pengelolaan Sumber Daya (10%) dan Tanggung Jawab (10%).

Setiap parameter pada masing-masing indikator diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) berdasar pada hasil survei penyebaran kuesioner terhadap responden, yang meliputi:

- Skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
- Skor 4 (empat) kategori tinggi;
- Skor 3 (tiga) kategori sedang;
- Skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- Skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diukur meliputi dimensi kinerja kepemimpinan birokrasi, indikator dan parameter sebagaimana yang disajikan pada tabel 4.13 berikut.

**Tabel 4.13**

**Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  
Dimensi Kinerja Kepemimpinan Birokrasi**

Variabel	Bobot (%)		Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
	Dimensi	Indikator			
Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Integritas dan Kapabilitas) (70%)	Kinerja Kepemimpinan Birokrasi (35%)	1. Visioner (20%)	a. KDH memiliki pemahaman yang baik mengenai persoalan daerah saat ini.	5	280
			b. KDH memiliki pemahaman yang baik mengenai perubahan di masa depan.	4	
			c. KDH meurmuskan kebijakan berorientasi pada kebutuhan daerah di masa depan.	5	
		2. Kebijakan (20%)	a. KDH menempatkan pejabat secara profesional.	5	380
			b. KDH menetapkan APBD tepat waktu.	4	
			c. KDH menetapkan perencanaan daerah tepat waktu (RPJMD dan RKPD).	5	
			d. KDH menghasilkan program yang inovatif.	5	
		3. Integritas Pemerintahan (30%)	a. KDH tidak melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri.	5	720
			b. KDH tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dalam penetapan kebijakan daerah.	4	
			c. KDH berani bertindak tegas terhadap bawahan yang melakukan kesalahan.	5	
			d. KDH bertindak tegas terhadap setiap tindakan korupsi bawahannya.	5	
			e. KDH adalah figur yang disegani dan layak diteladani.	5	

Bobot (%)		Indikator	Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
Variabel	Dimensi				
		<b>4. Kemampuan Mendelegasikan Tugas dan Kewenangan (10%)</b>	a. Mampu mengelola tugas pemerintahan, pelayanan publik dan masyarakat secara efektif.	5	230
			b. Melimpahkan tugas tertentu kepada Wakil Kepala Daerah untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	4	
			c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	5	
			d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	5	
			e. Memberi arahan perbaikan atas pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	4	
		<b>5. Pengelolaan Sumber Daya (10%)</b>	a. Mengutamakan sistem karier dan prestasi (sistem merit) dalam pengelolaan kepegawaian.	4	190
			b. Mampu membangun netralitas birokrasi/ASN.	5	
			c. Mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pekerjaan.	5	
			d. Mengutamakan prinsip keadilan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.	5	
		<b>6. Tanggung Jawab (10%)</b>	a. KDH melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.	5	100
			b. KDH melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	5	

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Jadi, berdasar pada hasil pengolahan data pada tabel di atas telah diketahui nilai dari masing-masing indikator pada dimensi Kinerja Kepemimpinan Birokrasi. Total nilai pada tabel di atas didapatkan dari hasil perkalian antar bobot indikator dikalikan dengan jumlah total nilai parameter tiap indikator.

Kemudian, setelah mengetahui nilai masing-masing indikator perlu untuk mengetahui jumlah total nilai indikator dan juga jumlah total nilai dimensi. Untuk mengetahui jumlah total nilai indikator, semua nilai tiap indikator harus dijumlahkan. Sehingga berdasar pada nilai di atas maka jumlah total nilai Indikator adalah  $280+380+720+230+190+100 = 1.900$ .

Untuk mengetahui jumlah total nilai dimensi maka jumlah nilai total indikator dikalikan dengan nilai bobot dimensi kinerja kepemimpinan birokrasi. Jadi, jumlah total nilai dimensi adalah  $1.900 \times 35 = 66.500$ . Nilai ini nantinya yang akan dijumlahkan dengan nilai dimensi lainnya untuk mengetahui total nilai variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan (integritas dan kapabilitas).

## 2. Kinerja Kepemimpinan Politik

Kinerja kepemimpinan politik Kepala Daerah diukur melalui 4 (empat) indikator utama sebagai dasar penilaian yaitu hubungan Kepala Daerah – DPRD (35%), Hubungan Kepala Daerah - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) (30%), Hubungan Kepala Daerah – Partai Politik (15%) dan Hubungan Kepala Daerah – Kepala Daerah (20%).

Setiap parameter pada masing-masing indikator diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) berdasar pada hasil survei penyebaran kuesioner terhadap responden, yang meliputi:

- Skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
- Skor 4 (empat) kategori tinggi;
- Skor 3 (tiga) kategori sedang;
- Skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- Skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diukur meliputi dimensi kinerja kepemimpinan politik, indikator dan parameter sebagaimana yang disajikan pada tabel 4.14 berikut.

**Tabel 4.14**

**Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  
Dimensi Kinerja Kepemimpinan Politik**

Bobot (%)			Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
Variabel	Dimensi	Indikator			
Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Integritas dan Kapabilitas) (70%)	Kinerja Kepemimpinan Politik (40%)	1. Hubungan Kepala Daerah - DPRD (35%)	a. KDH membangun hubungan harmonis dengan DPRD dalam penyusunan kebijakan daerah (Perda).	5	665
			b. KDH membangun hubungan harmonis dengan DPRD dalam penyusunan APBD.	5	
			c. KDH membangun hubungan harmonis dengan DPRD dalam kebijakan strategis kepegawaian.	4	
			d. KDH membangun hubungan harmonis dengan DPRD dalam laporan keterangan pertanggung jawaban.	5	
		2. Hubungan Kepala Daerah – FORKOPIMDA (30%)	a. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam penanganan isu-isu daerah.	5	270
			b. Melibatkan FORKOPIMDA dalam implementasi kebijakan strategis daerah.	4	
		3. Hubungan Kepala Daerah – Partai Politik (15%)	a. Mampu melakukan komunikasi politik dengan partai politik	4	135
			b. Mampu bekerjasama dengan partai politik dalam menangani isu-isu politik di daerah.	5	
		4. Hubungan Kepala Daerah – Kepala Daerah (20%)	a. Mampu membangun hubungan yang harmonis antar Kepala Daerah baik secara vertikal maupun horizontal.	5	200
			b. Mampu bekerjasama antar Kepala Daerah dalam penanganan isu-isu bersama.	5	

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022



Jadi, berdasar pada hasil pengolahan data pada tabel di atas telah diketahui nilai dari masing-masing indikator pada dimensi Kinerja Kepemimpinan Politik. Total nilai pada tabel di atas didapatkan dari hasil perkalian antar bobot indikator dikalikan dengan jumlah total nilai parameter.

Kemudian, setelah mengetahui nilai masing-masing indikator perlu untuk mengetahui jumlah total nilai indikator dan juga jumlah total nilai dimensi. Untuk mengetahui jumlah total nilai indikator, semua nilai tiap indikator harus dijumlahkan. Sehingga berdasar pada nilai di atas maka jumlah total nilai Indikator adalah  $665+270+135+200 = 1.270$

Untuk mengetahui jumlah total nilai dimensi maka jumlah nilai total indikator dikalikan dengan nilai bobot dimensi kinerja kepemimpinan politik. Jadi, jumlah total nilai dimensi adalah:  $1.270 \times 40 = 50.800$ . Nilai ini nantinya yang akan dijumlahkan dengan nilai dimensi lainnya untuk mengetahui total nilai variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan (integritas dan kapabilitas).

### 3. Kinerja Kepemimpinan Sosial

Dalam pengukuran kinerja kepemimpinan sosial ada 5 (lima) indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian yaitu komunikatif (20%), kolaboratif untuk kemajuan daerah (20%), responsif (20%), serta penggerakan partisipasi masyarakat (25%) dan penegakkan etika sosial (15%) bagaimana perilaku Kepala Daerah terhadap kehidupan bermasyarakat.

Setiap parameter pada masing-masing indikator diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) berdasar pada hasil survei penyebaran kuesioner terhadap responden, yang meliputi:

- Skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
- Skor 4 (empat) kategori tinggi;
- Skor 3 (tiga) kategori sedang;
- Skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- Skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diukur meliputi dimensi kinerja kepemimpinan sosial, indikator dan parameter sebagaimana yang disajikan pada tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15

Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  
Dimensi Kinerja Kepemimpinan Sosial

Variabel	Bobot (%)		Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
	Dimensi	Indikator			
Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Integritas dan Kapabilitas) (70%)	Kinerja Kepemimpinan Sosial (25%)	1. Komunikatif (20%)	a. Mampu melakukan komunikasi sosial dengan tokoh masyarakat.	5	360
			b. Mampu melakukan komunikasi religius dengan tokoh agama.	5	
			c. Mampu melakukan komunikasi ilmiah dengan unsur akademisi untuk mengatasi persoalan daerah.	4	
			d. Mampu melakukan komunikasi kebijakan dengan kalangan pers.	4	
		2. Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah (20%)	a. Mampu berkolaborasi (bekerja -sama) dengan Pihak Swasta dengan memperhatikan etika dan kebaikan bersama.	5	480
			b. Mampu berkolaborasi dengan Pihak Perguruan Tinggi.	4	
			c. Mampu berkolaborasi dengan Pihak Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.	5	
			d. Mampu berkolaborasi dengan Pihak Media Massa (Pers).	5	
			e. Mampu berkolaborasi dengan masyarakat perorangan.	5	
		3. Responsif (20%)	a. Cepat tanggap terhadap situasi darurat yang dialami masyarakat.	5	380
			b. Tidak meninggalkan tugas dan wilayah kerja ketika terjadi situasi darurat yang dialami masyarakat.	5	
			c. Cepat membantu masyarakat yang mengalami masalah.	5	
			d. Cepat tanggap dalam merespon permasalahan di masyarakat dengan memanfaatkan kanal aspirasi (media sosial, blog, media siaran, dan website).	4	

Variabel	Bobot (%)		Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
	Dimensi	Indikator			
		<b>4. Penggerakan Partisipasi Masyarakat (25%)</b>	a. Meminta pendapat masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi daerah.	4	575
			b. Meminta pengawasan masyarakat ( <i>social control</i> ) terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.	4	
			c. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.	5	
			d. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.	5	
			e. Menerima dan menindaklanjuti kritikan dan saran dari masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah.	5	
		<b>5. Penegakkan Etika Sosial (15%)</b>	a. Santun dalam ucapan, sikap, dan perilaku sosial	5	285
			b. Menegakkan norma sosial (norma adat istiadat dan budaya) dalam kehidupan masyarakat.	5	
			c. Membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial (panti asuh anak, panti jompo, panti rehabilitasi sosial, dll).	4	
			d. Mengawal kerukunan antar-umat beragama dalam kehidupan sosial.	5	

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Jadi, berdasar pada hasil pengolahan data pada tabel di atas telah diketahui nilai dari masing-masing indikator pada dimensi Kinerja Kepemimpinan Sosial. Total nilai pada tabel di atas didapatkan dari hasil perkalian antar bobot indikator dikalikan dengan jumlah total nilai parameter.

Kemudian, setelah mengetahui nilai masing-masing indikator perlu untuk mengetahui jumlah total nilai indikator dan juga jumlah total nilai dimensi. Untuk mengetahui jumlah total nilai indikator, semua nilai tiap indikator harus dijumlahkan. Sehingga berdasar pada nilai di atas maka jumlah total nilai Indikator adalah  $360+480+380+575+285 = 2.080$ .

Untuk mengetahui jumlah total nilai dimensi maka jumlah nilai total indikator dikalikan dengan nilai bobot dimensi kinerja kepemimpinan politik. Jadi, jumlah total nilai dimensi adalah:  $2.080 \times 25 = 52.000$ . Nilai ini nantinya yang akan dijumlahkan dengan nilai dimensi lainnya untuk mengetahui total nilai variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan (integritas dan kapabilitas).

Kemudian, untuk mencari jumlah total nilai variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Nilai Variabel} &= \text{Total Nilai KKB} + \text{Total Nilai KKP} + \text{Total Nilai KKS} \\ \text{Total Nilai Variabel} &= 66.500 + 50.800 + 52.000 \\ \text{Total Nilai Variabel} &= \mathbf{169.300} \end{aligned}$$

Total nilai variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Luwu Timur berdasar pada hasil survei penyebaran kuesioner memiliki nilai yang tinggi dikarenakan hampir mendekati total nilai maksimal yang bisa didapatkan pada variabel ini, total nilai maksimal pada variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu 179.265.

### C. Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)

Untuk pengukuran atau penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah digunakan formula sebagai berikut, Total Nilai Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah (1) dijumlahkan Total Nilai Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (2), kemudian bobot dari masing-masing variabel juga dijumlahkan.

$$\text{Total Nilai Variabel 1} = 28.350$$

$$\text{Total Nilai Variabel 2} = 169.300$$

$$\text{Jumlah Nilai Variabel} = \mathbf{197.650}$$

Bobot Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah sebesar 30 dijumlahkan dengan Bobot Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 70, jadi nilai bobot seluruh variabel adalah 100.

Untuk total nilai maksimal variabel didapatkan berdasarkan hitungan jika seluruh tabel di isi dengan skor tertinggi semuanya, sehingga total nilai maksimal variabel adalah sebesar 238.365. Kemudian untuk Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah selanjutnya menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Nilai Variabel} : \text{Total Nilai Maksimal Variabel} \times 100$$

Jadi, berdasar pada formulai di atas maka formulanya akan dikerjakan seperti berikut:

$$197.650 : 238.365 \times 100 = \mathbf{83}$$

Berdasar pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah teknik penilaian untuk penetapan kepala daerah terbaik berdasarkan urutan perolehan total skor variabel, didasarkan pada skala nilai berikut:

- Skor 90 (Sembilan Puluh) – 100 (Seratus), Kategori Sangat Tinggi;
- Skor 80 (Delapan Puluh) – 89 (Delapan Puluh Sembilan) Kategori Tinggi;
- Skor 60 (Enam Puluh) – 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Kategori Sedang;
- Skor 40 (Empat Puluh) – 59 (Lima Puluh Sembilan) Kategori Rendah; dan
- Skor 0 (Nol) – 39 (Tiga Puluh Sembilan) Kategori Sangat Rendah.

Jadi, berdasar pada hasil di atas maka nilai Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar **83** yang dimana berdasar skala penilaian menurut Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 masuk dalam kategori **Tinggi**.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengukuran pada Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah menghasilkan total nilai untuk dimensi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial sebesar **25.650**. Sedangkan, untuk total nilai dimensi penerimaan penghargaan pembangunan adalah sebesar **2.700**. Sehingga, dari total nilai tiap-tiap dimensi pada variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah maka total jumlah nilai variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar **28.350**.
2. Pengukuran pada variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menghasilkan total nilai untuk dimensi Kinerja Kepemimpinan Birokrasi sebesar **66.500**, sedangkan total nilai dimensi Kinerja Kepemimpinan Politik sebesar **50.800** dan total nilai dimensi Kinerja Kepemimpinan Sosial sebesar **52.000**. Sehingga, dari total nilai pada tiap-tiap dimensi pada variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan maka total jumlah nilai variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar **169.300**.
3. Dari hasil pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah dan Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan maka diketahui nilai Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar **83** yang masuk dalam kategori **Tinggi**.

## **B. Rekomendasi**

Rekomendasi bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah Dimensi Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial, Kabupaten Luwu Timur harus tetap menjaga penilaian yang baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur bahkan harus bisa meningkat, terutama pada indikator Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Luwu Timur masih memiliki poin yang rendah diharapkan nantinya dapat meningkat, kemudian pada Indeks Pelayanan Publik dimana Kabupaten Luwu Timur masih tergolong cukup rendah. Serta, beberapa indikator lainnya harus terus dijaga konsistensinya seperti pada indikator Opini BPK-RI atas LKPD atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar selalu dapat bertahan pada posisi tersebut.

Pada Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dimensi Kinerja Kepemimpinan Birokrasi, penilaian responden terhadap sosok kepala daerah sudah sangat baik dimana jawaban para responden cenderung memilih jawaban “Sangat Setuju” hanya saja memang semoga Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur tetap berbenah meningkatkan lagi agar lebih visioner kedepannya terhadap permasalahan, perubahan serta kebutuhan daerah Kabupaten Luwu Timur, meningkatkan inovasi baik terkait kebijakan maupun program daerah kedepannya, selalu menjaga integritas pemerintahan baik pada diri sendiri maupun bawahan, menerapkan efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam pekerjaan, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada Dimensi Kinerja Kepemimpinan Politik Kepala Daerah dinilai oleh responden telah memiliki hubungan yang baik dengan berbagai pihak baik DPRD, FORKOPIMDA, Parpol dan juga Kepala Daerah lainnya, semoga

hubungan yang baik itu tetap dapat dijaga kedepannya untuk Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju kedepannya, karena hubungan dengan berbagai pihak ini tidak dapat disepelekan demi Kabupaten Luwu Timur nantinya agar Visi Misi yang telah dijadikan tujuan dapat dicapai, karena dalam perkembangan suatu wilayah dibutuhkan memang peran dari banyak pihak untuk dapat ikut terlibat dalam proses pengembangan suatu wilayah.

Pada Dimensi Kinerja Kepemimpinan Sosial Kepala Daerah dituntut untuk lebih komunikatif lagi terutama terkait harus mampu berkomunikasi ilmiah dengan unsur akademik untuk mengatasi persoalan daerah, serta mampu melakukan komunikasi kebijakan dengan kalangan pers/media. Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur juga harus terus meningkatkan dan berupaya untuk kolaboratif demi kemajuan daerah baik dengan pihak swasta, lembaga kemasyarakatan, pihak media dan masyarakat tentunya. Pemerintah Daerah juga didorong agar bisa lebih responsif terhadap permasalahan yang dialami masyarakat, serta cepat tanggap dalam merespon permasalahan di masyarakat ketika adanya pengaduan dan lainnya dapat dengan memanfaatkan segala jenis media atau penghubung lainnya.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur juga harus bisa lebih sering melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi daerah yang dimana nantinya akan diterapkan ke masyarakat itu sendiri, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur juga harus bisa menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih mau terlibat dalam pembangunan daerah. Serta Pemerintahan Daerah juga harus dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam berucap maupun bereperilaku, dan mengawal kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sosial.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Berkah, Rahmat, Karunia dan RidhoNya, tim peneliti dapat menyelesaikan Laporan Hasil Penelitian yang berjudul: **“KAJIAN RISET KEMISKINAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR”**

Laporan Hasil Penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas kegiatan penelitian yang dilakukan oleh TimPeneliti pada LPPM di Universitas Andi Djemma.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan MoU antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Universitas Andi Djemma dalam Bidang Penelitian yang telah dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara BAPPELITBANGDA dengan LPPM UNANDA Tahun anggaran 2022.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Luwu Timur yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang “KAJIAN RISET KEMISKINAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR”
2. Yth. Bapak Kepala BAPPELITBANGDA Luwu Timur atas kepercayaan kerjasama sebagai Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan Pengembangan.
3. Yth. Bapak Dewan Kelitbangan dan Tim Pengendali Mutu Luwu Timur atas dukungan serta Kerjasama dalam penelitian ini.
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Sosial Luwu Timur beserta unsurnya

yang telah memberikan dukungan berupa data-data untuk keperluan penelitian ini.

5. Yth. Bapak Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPELITBANGDA Luwu Timur beserta staff serta unsurnya yang telah memberikan dukungan administrasi dalam penelitian ini.

Akhirnya, peneliti mengharapkan agar Laporan Hasil Penelitian ini dapat memenuhi fungsinya sebagai khasanah ilmu pengetahuan. Peneliti menyadari pula bahwa Laporan Hasil Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan, guna perbaikan dan penyempurnaan Laporan Hasil Penelitian ini. Peneliti tak lupa menyampaikan permohonan maaf jika dalam penulisan Laporan Hasil Penelitian ini terdapat kekeliruan dan kekurangan.

Demikian, dan terima kasih.

Palopo, November 2022

Tim Peneliti.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum .....	4
1.3. Rumusan Masalah .....	5
1.4. Tujuan dan Sasaran .....	5
1.6. Metodologi .....	7
1.7. Luaran .....	20
BAB 2. GAMBARAN UMUM DAERAH .....	21
2.1. Keadaan Geografis .....	21
2.2. Kependudukan .....	22
2.3. PDRB.....	23
2.4. Ketenagakerjaan .....	25
2.5. Indeks Pembangunan Manusia.....	25
2.6. Pengeluaran Penduduk (Pengeluaran Perkapita) .....	26
BAB 3. PROFIL KEMISKINAN .....	28
3.1. Kondisi Kemiskinan (Exisisting) .....	28
3.2. Indikator Kemiskinan.....	30
3.3. Penyebab Kemiskinan .....	32
a. Analisis aktifitas masyarakat. ....	32
b. Analisis manajemen keuangan masyarakat.....	34
c. Analisis sumber penghidupan .....	37
d. Analisis Kelembagaan .....	40

3.4. Karakteristik Kemiskinan.....	42
3.5. Permasalahan Kemiskinan.....	44
3.6. Manajemen Pendataan.....	44
BAB 4. PRIORITAS PROGRAM .....	47
BAB 5. PENUTUP .....	51
5.1. Kesimpulan .....	51
5.2. Rekomendasi .....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN .....	55

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tingginya angka kemiskinan dan rentannya penduduk miskin terhadap gejolak makro-ekonomi, telah menempatkan masalah kemiskinan sebagai isu nasional. Berdasarkan data BPS Januari 2022 (Gambar 1), jumlah penduduk miskin saat ini mencapai 9,71 persen dari total penduduk atau sekitar 26,50 juta jiwa dan mengalami penurunan 0,36 persen terhadap maret 2021 (BPS, 2022). Beberapa lembaga internasional bahkan memiliki angka yang jauh lebih tinggi. Bank Dunia misalnya, memperkirakan jumlah penduduk miskin Indonesia dengan menggunakan garis kemiskinan internasional USD2 per hari per orang mencapai 49,5 persen atau sekitar 108 juta jiwa. Dengan kata lain, setiap dua orang penduduk, satu diantaranya terkategori sebagai orang miskin. Sebuah angka yang tentu saja sangat mengkhawatirkan.



Gambar 1. Statistik Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah global yang menggambarkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, sebagian memahami secara subyektif dan komparatif, dari segi moral dan evaluatif, dan sementara lainnya memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan. Pemahaman kemiskinan terutama menggambarkan kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam hal ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan kurangnya pelayanan dasar, serta kebutuhan sosial. Gambaran kemiskinan lainnya adalah keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial memberikan makna bahwa kemiskinan juga mencakup masalah-masalah politik dan moral, yang tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

Sejak 1994, pemerintah semakin intensif mengorganisasikan sejumlah kebijakan guna melengkapi kebijakan-kebijakan sebelumnya, antara lain program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K), Kredit Usaha untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KUKESRA) dan Tabungan untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TAKESRA), Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMTAS), Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Program Pembangunan Kecamatan (PPK), dan

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), termasuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama krisis ekonomi.

Luwu Timur merupakan kabupaten dengan karakter wilayah yang memiliki sebaran kemiskinan yang beragam karena dipengaruhi kondisi wilayah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 tercatat sebesar 20,82 ribu jiwa atau 6,85 % dari jumlah penduduk (BPS, 2020) dan tahun 2021 sebesar 20,99 ribu jiwa atau 6,94 % dari jumlah penduduk (BPS, 2021). Data tersebut belum diketahui secara spesifik berdasarkan zona lingkungan yang didiaminya, masih parsial serta indikator kemiskinan berdasarkan persepsi yang belum tentu berlaku dimasyarakat.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan baik dalam skala nasional, regional maupun wilayah. Masalah kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, implikasi permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, yang pada akhirnya menentukan kelangsungan pembangunan kualitas manusia itu sendiri yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam kaitan proses perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang sangat dinamis, sehingga membutuhkan peran institusi, program serta metode pendekatan yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan, yang bertumpu pada beberapa nilai dasar filosofi yaitu ***rasa, karsa, dan cipta*** sebagai kata kunci dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial (Redmod & Johnson, 1992; Sumodiningrat, 2008).

Program kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya tidak terlepas dari nilai-nilai dasar filosofinya, antara lain rasa yang berarti menyadari bahwa setiap individu memiliki harkat dan martabat diri, karsa memiliki arti kemauan dan kemampuan untuk berkreasi menciptakan sesuatu untuk meningkatkan taraf hidup dan berkembang lebih maju (Johnson, 1992; Sumodiningrat, 2008). Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus karena membiarkan kemiskinan sama saja dengan menggadaikan nilai-nilai martabat bangsa, dimana masyarakat yang miskin akan menjadi titik lemah dalam pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan kemiskinan bukanlah suatu gejala baru bagi masyarakat Indonesia. Selama puluhan tahun, kondisi kemiskinan itu selalu nyata di tengah-tengah masyarakat baik di kota, di desa, daerah pegunungan, dan pesisir.

## **1.2. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235).
- 3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- 4) Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 16 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Desa, pasal 8 huruf g nomor 12 tentang Pendataan dan Analisis Kemiskinan Partisipatif.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam kajian kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur adalah:

- 1) Bagaimana kondisi kemiskinan (*Exisisting*) di Kabupaten Luwu Timur?
- 2) Apa saja indikator kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?
- 3) Apa saja penyebab kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?
- 4) Bagaimana karakteristik kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?
- 5) Apa saja permasalahan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?
- 6) Bagaimana manajemen pendataan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?
- 7) Apa prioritas program untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?

### **1.4. Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Tujuan**

Tujuan kajian kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis kondisi kemiskinan (*Exisisting*) di Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Untuk mengidentifikasi indikator kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Untuk mengidentifikasi penyebab kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

- 4) Untuk menganalisis karakteristik kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- 5) Untuk menganalisis permasalahan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- 6) Untuk menganalisis manajemen pendataan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- 7) Untuk merumuskan prioritas program untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

**b. Sasaran**

Sasaran dari kegiatan penyusunan Kajian Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur adalah:

- 1) Tersusunnya konsep kemiskinan berdasarkan indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Terumuskannya kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Tersusunnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengentasan kemiskinan secara komprehensif di Kabupaten Luwu Timur.

**1.5. Ruang Lingkup**

1) Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah studi ini adalah wilayah Kabupaten Luwu Timur.

2) Lingkup Materi

Secara keseluruhan studi ini akan mengakomodasikan aspek-aspek yang dianalisis meliputi:

- a) Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.
- b) Kemiskinan absolute adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.
- c) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d) Kebijakan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.

## **1.6. Metodologi**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) yang bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam dan tidak untuk membuat generalisasi, melainkan membuat penjelasan mendalam atas makna dibalik objek studi, (Creswell, 2010). Metode ini bertujuan untuk mengungkap proses, interpretasi makna dan pengungkapan keadaan atau perilaku individu secara holistik, (Yin, 2011). Menurut Gunawan (2015) penelitian kualitatif berupaya membangun pemahaman (*verstehen*) dan penjelasan atas perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Strategi yang digunakan adalah *Partisipatory Rural Aprasial* (PRA) dengan alat Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP).

**b. Lokasi dan Waktu Penelitian**

1) Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, dengan memilih 4 (empat) klaster berdasarkan kondisi geografis dan topografi wilayah, yaitu :

1. Klaster Pegunungan
2. Klaster Pesisir
3. Klaster Pertambangan
4. Klaster Pertanian

2) Waktu Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, sejak dimulainya kegiatan awal, dengan matriks kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Kajian Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian kegiatan	Agust.	Sept.				Okt.				Nop	
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
<b>1.</b>	<b>Tahap Persiapan</b>											
	- Persiapan tim studi											
	- Identifikasi desa miskin											
	- Penyusunan rencana kerja											
	- Metodologi dan penetapan instrumen											
<b>2.</b>	<b>Tahap Survei</b>											

No	Uraian kegiatan	Agust.	Sept.				Okt.				Nop	
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
	<b>Lapangan</b>											
	- Assesment dan analisis data sekunder											
	- FGD tingkat wilayah/klaster/desa											
	1. Desa Harapan											
	2. Desa Matano											
	3. Desa Batu Putih											
	4. Desa Pattengko											
<b>3.</b>	<b>Tahap Penyusunan Fakta dan Analisa</b>											
<b>4.</b>	<b>Tahap Penyusunan Kajian Kemiskinan</b>											
	1. Laporan Pendahuluan											
	2. Laporan Kemajuan											
	3. Laporan Akhir											

### **c. Sumber Data**

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam (indepth interview) informan terpilih dengan menggunakan daftar pertanyaan kunci tersebut, bisa saja berkembang sesuai dengan keadaan lapangan. Wawancara mendalam merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa :

- a. Data mengenai aktifitas masyarakat
- b. Data mengenai sumber penghidupan masyarakat
- c. Data mengenai aktifitas kelembagaan
- d. Data mengenai manajemen keuangan
- e. Data mengenai potensi, permasalahan dan solusi

#### 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi penunjang dalam penelitian ini yang di peroleh dari hasil kajian pustaka. Agar semua data atau informasi yang dibutuhkan dapat dikumpulkan, maka sebelum dilaksanakan peneltian, terlebih dahulu ditetapkan data-data yang dibutuhkan, sumber-sumber yang dapat ditelaah, juga instansi-instansi mana saja yang harus dihubungi untuk mengumpulkan data dan atau informasi yang dibutuhkan. Data-data sekunder diantaranya adalah dokumen laporan yang ada pada instansi sepertidari Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial dan Desa.

#### d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) **Observasi.** Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan, sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap suatu fenomena. Menurut Creswell (2016) bahwa Teknik pengumpulan data dengan observasi merupakan teknik yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu kelompok dan organisasi yang berkaitan dengan aktifitas masyarakat di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat aktifitas dalam lokasi penelitian. Selain itu peneliti dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh (Creswell, 2009).
- 2) **Wawancara,** Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab secara lisan (Kartono, 1980; Gunawan, I. 2015). Sedangkan menurut (Denzin dan Lincoln 1994; Gunawan, I. 2015) bahwa wawancara merupakan suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan yang dilakukan secara berkali-kali. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan yang terlibat dalam aktivitas masyarakat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan

daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan yang telah disiapkan sebelumnya.

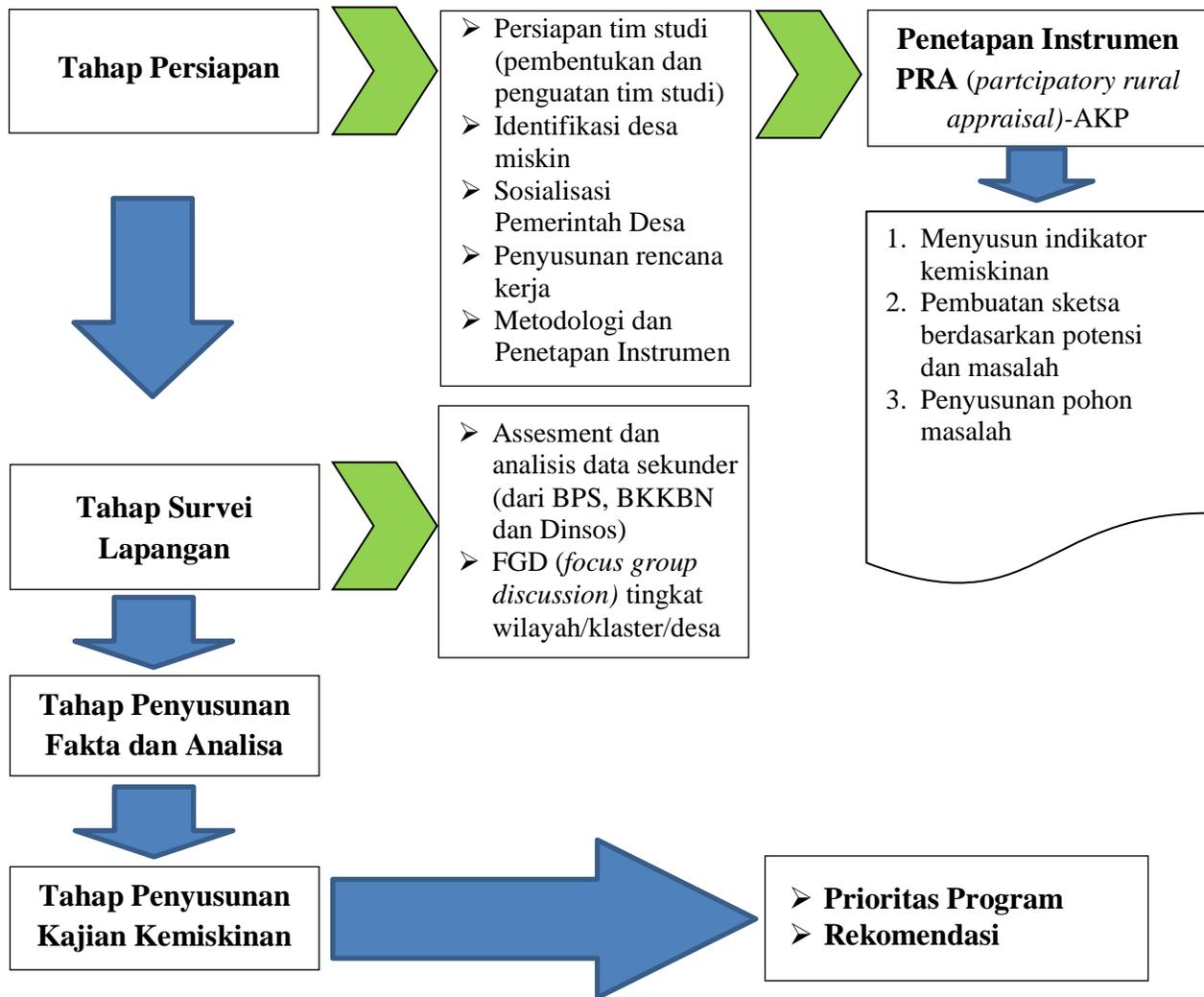
- 3) **Focus Group Discussion (FGD)**, merupakan diskusi dalam kelompok yang dilakukan di bertujuan untuk penyamaan persepsi tentang tema yang akan diteliti terdiri dari unsur Akademisi, Instansi terkait (Bappelitbangda, BPS, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dan Masyarakat di desa.
- 4) **Catatan Harian**, Catatan harian atau catatan lapangan merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Terdapat tiga jenis catatan harian:
  1. Catatan Fakta: data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk uraian rinci maupun kutipan langsung maupun gerakan tubuh (gesture) yang terlihat saat melakukan aktivitasnya.
  2. Catatan Teori: hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan struktur masyarakat yang ditelitinya, serta merumuskan hubungan antara topik-topik (“variabel”) penting penelitiannya secara induktif sesuai fakta-fakta di lapangan.
  3. Catatan Metodologis: pengalaman peneliti ketika berupaya menerapkan metode kualitatif di lapangan.
- 5) **Dokumentasi**, Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang atau lembaga. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Dalam arti luas dokumen berupa setiap proses

pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan atau gambar (foto) dan karya monumental. Sedangkan (Lincoln dan Guba 1994; Gunawan (2015) mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh dan untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Creswell (2016) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah kumpulan dokumen berupa dokumen publik (Koran, makalah, laporan) ataupun dokumen privat (buku harian, diari surat dan email).

- 6) **Audio Visual**, Menurut Creswell (2016), audio visual merupakan kategori terakhir dari tehnik pengumpulan data kualitatif dimana materi audio visual data ini berupa foto, film, objek-objek seni, videotape atau segala jenis suara atau bunyi.

## Teknik Analisis Data

Proses dan mekanisme Penyusunan Kajian Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:



Gambar1. Alur kegiatan penelitian pemetaan kemiskinan di Kab. Luwu Timur

## 1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan sebelum melakukan analisis kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan pemetaan masyarakat miskin berdasarkan indikator lokal, ada beberapa persiapan yang dilakukan adalah;

### a. Pembentukan dan Penguatan Tim Studi

Pembentukan Tim studi dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andi Djemma. Tugas Tim studi adalah untuk melakukan proses analisis kemiskinan berdasarkan sketsa wilayah/desa yang ditentukan berdasarkan klaster/wilayah pesisir, klaster/wilayah pegunungan, klaster/wilayah pertanian, dan klaster/wilayah pertambangan. Koordinasi dan penguatan Tim studi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim, sehingga dapat memahami konsep analisis kemiskinan partisipatif.

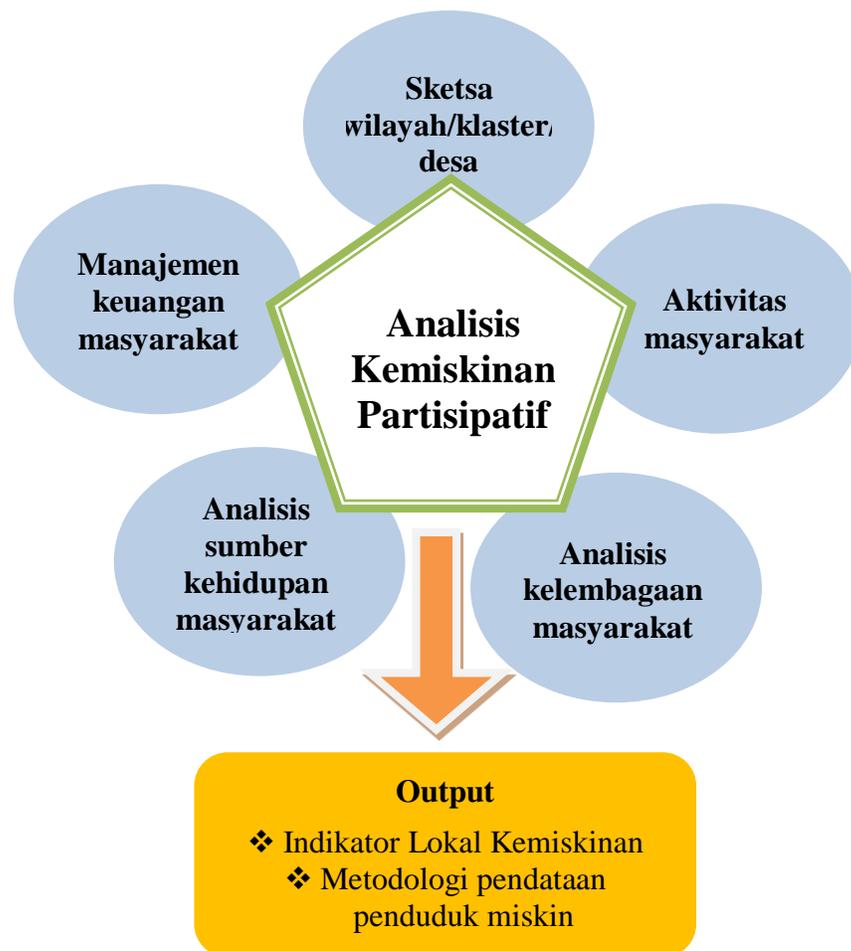
### b. Penyusunan Rencana Kerja

Rencana kerja disusun untuk disepakati oleh seluruh anggota Tim dan jika memungkinkan disosialisasikan kepada masyarakat. Rencana kerja disusun dan disesuaikan dengan masing-masing sketsa wilayah/kalster, yang memuat:

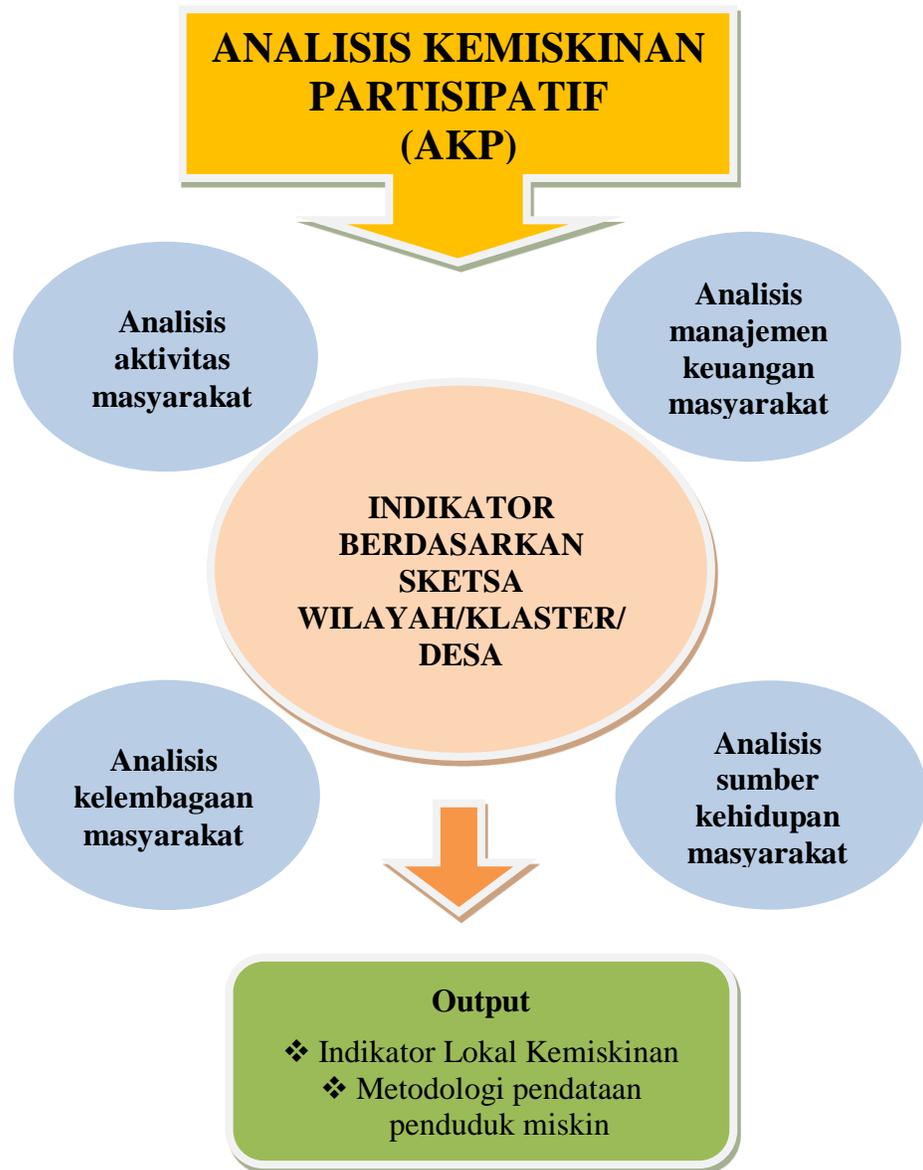
- ❖ Waktu pelaksanaan
- ❖ Tempat pelaksanaan
- ❖ Nama kegiatan
- ❖ Output yang diharapkan
- ❖ Peserta yang akan diundang
- ❖ Perlengkapan yang dibutuhkan

### c. Metodologi AKP dan Penetapan Instrumen

Metode pendekatan studi menggunakan Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) untuk mendapatkan gambaran/pemetaan kemiskinan untuk menemukan indikator lokal kemiskinan. AKP memiliki peran dalam rangka memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dan menyuarakan kepentingannya serta kemungkinan solusi yang bisa dilakukan. Instrument yang digunakan untuk melakukan analisis kemiskinan partisipatif yaitu;



Gambar 2. Metodologi Analisis Kemiskinan Partisipatif



Gambar 3. Metodologi Analisis Kemiskinan Partisipatif

- (1) Indikator berdasarkan sketsa wilayah/klaster/desa ditentukan berdasarkan potensi dan kondisi geografis wilayah/desa;
  - ❖ Klaster Pesisir
  - ❖ Klaster Pegunungan
  - ❖ Klaster Pertanian
  - ❖ Klaster Pertambangan
- (2) Indikator berdasarkan aktivitas masyarakat  
Matriks kalender kegiatan masyarakat (harian, bulanan, musiman, dan tahunan)
- (3) Indikator berdasarkan manajemen keuangan masyarakat merupakan analisis pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Indikator berdasarkan analisis sumber kehidupan masyarakat
  - ❖ Petani
  - ❖ Buruh tani/bangunan/dll.
  - ❖ Nelayan
  - ❖ Dll.
- (5) Indikator berdasarkan analisis kelembagaan masyarakat
  - ❖ Kelembagaan petani
  - ❖ Kelembagaan keuangan/ekonomi
  - ❖ Kelembagaan pemerintah
  - ❖ Dll.

## **2) Tahap Survei Lapangan**

Tahap survei lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan beberapa data kemiskinan beserta indikatornya yang dipergunakan oleh BPS, BKKBN, dan Dinsos.

a) Assesment dan Analisis Data Sekunder

- ❖ Assessment merupakan kegiatan yang dilakukan tim untuk mengumpulkan beberapa data kemiskinan dari BPS, BKKBN, dan Dinsos. Data kemiskinan yang diperoleh kemudian dijadikan dasar oleh tim untuk melakukan analisis selanjutnya.
- ❖ Analisis hasil assessment dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, seperti diskusi. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar oleh tim untuk menentukan sketsa wilayah atau klaster berdasarkan masing-masing wilayah, seperti wilayah/klaster/desa pesisir, wilayah/klaster/desa pegunungan, wilayah/klaster/desa pertanian, dan wilayah/klaster/desa pertambangan.

b) FGD tingkat wilayah/klaster/desa

Focus group discussion atau FGD ditingkat wilayah/klaster/desa merupakan kegiatan diskusi yang melibatkan masyarakat dari beberapa unsur. FGD dilaksanakan di 4 wilayah/klaster/desa berdasarkan sketsa wilayah yang telah ditentukan yaitu wilayah/klaster pesisir, wilayah/klaster pegunungan, wilayah/klaster pertanian, dan wilayah klaster pertambangan. Secara teknis sebagai berikut:

(1) Penanggungjawab

Sebagai penanggungjawab kegiatan ini adalah Ketua LPPM Universitas Andi Djemma

(2) Kepanitiaan

Tim yang telah dibentuk/ditugaskan oleh LPPM Universitas Andi Djemma

(3) Fasilitator

Fasilitator adalah Tim AKP yang bertugas memfasilitasi seluruh proses FGD sampai dengan penyusunan laporan akhir FGD.

(4) Peserta

Peserta FGD yang diundang adalah beberapa elemen masyarakat dan Peserta harus merepresentasikan dari unsur:

- ❖ Tokoh masyarakat
- ❖ Tokoh agama
- ❖ Masyarakat penerima PKH atau bantuan sosial
- ❖ Pemerintah desa
- ❖ Pakar

**3) Tahap Penyusunan Fakta dan Analisa**

**4) Tahap Penyusunan Kajian Kemiskinan**

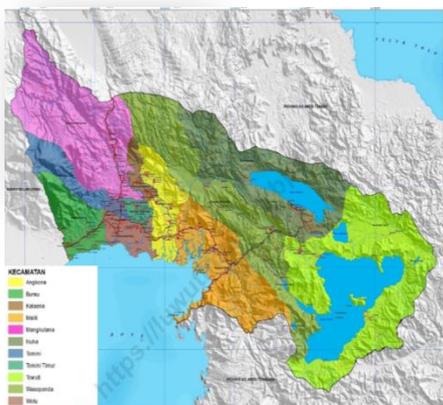
**1.7. Luaran**

Keluaran yang dihasilkan dalam pekerjaan Penyusunan Kajian Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur;

- ❖ Variabel indikator penduduk miskin berdasarkan wilayah/klaster/desa
- ❖ Kriteria penduduk miskin berdasarkan indikator lokal
- ❖ Metodologi pendataan penduduk miskin

## **BAB 2**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH**



#### **2.1. Keadaan Geografis**

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan katulistiwa. Tepatnya di antara 2o03'00" - 3o03'25" Lintang Selatan dan 119o28'56" - 121o47'27" Bujur Timur, dengan luas wilayah 6,944.88 km<sup>2</sup>. Sekitar 11,14 persen Propinsi Sulawesi Selatan merupakan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, secara administrasi dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana dan Kalaena serta 99 kelurahan/Desa. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km<sup>2</sup>), Danau Mahalona (25 km<sup>2</sup>), dan Danau Towuti (585 km<sup>2</sup>), Danau Tarapang Masapi (2.43 km<sup>2</sup>) dan Danau

Lontoa (1.71 km<sup>2</sup>). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.

## **2.2. Kependudukan**

Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk interim 2022-2023 (kondisi pertengahan tahun /Juni) sebanyak 300.511 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,99. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus Penduduk 2020, penduduk Luwu Timur tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebanyak 3.770 atau sebesar 1,27 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 mencapai 43,27 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sebesar 309,77 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Mangkutana sebesar 17,15 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur sebanyak 300.511 jiwa, berada di urutan ke 13 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Luwu Raya, Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat/urutan ketiga setelah Kabupaten Luwu dan Luwu Utara.

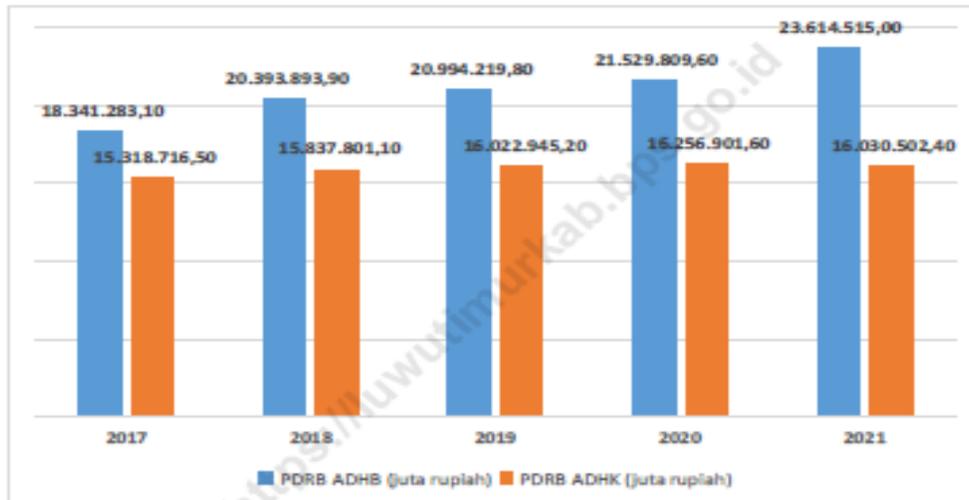
Tabel 2. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2021, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Penduduk per Km<sup>2</sup> dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, 2021

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (Jiwa) Population	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021 Annual Population Growth Rate (%) 2020–2021
(1)	(2)	(3)
Burau	34 306	0,27
Wotu	33 657	0,94
Tomoni	26 644	0,90
Tomoni Timur	13 602	0,64
Angkona	25 247	0,69
Malili	43 640	1,90
Towuti	43 586	3,56
Nuha	23 575	0,75
Wasuponda	21 840	1,06
Mangkutana	22 316	0,38
Kalaena	12 098	0,55
<b>Luwu Timur</b>	<b>300 511</b>	<b>1,27</b>

### 2.3. Produk Domestik Regional Bruto

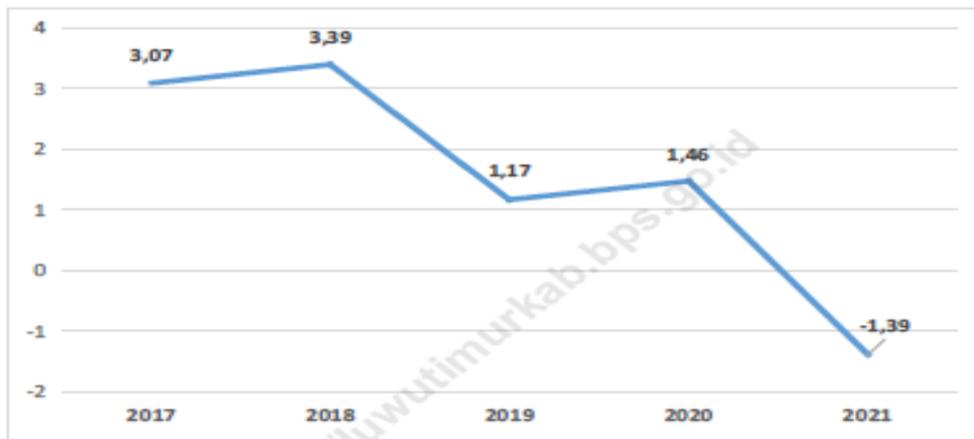
Berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021, angka PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 23,61 triliun rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 43,99 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 menurun. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 16,03 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi perlambatan ekonomi sebesar 1,39 persen.

Gambar 4. Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur (Juta Rupiah) 2017-2021



Sumber/Source: Diolah dari hasil sensus, survei dan berbagai sumber lainnya/Based on census, surveys and others sources

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021



Sumber/Source: Diolah dari hasil sensus, survei dan berbagai sumber lainnya/Based on census, surveys and others sources

Laju pertumbuhan PDRB 2021 atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,65 %, nilai ini tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur yang mengalami kontraksi sebesar -1,39%.

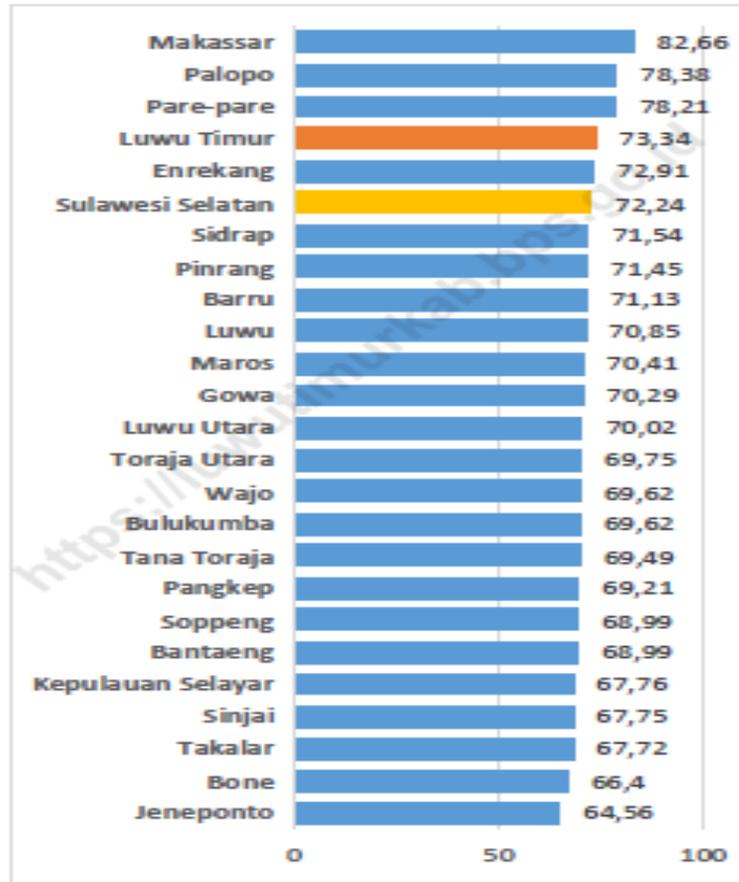
#### **2.4. Ketenagakerjaan**

Angkatan kerja di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 162.182 jiwa, 154.130 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir (95,04 persen). Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Luwu Timur pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 sebanyak 2.832 orang. Perbandingan pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki tercatat pada tahun 2020 sebanyak 1.679 laki-laki dan 1.153 perempuan pencari kerja yang terdaftar.

#### **2.5. Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil penghitungan IPM menggunakan metode baru, angka IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sebesar 73,34 menempati peringkat 4 tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, sama dari tahun sebelumnya. Pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2017 sudah berstatus tinggi. Selama periode 2017-2021 angka IPM Kabupaten Luwu Timur selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selain itu juga selalu berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021



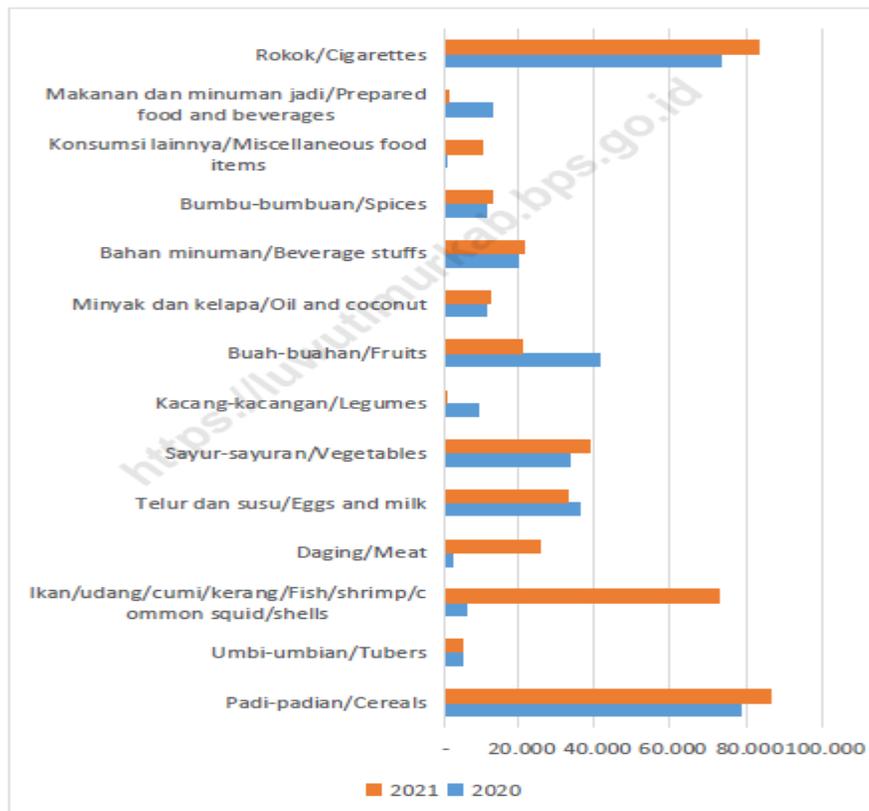
Sumber/Source : BPS - Survei Sosial Ekonomi Nasional / Statistics Indonesia - National Socio-Economic Survey

## 2.6. Pengeluaran Penduduk (Pengeluaran Perkapita)

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021, pengeluaran konsumsi dibagi dalam 2 kelompok besar yaitu pengeluaran kelompok makanan dan kelompok non makanan. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan tertinggi menurut kelompok makanan yaitu komoditas makanan dan minuman jadi sebesar 129.800 rupiah atau sebesar 10,24 % dari rata-rata total pengeluaran makanan. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan tertinggi

menurut kelompok bukan makanan yaitu komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 337.756 rupiah, atau sebesar 26,66 % dari rata-rata total pengeluaran bukan makanan.

Tabel 5. Rata-rata pengeluaran perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dan 2021



Sumber/Source: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat/BPS-Statistics Indonesia, People's Welfare Statistics

## **BAB 3**

### **PROFIL KEMISKINAN**

#### **3.1. Kondisi Kemiskinan (Exisisting)**

Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan di mana seorang individu atau sekelompok orang tidak dapat menggunakan hak fundamental mereka untuk mempertahankan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Di antara hak-hak dasar tersebut adalah pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam, dan lingkungan, rasa aman dari kekerasan atau ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam sosial politik. kehidupan.

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan juga saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan dan kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Dan aspek lainnya dari kemiskinan

ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif (Arsyad, 2010).

Menurut statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Luwu Timur bervariasi antara tahun 2010 hingga 2021, bahkan cenderung turun dari tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017, penduduk miskin di Lutim sebanyak 21,90 ribu jiwa atau 7,66 persen; tahun 2018 sebesar 21,15 ribu atau 7,23 persen; tahun 2019 sebanyak 20,83 ribu orang atau 6,98 persen; dan pada 2020 hanya 20,82 atau 6,85 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 20,99 atau sebesar 6,94% atau sebesar 20,99 ribu jiwa. Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota lainnya, Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat 7 persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Sulawesi Selatan.



### 3.2. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan merupakan hasil dari Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) melalui kegiatan Kajian Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur. Melalui analisis kemiskinan partisipatif (AKP) dihasilkan indikator lokal kemiskinan berdasarkan sketsa wilayah/klaster/desa.

Indikator kemiskinan merupakan hasil dari Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) melalui kegiatan Kajian Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur. Melalui analisis kemiskinan partisipatif (AKP) dihasilkan indikator lokal kemiskinan berdasarkan sketsa wilayah/klaster/desa. Adapun indikator kemiskinan lokal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Indikator lokal kemiskinan kabupaten Luwu Timur

No	Aspek	Indikator	Metode
1	Tempat Tinggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah kayu dengan atap rumbia/Rumah pondok dengan atap daun sagu</li> <li>- Rumah dengan lantai kayu atau tanah</li> <li>- Menumpang di rumah keluarga/orang lain</li> </ul>	1. Survei 2. In Depht Interview 3. FGD Alat yang digunakan dalam FGD ✓Kalender musim ✓Diagram ✓Kelembagaan ✓Analisis pohon
2	Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki pekerjaan tetap/Buruh tani/Buruh bangunan/Nelaya n dengan alat</li> </ul>	

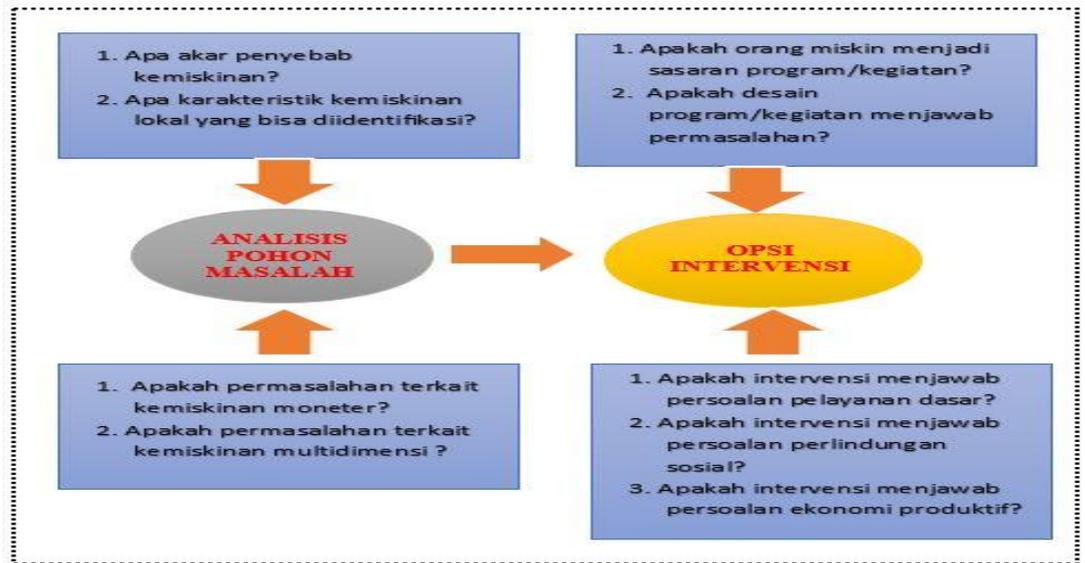
No	Aspek	Indikator	Metode
		tangkap sederhana (tradisional)	masalah
3	Kepemilikan Aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki lahan atau Memiliki lahan &lt; 0.5 hektar</li> <li>- Tidak memiliki kendaraan roda 2 atau Memiliki kendaraan roda 2 tapi di kredit</li> <li>- Tidak memiliki perhiasan emas atau memiliki tapi sederhana/imitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓Kalender harian</li> <li>✓Analisis pendapatan keluarga</li> </ul>
4	Ekonomi/Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan maksimal Rp.50.000/hari</li> <li>- Tidak memiliki tabungan</li> <li>- Kesulitan menyekolahkan anak dri hasil pendapatan</li> <li>- Pola makan tidak teratur</li> <li>- Tidak memiliki satu Smartphone dalam Satu Keluarga</li> </ul>	
5	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pendidikan anggota keluarga (anak) maksimal SMP</li> <li>-keterbatasan akses</li> </ul>	

No	Aspek	Indikator	Metode
		pada sarana pendidikan	

Sumber : Data Primer diolah 2022

### 3.3. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan di lingkungan bermacam-macam



sebab dan akibat untuk mencari penyebab masalah kemiskinan di Luwu Timur. Analisis pohon masalah ini digunakan untuk membantu dalam membentuk pola pikir yang lebih terstruktur dan berdasarkan fakta (data) untuk mencari penyebab dari suatu masalah kemiskinan yang sudah teridentifikasi dan menjadi prioritas.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan penyebab kemiskinan pada klaster desa sebagai berikut

#### a. Analisis aktifitas masyarakat.

Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari aktifitas masyarakat pada suatu wilayah. Berdasarkan data bahwa masyarakat pada

empat klaster yang berbeda memiliki aktifitas yang berbeda pula. Masyarakat nelayan di desa pada wilayah pesisir (Desa Harapan) yang berprofesi sebagai nelayan hanya 4 (empat) bulan melakukan operasi penangkapan ikan. Hal ini juga di perparah dengan terjadinya degradasi lingkungan, yang menyebabkan wilayah fishing ground (daerah penangkapa ikan), yang semakin jauh. Konsekuensinya adalah penambahan biaya operasional yang dibutuhkan oleh nelayan saat melakukan operasi penangkapan ikan. Data aktifitas nelayan di Desa Harapan dapat dilihat pada lampiran 1a.

Sedangkan pada klaster wilayah pertanian (Desa Pattengko), komoditi yang diusahakan adalah padi dengan dua kali panen dalam setahun yaitu pada bulan Februari-maret dan bulan Juli-Agustus. Ada jeda selama tiga bulan yang tidak mendapatkan penghasilan. Hal yang sama juga terjadi pada klaster pegunungan (Desa Batu Putih) yang mengusahakan tanaman diperkebunan yaitu tanaman kakao dan kelapa sawit yang belum berproduksi maksimal.

Masyarakat nelayan dan petani pada lokasi penelitian, menjadi kelompok yang rentan karena waktu melaut sebagai sumber nafkah yang sangat singkat (hanya 4 bulan) dalam setahun. Selebihnya mereka menganggur atau mencari pekerjaan alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka melakukan strategi diversifikasi maupun pola nafkah ganda untuk mengurangi kerentanan penghidupan atau meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu alternatif mata pencaharian adalah bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian. Aktifitas kegiatan pertanian dapat dilihat pada lampiran 1c.

Strategi diversifikasi penghidupan terjadi karena berbagai alasan, seperti alasan kebutuhan atau bagi orang tertentu mungkin diversifikasi penghidupan merupakan suatu pilihan. Alasan untuk melakukan diversifikasi sebagai sumber pendapatan bervariasi untuk keluarga yang berbeda serta waktu dan tempat yang berbeda.

Diversifikasi penghidupan dilakukan melalui diversifikasi pekerjaan seperti dari pekerjaan sebagai nelayan atau petani beralih atau mengusahakan pekerjaan disektor non pertanian.

Beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan adalah menjadi buruh bangunan, kerja serabutan, jual kue dan berdagang keliling,online dan lain-lain. Menurut Dercon (2002), bahwa pembahasan mengenai diversifikasi pendapatan sering dikaitkan dengan upaya penanggulangan resiko, kesempatan atau ketidakpastian pendapatan atas tenaga kerja dan lahan. Ditingkat rumah tangga, diversifikasi melalui penganekaragaman usaha dan pemanfaatan aset, selain dimaksudkan untuk mencari nilai tambah kapital juga untuk mengurangi instabilitas pendapatan rumah tangga.

#### **b. Analisis manajemen keuangan masyarakat**

Analisis manajemen keuangan masyarakat adalah suatu cara untuk mengetahui metode yang dilakukan masyarakat dalam mengelola penerimaannya. Modal finansial adalah sumber-sumber keuangan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat dalam mencapai tujuan penghidupan mereka, yaitu Cadangan atau persediaan;

meliputi sumber keuangan berupa tabungan, deposito, atau barang bergerak yang mudah diuangkan. Selain yang bersumber dari milik pribadi, juga termasuk sumber keuangan yang disediakan oleh bank atau lembaga perkreditan.

Aliran dana teratur, sumberdana ini meliputi uang pensiun, gaji, bantuan dari negara, kiriman dari kerabat yang merantau, dsb. (DFID, 2001). Modal ini mewakili unsur sumber-sumber keuangan yang ada di masyarakat (seperti penghasilan, tabungan atau simpanan, pinjaman modal usaha, sertifikat surat berharga, saham, kredit/hutang/hibah baik fomal maupun informal, kiriman dari keluarga yang bekerja di luar daerah, dana pensiun, keuntungan usaha, upah/gaji,dan sebagainya) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang derajat kehidupan masyarakat. Menurut Ellis (2000), bahwa modal finansial mengacu pada rumahtangga yang memiliki akses terhadap sumber modal keuangan, terutama tabungan dan akses terhadap kredit dalam bentuk pinjaman.

Baik tabungan maupun pinjaman uang secara langsung merupakan bentuk-bentuk modal produktif yang dapat dialihkan kedalam bentuk-bentuk modal lain atau mungkin langsung dikonsumsi. Kemudahan beralih antara menggunakan sebagai modal usaha atau langsung dikonsumsi merupakan karakteristik dasar modal dalam bentuk uang tunai. Dalam banyak masyarakat, tidak adanya pasar keuangan atau ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga keuangan mengakibatkan pengalihan modal finansial diselenggarakan dalam bentuk lain, seperti kepemilikan ternak

yang memainkan peran penting sebagai penyimpanan kekayaan.

Dari pengertian diatas, modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli atau sejumlah uang yang dihimpun atau ditabung untuk investasi dimasa depan oleh suatu rumahtangga. Modal finansial merupakan sumberdaya yang paling fleksibel, dapat ditukar dengan berbagai kemudahan sesuai sistem yang berlaku. Sumberdaya keuangan juga dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan penghidupan; misalnya membeli bahan makanan. Modal finansial dalam penelitian ini, mengacu pada sumber-sumber keuangan penduduk yang dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan. Indikator modal finansial meliputi: Tabungan atau simpanan; Kredit/hutang, hibah baik formal maupun informal; Pemberian dari LSM/ BAZIS/ LAZIS, BL; Kiriman dari keluarga yang bekerja di luar daerah; Keuntungan usaha; Upah/Gaji.

Pada daerah penelitian terlihat bahwa alokasi pendapatan masyarakat nelayan di desa Harapan habis hanya untuk konsumsi rumahtangga., tidak ada alokasi untuk tabungan (dissaving). Demikian pula terjadi pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan bekerja dari sektor perkebunan. Penerimaan yang diperoleh habis untuk konsumsi rumah tangga, biaya sekolah bahkan pada kategori masyarakat miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Masyarakat miskin pada wilayah penelitian umumnya tidak memiliki

modal finansial yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan/operasi penangkapan ikan dan pertaniannya.

**c. Analisis sumber penghidupan**

Analisis sumber penghidupan merupakan suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber nafkah atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan nafkah. Aset tersebut berupa aset/modal fisik, modal alam dan modal manusia.

Modal fisik adalah prasarana dasar dan fasilitas lain yang dibangun untuk mendukung proses penghidupan masyarakat. Prasarana yang dimaksud meliputi pengembangan lingkungan fisik yang membantu masyarakat dalam melaksanakan tugas kehidupan lebih produktif. Prasarana umumnya merupakan fasilitas umum yang digunakan tanpa dipungut biaya langsung.

Modal fisik memperlihatkan penguasaan lahan, luas lahan, jenis tanaman budidaya, dan kepemilikan bangunan seperti rumah, kendaraan, perabotan dan peralatan rumahtangga, pabrik serta teknologi produksi. Dalam konteks kewilayahan modal fisik ini berupa infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas publik. (Baiquni, 2007). Modal Infrastruktur termasuk; Jaringan transportasi, kendaraan, dsbnya, Gedung dan tempat tinggal, Sarana Kebersihan dan Air bersih, Energi, Jaringan Komunikasi. Teknologi dan Alat-alat; Alat alat dan peralatan untuk produksi, Bibit, pupuk, pestisida, Teknologi tradisional. Modal ini juga mewakili unsur bangunan (seperti : perumahan, pasar, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya) dan infrastruktur dasar (seperti: jalan, jembatan,

jaringan air minum, jaringan telepon, dan sebagainya) yang merupakan sarana yang membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Modal ini merupakan salah satu aset dalam memfasilitasi peningkatan penyediaan layanan untuk memungkinkan penduduk miskin memenuhi kebutuhan mereka. Modal fisik dalam penelitian ini merupakan sarana atau fasilitas yang dimiliki responden untuk dalam menjalani kehidupan.

Modal fisik pada daerah penelitian cukup memadai dimana tersedia dermaga untuk berlabuhnya perahu nelayan. Sedangkan untuk lokasi pertanian, ketersediaan jalan tani tersedia. Kecuali pada wilayah Desa Matanodimana akses ke lahan yang belum maksimal. Keterbatasan akses/jalan tani ke kebun petani menjadi permasalahan tersendiri yang mengakibatkan tidak maksimalnya pengolahan lahan mereka.

Modal alam bisa disebut dengan sumberdaya alam adalah merupakan persediaan alam yang menghasilkan daya dukung dan nilai manfaat bagi penghidupan manusia. Mencakup; tanah dan produksinya, air dan sumber daya air di dalamnya (ikan), pohon dan hasil hutan, binatang buruan, serat dan pangan yang tidak dibudidayakan, keanekaragaman hayati, sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Modal ini mewakili sumber daya alam dan sumber daya hayati yang melingkupi suatu masyarakat (DFID, 2001)

Modal alam (Natural Capital) lebih menggambarkan kepemilikan atau penguasaan bersama atas sumberdaya alam seperti iklim, kesuburan tanah, dan sumber air sebagai modal

produksi. Hal ini bervariasi pada setiap wilayah, baik ketersediaan maupun karakteristiknya, sehingga dapat membentuk pola kehidupan masyarakat. Dalam modal alam, sebuah perbedaan penting di buat antara sumberdaya alam terbarukan dan sumberdaya alam non terbarukan. (Baiquni, 2007). Dari pengertian diatas, modal alam ini disebut juga sebagai lingkungan yang merupakan gabungan dari berbagai faktor biotik dan abiotik di sekeliling manusia. Modal ini dapat berupa sumberdaya yang bisa diperbaharui maupun tidak bisa diperbaharui. Contoh dari modal sumberdaya alam adalah air, pepohonan, tanah, stok kayu dari kebun atau hutan, stok ikan di perairan, maupun sumber daya mineral seperti minyak, emas, batu bara dan lain sebagainya. Pada akhirnya sumberdaya alam bisa menghasilkan keuntungan jika penduduk mempunyai akses yang aman terhadap modal alam ini.

Modal alam dalam penelitian ini, merupakan persediaan alam yang mempunyai nilai dan manfaat bagi kehidupan seperti ketersediaan lahan pertanian/bibit, ketersediaan lahan untuk non pertanian, ketersediaan sumberdaya perikanan. Dengan modal alam memungkinkan penduduk dapat terfasilitasi untuk mendapatkan penghasilan, misalnya dengan menggunakan tanah atau lahan bukan saja untuk kegiatan produksi tetapi bisa untuk disewakan. Atau bagi nelayan sumberdaya danau bukan saja untuk kegiatan mencari ikan tetapi juga untuk membudidayakan ikan untuk mendapatkan penghasilan.

Pada daerah penelitian terjadi permasalahan dimana terjadi degradasi lingkungan akibat aktifitas pertambangan disekitar desa sehingga akses untuk mendapatkan sumber penghasilan semakin sulit. Kepemilikan lahan bagi petani yang gurem (0,5 ha) kebawah mengakibatkan usaha pertanian yang tidak menguntungkan dan hanya bersifat subsisten. Hal ini juga diperparah dengan tingginya biaya input untuk usaha tani padi. Ketersediaan input (pupuk dan pestisida) juga menurut petani tidak tepat waktu dan jumlahnya terbatas.

#### **d. Analisis Kelembagaan**

Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah dalam pembangunan yang membutuhkan peran kelembagaan untuk mengatasinya baik kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah. Bank Dunia mendefinisikan lembaga sebagai aturan, mekanisme penegakan dan organisasi (Azansyah, 2013). Kelembagaan diharapkan mampu memperkuat modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat miskin dengan menjadi wadah interaksi. Modal sosial tersebut merupakan bagian dari kehidupan sosial-jaringan, norma dan kepercayaan, yang akan mendorong partisipasi dan tindakan bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka peningkatan penghidupan mereka. Beberapa kelembagaan di desa yang dimaksud adalah kelembagaan ekonomi, sosial, agama, politik dan hukum.

Salah satu kelembagaan ekonomi di desa adalah Badan Usaha Miskin Desa (BUMDES). BUMDES diharapkan menjadi

tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa ternyata sebagai besar belum dapat berfungsi dengan maksimal. Sementara lembaga keuangan pada kasus kluster pegunungan (Desa Batuh Putih) belum terakses oleh masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa penyebab kemiskinan pada 4 (empat) klaster wilayah disebabkan oleh kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial serta kondisi kultural (budaya).

1. Kondisi Alamiah dan Ekonomi (keterbatasan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan lainnya sehingga produksi relatif kecil dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan) :
  - a. Faktor produksi yang terbatas-subsisten (petani gurem, luas lahan rata- rata 0,5 ha kebawah dan alat tangkapan yang tradisional).
  - b. Degradasi lingkungan dan keterbatasan prasarana dalam mengakses pengolahan lahan perkebunan
  - c. Keterbatasan SDM/petani rata-rata berusia diatas 50 tahun
2. Kondisi Struktural dan sosial (Tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan) :
  - a. Keterbatasan akses dan peran kelembagaan desa yang belum maksimal
  - b. Keterbatasan akses pada sumber penghidupan (lahan perkebunan)

- c. Keterbatasan akses pada modal finansial (dissaving) dan akses pada lembaga keuangan
3. Kondisi kultural (budaya) :
- a. Sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan
  - b. Alokasi pendapatan atau sumberdaya yang dimiliki untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan.

### **3.4. Karakteristik Kemiskinan**

Soemardjan (dalam Sumodingrat 1999:81), mendeskripsikan berbagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan, sebagai berikut: **Pertama, kemiskinan absolut** adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan; **Kedua, kemiskinan relatif** adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Chambers (1983 : 109) mengungkapkan karakteristik kemiskinan sebagai ketidakmampuan (disadvantages) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain: (a) poverty, (b) physical weakness, (c) isolation, (d) powerlessness.

Karakteristik kemiskinan pada 4 (empat) klaster wilayah penelitian diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 6. Karakteristik kemiskinan pada 4 (empat) klaster pada wilayah penelitian.

No.	Aspek-Aspek Terkait	Karakteristik
1	Kondisi Keluarga Miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, dengan hasil musiman.</li> <li>✓ Lahan sempit atau tidak punya lahan sehingga menjadi petani penggarap atau buruh tani</li> <li>✓ Pendidikan anak maksimal SMP</li> </ul>
2	Program pemerintah untuk mengatasi persoalan keluarga miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bantuan Langsung Tunai (BLT), program PKH</li> <li>✓ Beasiswa pendidikan untuk sarjana</li> </ul>
3.	Hambatan orang miskin untuk menjadi orang yang mampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penghasilan berkurang bahkan hilangnya mata pencaharian akibat degradasi lingkungan.</li> <li>✓ Akses ke sumber mata pencaharian (kebun) yang terbatas</li> <li>✓ Sumberdaya manusia yang terbatas dalam mengelola lahan pertanian/perkebunan.</li> </ul>
4.	Meminimalisir dan mengatasi angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masalah angka kemiskinan sulit untuk diminimalisir karena pendapatan masyarakat hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak dapat melakukan saving apalagi investasi</li> <li>✓ Adanya penambahan data masyarakat miskin karena menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan/beasiswa bagi anaknya.</li> </ul>

Sumber : Data primer diolah 2022

### **3.5. Permasalahan Kemiskinan**

Masalah kemiskinan pada wilayah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- a. Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan terhadap sumber penghidupan.
- b. Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi.
- c. Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar bahkan seluruh penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas.
- d. Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar.
- e. Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

### **3.6. Manajemen Pendataan**

Untuk menentukan kriteria penduduk miskin, disyaratkan beberapa hal mengenai cakupan dan definisi keluarga, pelaksana pendataan, kriteria penduduk miskin, dan alat analisis untuk menentukan penduduk miskin. Penanggung jawab pelaksanaan pendataan ini adalah pemerintah kabupaten/kota.

1. cakupan dan definisi keluarga dalam pendataan.

Cakupan dan Definisi Keluarga dalam Pendataan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa satuan yang digunakan adalah penduduk dan

keluarga, bukan rumah tangga. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

## 2. Pelaksana Pendataan

Pelaksana pendataan harus memiliki persepsi yang sama tentang cara, definisi, dan variabel yang digunakan dalam pendataan. Untuk itu diperlukan pelatihan atau pengarahan kepada pelaksana ataupun koordinator pendataan di masing-masing wilayah. Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, pelaksana pendataan seharusnya adalah warga setempat yang komunikatif serta dapat membaca dan menulis. Karena merupakan warga setempat, pendata diharapkan mengetahui dengan baik kondisi sosial-budaya dan kebiasaan masyarakat yang akan didata seperti bahasa yang digunakan sehari-hari, waktu yang tepat untuk pendataan, dan hal-hal yang memudahkan untuk melakukan pendataan ulang (updating). Pendata harus komunikatif karena ia diharapkan bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat dengan baik sehingga data yang diperoleh adalah data nyata, data yang sebenarnya.

## 3. Kriteria penduduk miskin.

Dari berbagai kriteria untuk menentukan kemiskinan atau penduduk miskin yang ditetapkan oleh berbagai lembaga, kriteria kemiskinan diKabupaten Luwu Timur dilihat

melalui 5 Aspek yakni tempat tinggal, pekerjaan, kepemilikan asset, ekonomi, pendapatan dan pendidikan.

4. Alat analisis.

Untuk memperoleh variabel dan pembobotan dalam pemeringkatan kesejahteraan, data yang diperoleh dari proses pendataan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif .

## **BAB 4**

### **PRIORITAS PROGRAM**

Strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin.

Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat.

Program-program pengentasan kemiskinan pada Kabupaten Luwu Timur harus berdasarkan ketepatan waktu, cara dan sasaran. Berdasarkan hasil analisis profil kemiskinan di Luwu Timur dari empat klaster dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Prioritas Program

No.	Klaster	Masalah	Solusi	Program	Instansi Terkait
1	Pesisir	Degradasi lingkungan dan alat tangkap ikan yang tradisional	Bantuan alat tangkap ikan	✓ Kompensasi langsung ✓ Bantuan alat tangkap	Dinas Perikanan  Dinas Lingkungan Hidup  Badan usaha
		Waktu istirahat melaut akibat cuaca dan iklim	Diversifikasi mata sumber mata pencaharian melalui pemberdayaan masyarakat	✓ Pelatihan pengolahan hasil perikanan dan Manajemen Kewirausahaan	DISDAGKOP dan UMKM  Pemerintahan Desa  Dinas Perikanan
2	Pertanian	Input produksi usaha tani yang tinggi	Penggunaan pupuk dan pestisida organik	✓ Pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik	Dinas Pertanian
		Produksi Pertanian Yang	Pengelolaan Tanaman yang	✓ Penyuluhan yang Intensif	Dinas Pertanian

		Rendah	lebih baik	✓ Pelatihan budidaya tanaman	Dinas Perikanan dan Kelautan
				✓ Diversifikasi Pertanian (Sistem Pertanian Terpadu)	
<b>3</b>	Pegunungan	Akses Kelembagaan Terbatas (Pendidikan, Ekonomi, dan Keuangan)	Maksimalisasi Peran Kelembagaan Di desa (Pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan)	✓ Pasar, ✓ Sekolah, ✓ Koperasi, ✓ Perbaikan jalan ✓ Beasiswa Pendidikan	Dinas PUPR  DISDAGKO dan UMKM  Bidang Kesra dan Dinas Pendidikan
		Akses Pengelolaan/pe manfaatan Lahan	Perlindungan Pengelolaan Lahan	✓ Redistribusi Lahan	Dinas Pertanahan
			Kepastian Penggunaan Lahan	✓ PTSL	BPN
		Masa Tunggu Panen Perkebunan	Diversifikasi Tanaman Jangka Pendek	✓ Bantuan Bibit ✓ Bantuan Langsung Tunai	Dinas Pertanian dan Perkebunan

		Yang Lama		dan PKH ✓ Penyuluhan	Dinas Sosial
			Pemberdayaan masyarakat melalui usaha produktif	✓ Pelatihan Pengolahan hasil Pertanian dan Manajemen Kewirausahaan	DISDAGKOP dan UMKM
<b>4</b>	Tambang	Keterbatasan prasarana dalam mengakses pengolahan lahan perkebunan	Pengembangan Sarana Jalan	✓ Pembuatan Jalan Tani	Dinas Pertanian  Dinas PUPR
		Usia Petani Rata-rata 50 Tahun Keatas	Pengembangan Kualitas kehidupan dan penghidupan SDM	✓ Pemberian bantuan (BLT dan PKH ✓ sosialisasi Petani Milenial	Dinas Pertanian  Dinas Sosial

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2022

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat 7 persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Terdapat empat belas indikator lokal kemiskinan dari lima aspek yang terdiri dari tempat tinggal, pekerjaan, kepemilikan asset, ekonomi, pendapatan dan pendidikan.
3. Kemiskinan pada empat klaster wilayah disebabkan oleh kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi budaya
4. Karakteristik kemiskinan terdiri dari kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.
  - kemiskinan absolut yakni kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
  - kemiskinan relatif yakni penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah.
5. Masalah kemiskinan meliputi kerentanan terhadap sumber penghidupan, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar bahkan seluruh penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas

dan kuantitas terbatas, tingginya rasio ketergantungan, serta adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

6. Manajemen pendataan kemiskinan dimulai dari penentuan penduduk miskin berdasarkan indikator lokal kemiskinan yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan verifikasi terhadap penduduk miskin mulai dari tingkat RT/RW, desa, dan kecamatan, selanjutnya dilakukan penetapan penduduk miskin.
7. Prioritas Program pengentasan kemiskinan diKabupaten Luwu Timur antara lain: Diversifikasi sumber kehidupan, pengembangan kualitas SDM, kepastian dalam pengelolaan lahan, dan bantuan secara langsung berupa alat-alat produksi.

## **5.2. Rekomendasi**

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan memerlukan sinergitas dan kolaborasi antara instansi serta Perangkat daerah terkait.
2. Dalam mengidentifikasi sasaran dan pengembangan program pengentasan kemiskinan selain mengacu pada indikator BPS, juga perlu dikembangkan indikator kemiskinan lokal yang ada sehingga program yang dilaksanakan relevan dan mendapat dukungan penuh dari sasaran serta memiliki nilai kemanfaatan secara berkelanjutan

3. Untuk mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan indikator lokal kemiskinan Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan pengukuran lebih lanjut dengan metode kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 16 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa, pasal 8 huruf g nomor 12 tentang Pendataan dan Analisis Kemiskinan Partisipatif.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Republik Indonesia tahun 2022
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur 2022
- Creswell, J.W., 2010, *Qualitative Inquiry and Research Design: Chosing Among Five Approach*. University of Nebraska, Lincoln: SAGE Publication Ltd
- Gunawan, I. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek*. Bumi Aksara. Jakarta, Edisi ke tiga
- Yin, R.K,2015. *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Rajawali Press, Jakarta. Edisi 14.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kriteria Kemiskinan

#### I. Kriteria Kemiskinan

##### 1) Desa Harapan Kecamatan Malili (Klaster Pesisir)

No.	Ciri-ciri	Kriteria		
		Kaya	Sedang	Miskin
1.	Tempat Tinggal (Rumah)	Rumah permanen (besar)	Rumah Semi Permanen (Beton/kayu)	Rumah kayu dengan atap rumbia
2.	Kendaraan	Memiliki Mobil	Memiliki Motor	Ada motor tapi cicilan
3.	Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Karyawanan , pegawai tetap, PNS, pengusaha/ kontraktor</li> <li>✓ Nelayan/ punya bagang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nelayan, petani (nelayan kecil)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Serabutan</li> <li>✓ Tidak bekerja secara tetap</li> </ul>
4.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ S2 dan S3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SD, SMP dan SMA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SD dan SMP</li> </ul>
5.	Gaya Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memiliki barang bermerek</li> <li>✓ Memiliki emas</li> <li>✓ Punya HP (iphone), TV, Laptop</li> <li>✓ Perawatan Rutin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Punya HP standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Punya HP Katto- katto</li> </ul>
6.	Pola Makan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Makan lebih 3 x sehari</li> <li>✓ Delivery order</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Makan 2x sehari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak menentu</li> </ul>

## 2) Desa Matano Kecamatan Nuha (Klaster Pertambangan)

No.	Ciri-ciri	Kriteria		
		Kaya	Sedang	Miskin
1.	Tempat tinggal (Rumah)	Rumah bagus/rumah batu	Rumah kayu	Rumah pondok dengan atap daun sagu dan lantai papan
2.	Kepemilikan Lahan dan Asset	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memiliki lahan kebun yang luas</li> <li>✓ Memiliki RAP</li> <li>✓ Memiliki speedboat (johnson)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memiliki kebun tapi tidak luas (0,5 Ha)</li> <li>✓ Memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memiliki kebun &lt;1 Ha</li> <li>✓ Perahu Dayung</li> </ul>
3.	Hasil Perkebunan	Memiliki banyak tanaman merica	Memiliki tanaman merica dan sayuran	Memiliki tanaman merica (hanya sedikit)
4.	Pekerjaan	Memiliki pekerjaan tetap (pegawai) dan memiliki kebun	Pegawai biasa	Bukan Pegawai
5.	Sumbangan	Banyak sumbangan/punya usaha	Sumbangannya dalam skala sedang	Sekitar 60 thn ke atas Terima Sumbangannya

### 3) Desa Batuputih Kecamatan Burau (Klaster Pegunungan)

No.	Ciri-ciri	Kriteria		
		Kaya	Sedang	Miskin
1.	Pendapatan	Rp.3.000.000 /bln atau Rp.100.000/hari	Rp.1.500.000 s/d Rp.2.000.000 /bln atau Rp.50.000/hari	Rp.500.000/bln
2.	Tempat tinggal	Punya rumah permanen	Rumah Kayu	Menumpang di rumah orang lain (belum punya rumah)
3.	Lahan	Punya lahan lebih dari 1 Ha	Punya lahan kurang dari 1 Ha	Tidak punya lahan
4.	Aset	Walet, kebun luas		
5.	Pekerjaan	Bertani/ Pengumpul hasil sawit	Bertani	Bertani (buruh tani), buruh bangunan dan pembuat gula
6.	Pendidikan keluarga	Anaknya bersekolah sampai jenjang PT	Pendidikannya umumnya SMA hanya sebagian kecil yang melanjutkan ke jenjang PT	Pendidikan tingkat SD
7.	Kendaraan	Memiliki mobil dan motor	Memiliki kendaraan sederhana	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak punya motor (jalan kaki untuk keluar kampung)</li> <li>✓ Motor digunakan hanya untuk ke</li> </ul>

				kebun
8.	Barang berharga	Sering menggunakan perhiasan yang banyak/berganti-ganti ke pesta	Punya perhiasan sederhana	Perhiasan yang digunakan sederhana bahkan tidak memiliki perhiasan

#### 4) Desa Pattengko Kecamatan Tomoni Timur (Klaster Pertanian)

No.	Ciri-ciri	Kriteria		
		Kaya	Sedang	Miskin
1.	Kepemilikan asset	✓ Memiliki lahan pertanian lebih 1 Ha	✓ Memiliki lahan pertanian lebih dari 0,5 Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak memiliki lahan garapan dan hanya menyewa lahan</li> <li>✓ Lahan kurang dari 0,5 Ha</li> </ul>
2.	Pekerjaan	Bertani dan berwiraswasta	Bertani	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hanya buruh tani atau bekerja serabutan</li> <li>✓ Bertani dari menyewa lahan</li> </ul>
3.	Tempat tinggal (rumah)	Memiliki rumah permanen	Memiliki rumah semi permanen	Memiliki rumah kayu dan dinding berbahan bambu

## Lampiran 2. Kalender Musim Kegiatan

### 1) Desa Harapan Kecamatan Malili (Klaster Pesisir)

Kegiatan	Bulan											
	1	2										
PETANI												
1. Panen Merica												
- Pemeliharaan Merica												
- Pemupukan												
2. Panen Kakao												
- Pemupukan												
3. Panen Kelapa Sawit												
- Pemupukan												
NELAYAN												
1. Kegiatan menangkap Ikan (melaut)												
2. Cuaca Buruk (tidak melaut)												
3. Cuaca Pancaroba												
4. Pekerjaan selain nelayan (Bertani dan buruh)												
5. Perbaikan Alat Tangkap												

Ket:  ± Rp. 3.500.000

 Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000

 Rp. 2.000.000

## 2) Desa Matano Kecamatan Nuha (Klaster Pertambangan)

Kegiatan	Musim											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Panen Lada	■	■							■	■	■	■
2. Tanam Padi	■	■										
3. Panen Padi (Padi Ladang, Padi merah)				■	■							
4. Musim Hujan	■	■	■	■	■	■	■	■				
5. Pesta Panen Lada (D. Landangi, K. Tandang)							■	■				
6. Panen Jagung (2x panen/thn)												
7. Porang (Dsn. Bonepute)												
8. Nilam (Dsn. Bonepute)												
9. Madu Hutan				■	■	■	■	■				

### 3) Desa Batu Putih Kecamatan Burau (Klaster Pegunungan)

Kegiatan	Musim											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Petani Sawit												
- Panen Raya												
2. Petani Kakao												
- Panen Raya												
3. Cengkeh												
- Panen Raya												

### Lampiran 3. Analisis Potensi, Masalah, dan Solusi

#### 1) Desa Harapan Kecamatan Malili (Klaster Pesisir)

No.	Pekerjaan	Potensi	Masalah	Solusi
1.	Nelayan	Laut, ikan, bakau, karamba pukat, tambak ikan, bagang bila, pelabuhan, dermaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alat tangkap pukat masih sederhana dan masih kurang</li> <li>✓ Adanya pencemaran laut oleh pertambangan (air keruh)</li> <li>✓ BBM Langka dan mahal</li> <li>✓ Hasil tangkapan kurang</li> <li>✓ Lokasi penangkapan ikan semakin jauh</li> <li>✓ Adanya nelayan dari luar daerah/kampung yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bantuan alat tangkap</li> <li>✓ Perusahaan membuat alat filter</li> <li>✓ Subsidi BBM bagi nelayan</li> <li>✓ Regulasi khusus nelayan</li> <li>✓ Perbaikan terumbu karang</li> <li>✓ Adanya Perdes tentang larangan penangkapan ikan</li> </ul>
2.	Petani	Perkebunan (sawit, merica cengkeh, sayuran, buah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Harga pupuk mahal dan langka</li> <li>✓ Adanya hama tanaman</li> <li>✓ Kurangnya modal</li> <li>✓ Penyuluh pertanian kurang aktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bantuan pupuk dan bibit</li> <li>✓ Bantuan obat-obat pertanian</li> <li>✓ Penyuluhan dan sosialisasi pertanian</li> <li>✓ Bantuan modal pertanian.</li> </ul>

## 2) Desa Matano Kecamatan Nuha (Klaster Pertambangan)

No.	Pekerjaan	Potensi	Masalah	Solusi
1.	Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Merica</li> <li>✓ Sayuran (Jengkol, sawi, Kacang panjang, kecipir )</li> <li>✓ Sawah</li> <li>✓ Buah-buahan (rambutan )</li> <li>✓ Cengkeh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pupuk (harga pupuk mahal</li> <li>✓ Merica mati karena serangan hama/penyakit</li> <li>✓ Harga merica tidak stabil</li> <li>✓ Hasil rendah (tidak berbuah) karena tidak dipupuk</li> <li>✓ Musim tidak menentu (sawah tadah hujan)</li> <li>✓ Sebagian besar hasil panen untuk kebutuhan keluarga</li> <li>✓ Cengkeh tidak berbuah</li> <li>✓ Hasil panen buah dan perkebunan rendah</li> <li>✓ Penyuluh pertanian jarang datang ke masyarakat Desa Matano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Subsidi harga pupuk (murah dan tersedia)</li> <li>✓ Penyuluh pertanian</li> </ul>
2.	Buruh Harian	Karyawan	Musiman/tidak menentu ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perlu pekerjaan lain</li> <li>✓ Butuh modal untuk bisnis RT (buka warung)</li> </ul>
3.	Pedagang	Sembako (kios)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Modal</li> <li>✓ Jaminan ke bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ KUR</li> <li>✓ Lebih bervariasi</li> </ul>
4.	Tukang Jahit	Permak pakaian	Kurang pelanggan	Perlu pelatihan (keterampilan)/ pekerjaan lain
5.	Usaha Madu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obat kesehatan</li> </ul>	Musiman (1 x setahun)	

### Desa Batu Putih Kecamatan Burau (Klaster Pegunungan)

No.	Pekerjaan	Potensi	Masalah	Solusi
1.	Petani Kelapa Sawit	Tanaman sawit	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pupuk subsidi langka</li> <li>✓ Harga Obat-obatan mahal</li> <li>✓ Pupuk non subsidi mahal</li> <li>✓ Akses jalan sulit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembnagan usahatani kelapa sawit</li> <li>✓ Mekanisme penyaluran pupuk</li> <li>✓ Perbaikan jalan tani</li> </ul>
2.	Petani Cengkeh	Tanaman Cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pupuk cengkeh susah didapatkan</li> <li>✓ Racun dan obat-obatan mahal</li> <li>✓ Akses jalan sulit/kurang baik</li> <li>✓ Belum masuk kelompok tani sehingga belum mendapatkan pupuk</li> <li>✓ HPT cengkeh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembnagan Usahatani Cengkeh</li> <li>✓ Perbaikan jalan tani</li> <li>✓ Akses untuk mendapatkan input</li> <li>✓ Penumbuhan kesadaran petani</li> <li>✓ Penyuluhan pertanian</li> </ul>
3.	Petani Kakao	Tanaman Kakao	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Harga panen tidak stabil</li> <li>✓ HPT Kakao</li> <li>✓ Tanaman sudah tua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengambnagan usahatani Kakao</li> <li>✓ Peremajaan &amp; pengendalian tanaman kakao</li> <li>✓ Penguatan posisi tawar petani</li> <li>✓ Penyuluhan pertanian</li> </ul>
4.	Pengrajin gula aren	Gula Aren	Cairan gula dimasuki air sehingga gula tidak jadi	Gula Aren
5.	Pengusaha	Sarang Walet	Harga rendah	Sarang Walet

### 3) Desa Pattengko Kecamatan Tomoni Timur (Klaster Pertanian)

No.	Pekerjaan	Potensi	Masalah	Solusi
1.	Petani Padi	Pengembangan usahatani padi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pupuk sulit diperoleh</li> <li>✓ Penguasaan dan pengusahaan lahan semakin sedikit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mekanisme penyaluran pupuk</li> <li>✓ Diversifikasi usaha</li> </ul>
		Budidaya ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sebagian besar untuk konsumsi</li> <li>✓ Belum intensif dibudidayakan untuk usaha/bisnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan usaha budidaya ikan</li> </ul>
2.	Buruh tani/buruh bangunan	Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beternak hanya untuk tabungan</li> <li>✓ Usaha belum intensif untuk komersil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan usaha peternakan</li> </ul>
		Tanaman padi dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Buruh tani musiman karena tidak setiap saat ada</li> <li>✓ Sulit memperoleh pekerjaan harian selain dari usahatani padi</li> <li>✓ Buruh bangunan sifatnya temporer karena tidak ada setiap saat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemberdayaan masyarakat</li> </ul>

#### Lampiran 4. Alokasi Pendapatan Perbulan

##### 1) Desa Harapan Kecamatan Malili (Klaster Pesisir)

No.	Pekerjaan	Alokasi
1.	Nelayan	1. Konsumsi
		2. Tidak ada tabungan ( <i>dissaving</i> )
2.	Petani	1. Konsumsi
		2. Tidak ada tabungan ( <i>dissaving</i> )
3.	Karyawan	1. Konsumsi
		2. Tabungan ( <i>dissaving</i> )

##### 2) Desa Matano Kecamatan Nuha (Klaster Pertambangan)

No.	Pekerjaan	Alokasi
1.	Petani	1. Biaya anak sekolah
		2. Keperluan dan kebutuhan sehari-hari
		3. Arisan kelompok dasawisma
		4. Tabungan
		5. Sosial

### 3) Desa Batu Putih Kecamatan Burau (Klaster Pegunungan)

No.	Pekerjaan	Alokasi
1.	Bertani kelapa sawit	1. Biaya anak sekolah
		2. Uang jajan
		3. Belanja bulanan
		4. Biaya untuk lahan/kebun
		5. Tidak ada tabungan
2.	Bertani cengkeh	1. Biaya sehari-hari
		2. Biaya untuk kebun/lahan
		3. Tidak ada tabungan
3.	Bertani kakao/coklat	
4.	Gula Aren	

### 4) Desa Pattengko Kecamatan Tomoni Timur (Klaster Pertanian)

No.	Pekerjaan	Alokasi
1.	Bertani padi	1. Biaya anak sekolah
		2. Kebutuhan sehari-hari
		3. Kebutuhan/keperluan sosial
		4. Biaya untuk usahatani
		5. Ada tabungan bagi usahatani lebih dari 0.5 Ha dan dibawah 0,5 Ha hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
2.	Buruh tani dan serabutan	1. Kebutuhan sehari-hari

## DOKUMENTASI KEGIATAN









# ROADMAP

## PENGEMBANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KABUPATEN LUWU TIMUR (2023 - 2025)



2022



CENTER OF TECHNOLOGY (COT)  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang Masalah.....	6
1.2 Maksud dan Tujuan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM.....	9
2.1 Kondisi Luwu Timur.....	9
2.2 Visi dan Misi .....	10
2.3 Gambaran Umum UMKM di Luwu Timur.....	11
BAB III METODOLOGI.....	17
3.1 Analisis SWOT.....	17
3.2 Analisis <i>Boston Consulting Group</i> (BCG).....	18
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	21
4.1 Analisis Instrumen dan Kebutuhan UMKM.....	21
4.2 Analisis Isu Strategis dalam Pengembangan UMKM.....	36
4.3 Analisis Produk Potensial di Luwu Timur .....	38
4.4 Tujuan dan Sasaran.....	40
BAB V ROADMAP PENGEMBANGAN UMKM .....	44
5.1 Konsep Roadmap Pengembangan UMKM Luwu Timur.....	44
5.2 Program Pengembangan UMKM.....	48
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Rekomendasi .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Matriks Analisis SWOT .....	18
Tabel 4. 1 Strategi IFAS dan EFAS UMKM di Luwu Timur.....	35
Tabel 4. 2 Tujuan Pengembangan UMKM Luwu Timur.....	40
Tabel 4. 3 Sasaran Pengembangan UMKM Luwu Timur.....	42
Tabel 4. 4 Roadmap Pengembangan UMKM Luwu Timur.....	45
Tabel 5. 1 Rencana Aksi Fase Edukasi .....	48
Tabel 5. 2 Rencana Aksi Fase Kompetensi.....	51
Tabel 5. 3 Rencana Aksi Fase Edukasi .....	52
Tabel 5. 4 Rincian Kegiatan Berdasarkan Aspek Bisnis.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kontribusi Bidang Usaha dalam PDRB .....	11
Gambar 2. 2 Persentase UMKM di Luwu Timur Per Kecamatan .....	14
Gambar 3. 1 BCG Matrix.....	19
Gambar 3. 2 Kerangka Pikir Kajian.....	20
Gambar 4. 1 Matriks <i>Quick Wins</i> .....	36
Gambar 4. 2 <i>Quick Wins</i> Pengembangan UMKM Luwu Timur.....	37
Gambar 4. 3 Matriks Boston Consulting Group .....	38
Gambar 5. 1 Fase Roadmap Pengembangan UMKM Luwu Timur.....	44
Gambar 5. 2 Konsep Roadmap Pengembangan UMKM Luwu Timur.....	47

## RINGKASAN EKSEKUTIF

UMKM sebagai salah satu aspek penunjang pertumbuhan perekonomian suatu daerah salah satunya di Kabupaten Luwu Timur yang memiliki kondisi Produk Domestik Regional Bruto masih didominasi oleh sektor pertambangan. Sumber daya alam Luwu Timur tidak hanya tambang namun ada juga dari sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata. Namun melihat kondisi pertumbuhan UMKM dan perkembangannya masih rendah untuk di Luwu Timur hal ini yang perlu diberikan pengelolaan berupa pemetaan UMKM kemudian akan dilakukan pengembangan melalui riset yang akan menghasilkan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing UMKM. Terdapat tiga fase pemetaan UMKM di Kabupaten Luwu Timur yaitu fase edukasi, fase kompetensi dan fase sertifikasi. Seluruh fase tersebut disusun berdasarkan rencana aksi di tiap tahunnya yang meliputi rencana pembangunan *mindset* kemudian penetapan standar dan pengembangan berbasis digitalisasi serta ekspansi pasar untuk produk UMKM yang berpotensi.

Pemetaan yang dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari kuisioner dan asrip-arsip yang memuat data terkait UMKM kemudian kami melakukan analisis SWOT yang memudahkan dalam pengambilan strategi sehingga dapat dilihat strategi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari para UMK yang ada di 11 kecamatan. Berdasarkan analisis tersebut akan dijadikan saran dan masukan bagi pemerintah dalam mempertimbangkan keluaran kebijakan pada empat tahun kedepan agar UMKM yang ada tidak hanya sebagai pekerjaan alternatif namun bisa menjadi aspek utama pendorong majunya perekonomian di Luwu Timur.

Berdasarkan kajian pengembangan UMKM diperoleh beberapa rekomendasi yaitu Membentuk badan pengelola UMKM yang *menjadi leading sektor* dengan fungsi koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD terkait, perumusan kebijakan pemerintah yang mengatur dan menetapkan pengembangan UMKM di Luwu Timur sebagai landasan dalam melakukan perencanaan dan pengembangan perekonomian Luwu Timur, perumusan *Grand Design* pengembangan UMKM yang terintegrasi pada program-program prioritas yang terkoneksi dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Luwu Timur, menentukan produk yang akan menjadi prioritas untuk pendampingan yang diharapkan naik kelas atau ekspor, melakukan proses pendampingan terhadap UMKM secara terstruktur, tertelusur, dan berkelanjutan, menyiapkan infrastruktur pendukung untuk mendorong proses digitalisasi UMKM, dan menargetkan produk UMKM yang naik kelas pada tahun ke-tiga hingga menembus pasar ekspor.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan perekonomian di Luwu Timur didominasi oleh peran dari sektor pertambangan. Berdasarkan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tercatat bahwa sektor pertambangan berada pada urutan pertama dengan persentase sebesar 47,95% dari seluruh sektor perekonomian di Luwu Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur sangat bergantung pada sektor pertambangan. Di Luwu Timur masih banyak sektor usaha selain pertambangan seperti pertanian/perkebunan, perikanan, pariwisata, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi bahwa Luwu Timur memiliki potensi sumber daya unggulan seperti penghasil merica, kelapa sawit, dan kakao. Dengan memanfaatkan sumber daya alam serta peluang dari banyaknya sektor usaha di Luwu Timur, masyarakat mampu mengurangi ketergantungan perekonomian daerah dari sektor pertambangan dan menjadikan UMKM sebagai salah satu kelompok usaha yang dapat meningkatkan perekonomian Luwu Timur.

Menjalankan suatu UMKM bukan sekedar tentang menjual dan membeli. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan agar kinerja UMKM berjalan baik dan tidak berumur pendek. Beberapa aspek tersebut diantaranya (1) aspek keuangan, misalnya para pelaku UMKM yang masih melakukan pencatatan dengan metode konvensional, (2) aspek pemasaran, misalnya pelaku UMKM yang memasarkan produknya sebatas antar kecamatan saja, (3) aspek SDM, misalnya terkait latar pendidikan, jenjang karir, serta kurangnya pelatihan/edukasi sehingga dapat menghambat kinerja UMKM, (4) aspek operasional, misalnya terkait sulitnya mengurus legalitas usaha, SOP yang kurang jelas, dan pembagian jobdesk yang tidak sesuai kemampuan, dan terakhir (5) aspek teknologi informasi, misalnya belum adanya digitalisasi yang dapat memudahkan pekerjaan dan membantu SDM sehingga kinerja dapat maksimal.

Partisipasi dari masyarakat khususnya pelaku UMKM sendiri sangat dibutuhkan dalam upaya untuk mengembangkan UMKM di Luwu Timur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dengan melakukan Kajian Penyusunan Roadmap Pengembangan UMKM Kabupaten Luwu Timur. Kajian ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan UMKM di Luwu Timur, mencari solusi dan menyusun strategi pengembangan UMKM melalui program-program baru ataupun melalui sinergi program-program pemerintah yang sudah ada sebelumnya agar dapat memaksimalkan pengembangan UMKM di Luwu Timur.

Merealisasikan program-program pengembangan UMKM di Luwu Timur, perlu dilakukan pendataan terhadap seluruh UMKM di Luwu Timur. Metode yang digunakan adalah pengadaaan kuesioner untuk mendapatkan kondisi dan profil dari seluruh UMKM yang ada di Luwu Timur. Setelah penyebaran kuesioner, proses wawancara juga akan dilakukan lebih mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan yang lebih spesifik pada unit usaha tertentu. Wawancara juga akan dilakukan pada setiap pemangku kepentingan diantaranya Pemerintah setempat, PT Vale, dan BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama). Wawancara ini perlu dilakukan untuk mengkordinasikan harapan yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan. Selain pengambilan data dari objek kajian, studi pada laporan RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 juga dilakukan sebagai acuan dalam menyusun program baru maupun program sinergi.

Untuk menjalankan program pengembangan UMKM di Luwu Timur, penyusunan program atau kebijakan merujuk pada indikator-indikator yang telah diungkapkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (KEMENKONUKM). Indikator ini disusun sebagai acuan dalam upaya membuat koperasi dan UKM naik kelas. Indikator tersebut diantaranya adalah (1) meningkatkan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM, (2) Meningkatkan PDB koperasi, (3) Meningkatkan ekspor UMKM, (4)

Meningkatkan pertumbuhan Start-up koperasi, (5) Koperasi Modern, dan (6) UKM naik kelas. Dalam penyusunan atau Kajian Roadmap Pengembangan UMKM Luwu Timur ini, indikator terkait meningkatkan kontribusi PDB UMKM, ekspor UMKM, pertumbuhan start-up atau pemanfaatan teknologi informasi serta UKM naik kelas menjadi acuan dalam penyusunan program atau kegiatan dalam upaya pengembangan UMKM menjadi sektor perekonomian yang memberikan kontribusi besar kepada Luwu Timur.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Penyusunan Roadmap Pengembangan UMKM, dimaksudkan :

- a. Melakukan pengelolaan kepada UMKM melalui pemetaan UMKM untuk pengembangan berbasis ekspansi pasar menuju UMKM naik kelas;
- b. Tersedianya rumusan rencana aksi sebagai program peningkatan kualitas UMKM yang akan dilaksanakan oleh dinas terkait;
- c. Sebagai pedoman dalam penetapan kebijakan bagi setiap UMKM yang telah dipetakan berdasarkan tingkat potensional.

### **1.2.2 Tujuan**

Membuat Langkah kerja untuk Pengembangan UMKM sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan peranan UMKM agar lebih terintegrasi, sinergis, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Luwu Timur melalui peningkatan kontribusi UMKM dalam PDRB Luwu Timur dengan target meningkatkan *revenue* UMKM yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Kondisi Luwu Timur**

##### 2.1.1 Kondisi Geografi

Berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD (2021) diketahui bahwa Kabupaten Luwu Timur yang terletak di 2°03' 00" - 3°03' 25" lintang selatan dan 119°28' 56" - 121°47' 27" bujur timur dengan luas wilayah 6944,88 km. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Poso dan Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Timur, Kabupaten Kendari dan Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone di sebelah selatan, dan Kabupaten Luwu Utara di sebelah barat. Secara geografis, letak Kabupaten Luwu Timur cukup strategis karena berbatasan dengan beberapa provinsi, kabupaten, dan wilayah pesisir Teluk Bone yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Luwu Timur untuk mengembangkan kerjasama wilayah secara fungsional dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan menerapkan konsep ini, Kabupaten Luwu Timur akan dapat memperoleh kemanfaatan yang lebih besar akibat posisi geografis yang strategi. Kabupaten Luwu Timur juga didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha) hal ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian. Jika dilihat posisi wilayah ini dari muka laut, maka Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu : 0 m-25 m, 25-100 m, 100-500 m, 500-1000 m dan > 1000 m.

Dari Luwu timur terdiri dari 11 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Mangkutana, Dan Kecamatan Kalaena. Terdapat 33 pulau yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu 2 pulau di Kecamatan Angkona, 10 pulau di Kecamatan Malili, 8 pulau di Kecamatan Towuti, 12 pulau di Kecamatan Nuha, dan 1 pulau di Kecamatan Wasuponda.

### 2.1.2 Kondisi Penduduk

Berdasarkan data BPS (2021) Penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2020 tercatat sebanyak 296.741 jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Terjadi pertumbuhan penduduk sebanyak 52.932 atau sebesar 1,95 % jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di tahun 2010. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu timur tahun 2020 mencapai 43 jiwa/km<sup>2</sup> atau naik dibanding 2010 sebesar jika/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sebesar 308 jiwa/ km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Mangkutana dan Wasuponda sebesar 17 jiwa/ km<sup>2</sup>. Berdasarkan data angkatan kerja tercatat sebanyak 157.509 jiwa, 150.480 jiwa diantaranya bekerja pada sepekan terakhir. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Luwu Timur pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 sebanyak 2.832 orang. Perbandingan pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, tercatat pada tahun 2020 sebanyak 1.679 laki-laki dan 1.153 perempuan pencari kerja yang terdaftar.

## 2.2 Visi dan Misi

Visi dan misi yang ingin dicapai oleh Luwu Timur berdasarkan handbook Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah

**“Kabupaten Luwu Timur yang Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

dengan misi:

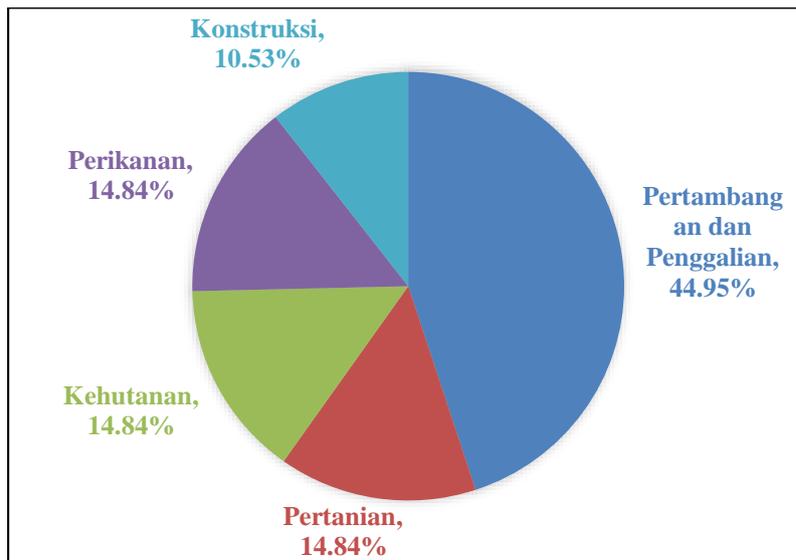
- a. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas
- b. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
- c. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

- e. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya
- f. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

### 2.3 Gambaran Umum UMKM di Luwu Timur

#### 2.3.1 Bidang Usaha

Beberapa sektor industri yang ada di Luwu Timur telah ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian Luwu Timur. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2020, angka PDRB mencapai 21,53 triliun rupiah. Industri yang berperan besar dalam angka ini dihasilkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu mencapai 44.95%, kemudian disusul oleh sektor non tambang diantaranya pertanian, kehutanan, dan perikanan masing-masing berkontribusi sebesar 14.84%, serta sektor konstruksi sebesar 10.54%.



**Gambar 2. 1 Kontribusi Bidang Usaha dalam PDRB**

Bidang usaha pada sektor pertambangan dibangun untuk mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat. Sektor pertambangan Luwu Timur telah lama menjadi sektor usaha yang paling besar memberikan kontribusi dalam perekonomian di Luwu Timur (Sulfahmi, et al., 2020). Masyarakat banyak

bergantung pada sektor tersebut melalui pengelolaan yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. PT Vale Indonesia meraih laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk US\$ 168,38 juta hingga 30 September 2022. Angkanya naik hampir 37% dari periode yang sama tahun lalu US\$ 122,93 juta.

Sektor non tambang yang ada di Luwu Timur terdiri atas beberapa sektor diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di Indonesia sendiri, sektor pertanian merupakan sektor andalan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, sehingga sektor ini memiliki peluang besar dalam mempengaruhi perekonomian di Indonesia (Widyawati, 2017). Pada sektor pertanian di Luwu Timur terdapat beberapa sumber daya alam seperti lada, kelapa sawit, serta kakao. Ketiga jenis pertanian ini memiliki nilai produksi yang tinggi. Untuk lada sendiri produknya sudah dapat dikatakan produk unggulan karena pasar untuk lada telah masuk di pasar nasional dan berpotensi masuk ke pasar internasional. Sektor ini memberikan kontribusi pada perekonomian sebesar 14.84%.

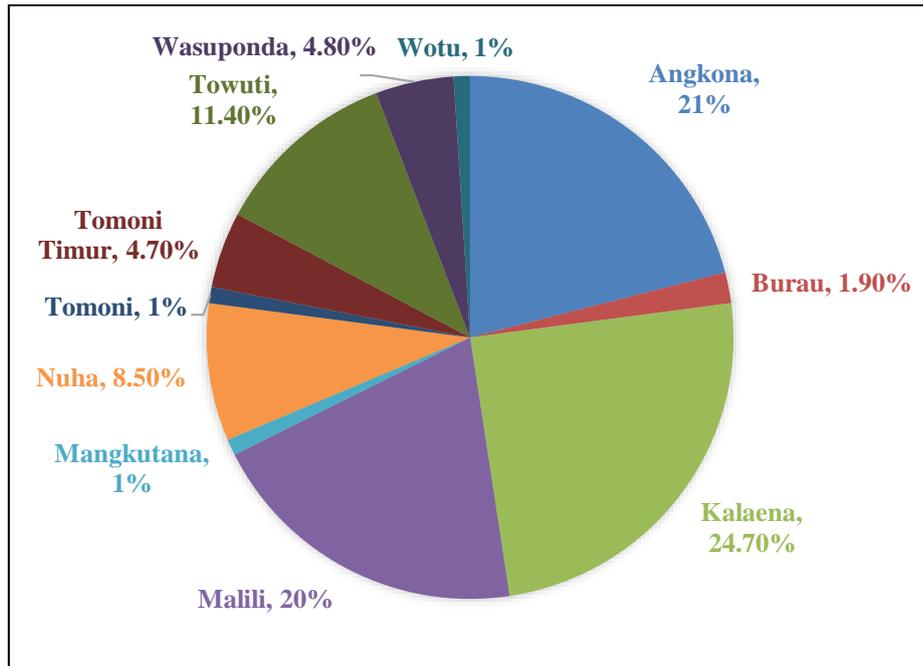
Luwu Timur memiliki potensi di perikanan laut dan budidaya. Perikanan laut didukung dengan luas perairan yang ada di Luwu Timur dan perikanan budidaya dengan banyaknya jenis budidaya yang bisa dilakukan (Arrazy & Primadini, 2021). Pada sektor perikanan, olahan dari hasil tangkap ikan mendukung perekonomian di Luwu Timur. Salah satu contohnya adalah memanfaatkan ikan tangkap untuk memproduksi abon ikan. Sektor ini memberikan kontribusi pada perekonomian sebesar 14.84%.

Sektor lain yang berkontribusi pada PDRB adalah sektor kehutanan. Pemanfaatan hutan memberikan kontribusi dalam perekonomian dengan memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan sebagai bagian dalam pengelolaan sumber daya alam. Sektor kehutanan memiliki potensi sumber daya berupa kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, kertas, dan lain-lain. Sektor ini memberikan kontribusi pada perekonomian sebesar 14.84%.

Terakhir adalah sektor konstruksi. Menurut Moavenzaderh (1978) Sektor konstruksi merupakan sektor ekonomi yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan operasional berupa transformasi dari berbagai input material menjadi suatu bentuk konstruksi. Di Luwu Timur sektor ini memberikan kontribusi pada perekonomian sebesar 10.58%.

### 2.3.2 Sumber Daya Alam

Keberadaan UMKM yang ada di Kabupaten Luwu Timur tersebar di seluruh kecamatan dimana Kabupaten ini terdiri dari 11 Kecamatan, diantaranya Angkona, Burau, Kalaena, Malili, Mangkutana, Nuha, Tomoni, Tomoni Timur, Towuti, Wasuponda, dan Wotu. Kecamatan terkecil di Luwu Timur adalah Kalaena dan yang terbesar adalah Towuti. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pelaku UMKM di Luwu Timur didominasi berasal dari kecamatan Kalaena 24.8%, Angkona 21%, dan Malili 21%. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan UMKM yang berada di kecamatan lainnya bahkan lebih banyak dari Towuti yang merupakan kecamatan terbesar seluas 26.21% dari luas kabupaten. UMKM yang ada di Luwu Timur didominasi oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran dengan persentase 21.4% dari 106 unit usaha dimana kedua sektor industri ini dominan bergerak pada bidang kuliner dengan persentase 38.8% dari seluruh bidang usaha yang ada. Banyaknya UMKM yang terdiri dari berbagai sektor industri serta bidang usaha menunjukkan bahwa masyarakat telah menjadikan UMKM sebagai sektor ekonomi yang strategis.



**Gambar 2. 2 Persentase UMKM di Luwu Timur Per Kecamatan**

UMKM di Luwu Timur bergerak diberbagai sektor dengan memanfaatkan sumber daya alam pada sektor tersebut seperti pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kelompok UMKM di Luwu Timur yang memanfaatkan kekayaan alam di Luwu Timur ini memiliki peluang besar dalam meningkatkan perekonomian di Luwu Timur. Selain dapat mendapatkan keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam, UMKM juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang besar dan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi jumlah penduduk miskin di Luwu Timur yang mencapai 20.82% dari total 305.407 penduduk (BPS Kabupaten Luwu Timur, 2021). Di tahun 2020 Luwu Timur memiliki 9.311 sarana perdagangan yang terdiri dari 4.506 kios, 3.093 toko, 1.673 warung dan 39 pasar dan tentunya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Luwu Timur juga memiliki sarana perdagangan ke luar negri/ekspor melalui pelabuhan muat. Pelaku UMKM dituntut untuk dapat berinovasi dalam menjalankan UMKM sesuai kebutuhan pasar baik dalam tingkat wilayah, nasional, maupun internasional dengan melihat potensi dari sumber daya yang tersedia di Luwu Timur.

Luwu Timur memiliki banyak sumber daya alam yang dapat menjadi potensi unggulan dari Luwu Timur. Beberapa sumber daya alam tersebut berasal dari sektor perkebunan. Berdasarkan dokumen Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur 2021, mayoritas komoditas perkebunan masyarakat Luwu Timur terdiri dari kakao dengan luas panen 13.347,83 ha dan produksi 4.907,40 ton, kelapa sawit dengan luas panen 8.090,25 ha dan produksi 66.250,82, kelapa dengan luas panen 1.223,62 ha dan produksi 1.261,88 ton dan Lada dengan luas panen 5.710,38 ha dan produksi 2.908,37 ton. Pelaku UMKM atau para petani pada sektor ini telah memiliki produk yang telah masuk pasar nasional, yaitu lada. Produk lada asal Luwu Timur telah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Selain lada, petani kakao juga memiliki potensi untuk memperluas pasarnya melihat besarnya luas panen dan produksi dari produk kakao.

Pada sektor peternakan, Luwu Timur memiliki populasi ternak yang terdiri dari sapi potong 20.464 ekor, kerbau 645 ekor, kambing 12.554 ekor, babi 24.449 ekor. Kemudian jumlah populasi unggas terdiri atas ayam kampung 240.104 ekor, ayam petelur 130.101 ekor, ayam pedaging 951.644 ekor, dan itik 34.001 ekor. Sektor ini menghasilkan sumber daya berupa produksi daging ternak, daging unggas, telur unggas, dan susu sapi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah menyusun beberapa program prioritas dalam memaksimalkan hasil sektor pertanian dan perikanan diantaranya (1) mengoptimalkan peran BUMD dalam penyerapan hasil bumi; (2) peningkatan produksi melalui penambahan indeks pertanaman; (3) mandiri benih padi; (4) pengembangan sentra tanaman pangan dan hortikultura; (5) menjamin ketersediaan pupuk; (6) Industrialisasi hasil pertanian; (7) memfasilitasi pemenuhan asuransi tani; (8) memfasilitasi sarana dan peningkatan kapasitas SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.

Pada sektor perikanan, Luwu Timur memiliki produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap memiliki total produksi sebanyak 10.012,712 ton dengan nilai Rp113.833.567 yang berasal dari perairan danau.

Perikanan budidaya berasal dari budidaya laut, tambak brackish, kolam, dan sawah dengan total produksi sebanyak 315.342,7 ton dengan nilai Rp736.894.774. Luwu Timur memiliki Potensi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang tinggi. Dalam upaya memaksimalkan hasil perikanan dan memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi maka diperlukan pengolahan hasil perikanan untuk memperoleh produk berkualitas sehingga memberikan kemudahan dalam pemasaran hasil produk perikanan. Dalam mendukung hal ini, pemerintah telah menyusun program prioritas untuk sektor perikanan dan kelautan diantaranya (1) pemberian benih unggul serta sarana dan penunjang; (2) pemberian sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan; dan (3) pemberian bantuan peralatan pengolahan perikanan.

Pada sektor kehutanan, jumlah luas kawasan hutan dan perairan di Luwu Timur adalah 549.638,25 ha. Kawasan tersebut terdiri dari hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi dapat dikonversi. Selain kawasan hutan dan perairan, di Luwu Timur ada juga kawasan lindung yang terdiri dari hutan lindung dan hutan konservasi dengan masing-masing luas kawasan sebesar 371.373,94 ha dan 178.264,27 ha. Luas Kawasan hutan di Luwu Timur sangat luas khususnya hutan produksi yang dapat menghasilkan berbagai produk salah satunya adalah kayu.

Kemudian sektor industri lain yang juga ada di Luwu Timur adalah sektor pariwisata. Luwu Timur memiliki banyak objek wisata yang tersebar di berbagai kecamatan seperti objek wisata danau, sungai, permandian, mata air, pantai, air terjun, hutan, hingga pulau. Selain objek wisata alam, ada juga beberapa objek wisata sejarah seperti Makam Mokole Lakamandiu di Nuha dan Makam Puang Sanro di Wotu. Peran sektor pariwisata pada perekonomian di Luwu Timur belum besar, salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi sektor ini adalah melalui pengadaan program prioritas diantaranya (1) pengembangan destinasi wisata; (2) matano geo park dan (3) penyelenggaraan event wisata berskala nasional.

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **3.1 Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada kajian ini yaitu menggunakan kuesioner untuk memperoleh data UMKM Luwu Timur yang terdiri dari indikator pertama yaitu profil perusahaan seperti nama usaha, jenis usaha, sektor usaha, tahun berdirinya usaha dan lain sebagainya; indikator kedua yaitu aspek pemasaran seperti cara memasarkan produk, jangkauan pemasaran, peran usaha; indikator ketiga yaitu aspek keuangan seperti modal usaha, penjualan tahunan, metodologi pengelolaan keuangan, laporan keuangan dan lain sebagainya; indikator keempat yaitu aspek operasional seperti badan hukum usaha, izin/legalitas usaha, struktur organisasi dan SOP; indikator kelima yaitu aspek SDM seperti informasi terkait jumlah tenaga kerja, latar belakang pendidikan pemilik usaha, fasilitas pelatihan/sertifikasi dan lain sebagainya; indikator keenam yaitu aspek teknologi informs dan dukungan pemerintah seperti pemanfaatan teknologi informasi pada usaha, program-program pemerintah yang mendukung usaha. Seluruh pertanyaan kuisooner dilampirkan secara legkap pada halaman Lampiran Laporan.

Tahapan selanjutnya adalah proses wawancara untuk memperoleh informasi tambahan dari pihak UMKM. Metode wawancara dilakukan melalui saluran telepon untuk menanyakan data UMKM bagi seluruh pelaku UMKM yang belum mengisi kuisoner. Selanjutnya dilakukan *studi literature* untuk melengkapi data-data seperti kondisi UMKM di Luwu Timur, hal-hal potensional yang dimiliki Luwu Timur dan lain sebagainya, hal ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah setempat seperti RJPMD

#### **3.2 Pengolahan Data**

##### **3.2.1 Analisis SWOT**

Seiring perkembangan pesatnya kemajuan saat ini tentunya mempengaruhi ketepatan pemilihan strategi yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Salah satunya pada strategi pemasaran yang tidak hanya berfokus pada target pasar namun juga harus memperhatikan pihak pesaing yang mengincar target pasar yang telah kita

miliki. Sebaiknya sebuah perusahaan sebelum menetapkan dan menjalankan strateginya, dilakukan analisis SWOT terlebih dahulu yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki. Menurut Fredy dalam (Andriani, et al., 2021). Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportuniy, and Threats*) adalah metode berbagai faktor dalam merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*), peluang (*Opportuniy*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*), dan ancaman (*Threats*). Analisis SWOT telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia bisnis. Metode ini merupakan sebuah analisa yang cukup baik, efektif dan efisien serta sebagai alat yang cepat dan tepat dalam menemukan dan mengenali kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan inovasi baru dalam dunia bisnis.

**Tabel 3. 1 Matriks Analisis SWOT**

<b>IFAS</b>	<b><u>Kekuatan (<i>Strenght</i>)</u></b> Tentukan faktor-faktor kekuatan internal	<b><u>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</u></b> Tentukan faktor-faktor kelemahan internal
<b>EFAS</b>	<b><u>STRATEGI-SO</u></b> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<b><u>STRATEGI-WO</u></b> Strategi yang meminimalkan kelayaman untuk memanfaatkan peluang
<b><u>Peluang (<i>Opportunity</i>)</u></b> Tentukan faktor-faktor peluang internal		
<b><u>Ancaman (<i>Threats</i>)</u></b> Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal	<b><u>STARTEGI-ST</u></b> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<b><u>STRATEGI-WT</u></b> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

### 3.2.2 Analisis Boston Consulting Group (BCG)

Matriks BCG merupakan matriks yang digunakan oleh unit usaha dalam menganalisis unit bisnis atau lini produk perusahaan. Matriks ini menggambarkan portofolio investasi perusahaan dimana setiap lini produk perusahaan atau unit bisnis dikelompokkan pada matriks sesuai dengan tingkat pertumbuhan industri atau pasar serta pangsa pasar relatif produk. Matriks BCG memiliki kaitan erat dengan siklus hidup produk atau *Products life cycle* sehingga sering disebut juga dengan *Product Portfolio Matrix* (Sinaga, 2022).

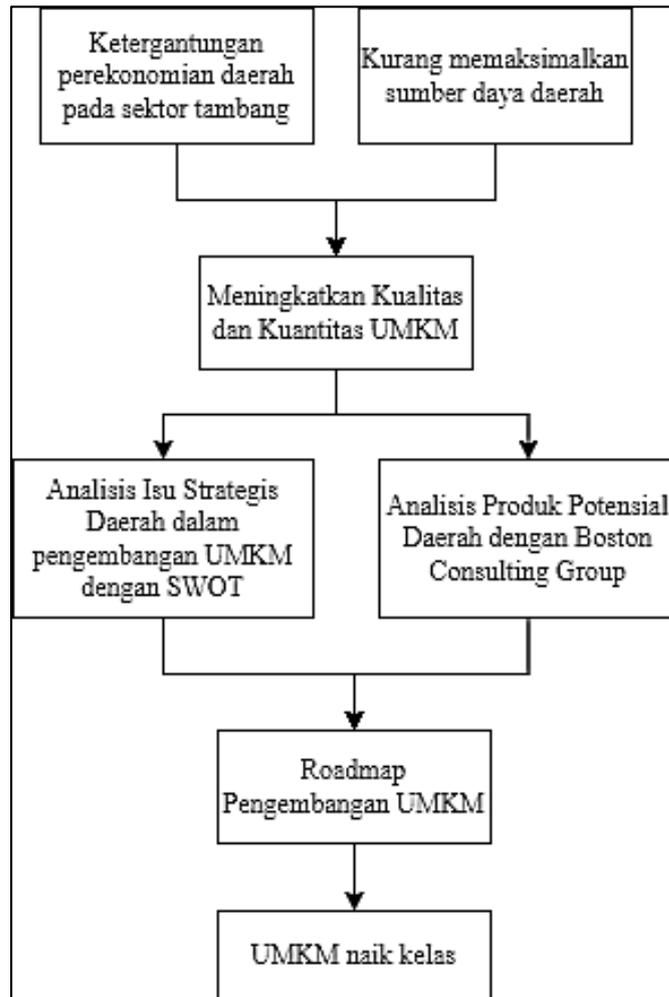
Pada matriks BCG, suatu produk pada umumnya dikategorikan ke dalam satu dari empat jenis untuk pengambilan keputusan, yakni *Question marks*, *Stars*, *Cash cows*, and *Dogs*, sebagaimana bagannya digambarkan dibawah ini:



**Gambar 3. 1 BCG Matrix**  
(sumber: dqlab.id)

Berbicara mengenai potensi sumber daya alam di Luwu Timur, matriks ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi produk unggulan di Luwu Timur sehingga menjadi acuan dalam mengalokasikan dana, memproduksi dan menjual produk tersebut. Simbol *stars* yang berada di kuadran 3 menunjukkan bahwa produk memiliki potensi pertumbuhan pasar yang tinggi serta jumlah pengelolaan produk yang tinggi sehingga berpotensi menjadi produk unggulan di Luwu Timur. Simbol *question mark* yang berada di kuadran 4 menunjukkan bahwa produk memiliki potensi pertumbuhan pasar yang tinggi namun jumlah pengelolaan produk rendah untuk dikembangkan. Simbol *cash cow* yang berada di kuadran 1 menunjukkan potensi pertumbuhan pasar yang rendah namun jumlah pengelolaan produk tinggi. Terakhir simbol *dogs* yang berada di kuadran 2 menunjukkan potensi pertumbuhan pasar dan jumlah pengelolaan produk rendah sehingga produk yang masuk pada kuadran ini tidak memiliki peluang untuk dikembangkan.

### 3.3 Kerangka Pikir Kajian



**Gambar 3. 2 Kerangka Pikir Kajian**

Kajian ini dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM sehingga dapat mengatasi permasalahan ketergantungan perekonomian Luwu Timur pada sektor tambang dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya non tambang. Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah dengan melakukan analisis isu strategis daerah dengan menggunakan analisis SWOT dan melakukan analisis produk potensial daerah dengan menggunakan *Boston Consulting Group* (BCG). *Output* dari kajian ini berupa laporan Roadmap Pengembangan UMKM dengan hasil atau efek yang diharapkan adalah UMKM naik kelas.

## **BAB IV**

### **PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

#### **4.1 Analisis Instrumen dan Kebutuhan UMKM**

##### **4.1.1 Kondisi Kinerja UMKM di Luwu Timur**

Kinerja UMKM dapat dilihat dari beberapa aspek yang terdiri dari keuangan, pemasaran, operasional, teknologi dan informasi sumber daya manusia, serta dukungan pemerintah. Kondisi UMKM Luwu Timur berdasarkan aspek tersebut berasal dari hasil pengisian kuesioner oleh seluruh pelaku UMKM di Luwu Timur.

##### **a. Apek Keuangan**

Posisi UMKM dapat dilihat berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini menyatakan bahwa usaha yang termasuk mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1 Miliar belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain modal, peraturan ini juga menyatakan bahwa usaha yang termasuk mikro memiliki penghasilan tahunan paling banyak Rp 2 Miliar. Di Luwu Timur kondisi modal dan penghasilan tahunan UMKM berada di kategori usaha mikro. Maka dari itu seluruh UMKM di Luwu Timur masih termasuk dalam Usaha Mikro. Belum ada yang masuk dalam kriteria usaha kecil dan menengah.

Selain posisi UMKM berdasarkan modal dan pendapatannya, fakta lain dari pelaku UMKM terkait kondisi keuangan UMKM di Luwu Timur bahwa lebih dari setengahnya belum memiliki laporan keuangan usaha yaitu sebesar 58.1% dari total keseluruhan UMKM. Begitu pula pengelolaan keuangan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, 54.3% pelaku UMKM masih belum melakukan pengelolaan secara terpisah. Adapun pelaku UMKM yang membuat laporan keuangan usahanya, sebagian besar masih menggunakan buku atau mencatat secara manual yaitu sebesar 91.3% dari pelaku UMKM.

##### **b. Apek Pemasaran**

Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha. Bentuk pemasaran setiap UMKM bergantung dari jenis usaha atau

posisi UMKM dalam rantai pasok. Di Luwu Timur, mayoritas UMKM merupakan penyedia barang dan jasa, yaitu sebesar 57.1%. Kemudian UMKM lain yang mendominasi adalah UMKM yang bergerak dalam memproduksi barang/jasa dan pemasok barang.

Di Luwu Timur jangkauan pasar masih didominasi pemasaran antar kecamatan dengan persentase kegiatan 90.4%. Kemudian pemasaran antar kabupaten sebesar 21.2%, dan pemasaran antar provinsi sebesar 9.6%. Adapun untuk kegiatan pemasaran ke luar negeri atau ekspor barang masih sangat kecil yaitu 1%. Metode pemasaran yang digunakan pelaku UMKM mayoritas menjual secara langsung yaitu melalui gerai atau toko yaitu sebesar 89.5%. Namun pemanfaatan jualan secara online juga telah diterapkan sebagai alternatif, dimana para pelaku memanfaatkan media sosial seperti Instagram, facebook, dan whatsapp dalam memasarkan produk atau jasanya. Pemanfaatan media sosial terlihat dari banyaknya pelaku UMKM yang menerapkannya yaitu sebesar 48.6%.

c. Aspek Operasional

Aspek operasional merupakan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha serta kekuatan kelembagaan dari UMKM. Terkait badan hukum, hampir setengah dari UMKM di Luwu Timur belum memiliki izin usaha, yaitu sebesar 47.6%. Namun UMKM yang telah memiliki badan hukum bahkan tidak mendekati angka 50%. Hanya terdapat 7.1% UMKM berbadan hukum UD, 2% berbadan hukum CV, 3% berbadan hukum PT. Selebihnya masih belum memiliki badan hukum untuk usahanya.

Kemudian bagian dari aspek operasional yang lain adalah terkait kegiatan operasional UMKM seperti struktur organisasi, prosedur operasional standar (SOP), pembagian job kerja, bisnis model, dan rencana bisnis. Hal-hal yang penting dalam aspek operasional mayoritas tidak dimiliki para pelaku UMKM, kondisinya sama seperti legalitas usaha yang hampir 50% tidak memiliki izin usaha. 73.3% pelaku UMKM tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, 66.7% pelaku UMKM tidak memiliki prosedur operasional standar (SOP), 65.4% pelaku UMKM tidak memberikan pembagian tugas yang spesifik pada

para pekerjanya, 77.1% pelaku UMKM tidak membuat bisnis model usahanya, dan 41.9% pelaku UMKM tidak memiliki rencana bisnis dalam menjalankan usahanya.

d. Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja, serta kapasitas yang dimiliki sumber daya manusia tersebut. Pelaku UMKM maupun tenaga kerjanya perlu memiliki bekal ilmu terkait pelaksanaan UMKM. Baik itu ilmu yang didapatkan dari pendidikan formal maupun dari pelatihan terkait pelaksanaan UMKM seperti misalnya pelatihan manajemen keuangan. Di Luwu Timur sendiri 87.1% UMKM memiliki tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan terakhir SMA/Sederajat. Kemudian disusul oleh pendidikan sarjana atau diploma empat sebesar 9.9% dan diploma tiga sebesar 2%. Pendidikan yang lebih tinggi seperti doktor hanya ada 1% dari total keseluruhan UMKM di Luwu Timur. Selain dari pendidikan formal, pelatihan atau sertifikasi juga masih belum dilakukan oleh sebagian besar pelaku UMKM. 68.6% pelaku UMKM mengaku belum memberikan pelatihan atau sertifikasi pada tenaga kerjanya juga 7.3% pelaku UMKM tidak menerapkan sistem pengelolaan khusus untuk tenaga kerjanya. Pun ada yang telah menerapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia, 70% pelaku UMKM mengungkapkan bahwa sistem yang diterapkan belum efektif.

Hal lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah kesesuaian tenaga kerja dengan pekerjaannya. Meskipun tenaga kerja memiliki kemampuan tapi jika kemampuan tersebut tidak diletakkan pada tempatnya maka hanya akan menghambat pelaksanaan UMKM. Faktanya setengah dari pelaku UMKM di Luwu Timur belum mempekerjakan tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil survey, 49% pelaku UMKM merasa bahwa sulit untuk mendapatkan tenaga kerja dengan karakteristik tertentu.

e. Aspek Teknologi Informasi

Aspek ini berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi yang dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha. 94.3% pelaku UMKM mengaku telah

memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan usahanya. Pemanfaatan teknologi informasi pada UMKM yang ada di Luwu Timur paling besar diterapkan pada aspek penjualan dan pembelian sebesar 72.4%, kemudian disusul pada aspek pemasaran sebesar 60%. Pemanfaatan teknologi informasi pada aspek keuangan dan manajemen sumber daya manusia masih sedikit diterapkan oleh masyarakat UMKM dengan masing-masing persentase sebesar 14.3% dan 6.7%. Dalam memanfaatkan teknologi informasi, 99% pelaku UMKM mengaku menggunakan *handphone*. Sehingga dapat diketahui bahwa teknologi atau aplikasi yang digunakan adalah yang dapat diakses melalui *handphone* saja.

f. Dukungan pemerintah

Dukungan dari pemerintah sangat berperan penting dalam pengembangan UMKM. Sejauh ini, para pelaku UMKM telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dari berbagai aspek. 30.3% telah mendapatkan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana, 23.2% telah mendapatkan dukungan melalui pengadaan program pengembangan sumber daya manusia seperti pengadaan program pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, dll. Kemudian 18.2% pelaku UMKM telah mendapatkan bantuan dalam promosi dan pemasaran.

#### 4.1.2 Permasalahan UMKM di Luwu Timur

Pengembangan UMKM dapat dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu titik permasalahan-permasalahan yang akan diatasi sebelum menerapkan metode yang diajukan. Hal ini terbagi atas beberapa aspek sebagai berikut.

a. Aspek Keuangan

Terlepas dari kekuatan UMKM dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, UMKM juga memiliki kelemahan, diantaranya, yaitu profesionalisme pengelolaan keuangan. Sebenarnya, kesalahan paling umum yang dilakukan pengusaha UKM dalam mengelola keuangan adalah mencampur uang usaha dengan uang pribadi. Mungkin karena usaha masih kecil, berpikir tidak masalah jika mencampur uang usaha dengan uang pribadi. Namun yang kebanyakan terjadi, sulit membedakan pengeluaran pribadi dan usaha. Akibatnya, keperluan pribadi sedikit demi

sedikit menggerogoti saldo uang usaha. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh wirausahawan UMKM adalah pengelolaan keuangan dan pengelolaan manajemen yang belum sesuai dengan kaidah akuntansi yang baik dan benar.

Pengelolaan dana yang baik menjadi kunci utama yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan suatu UMKM. Dalam rangka membantu UMKM menyusun kebutuhan pelaporan keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2016 menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM yang berkembang di Indonesia. Menurut PSAK I revisi (2015:par. 7) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap dapat meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM (2016:par. 2.1) adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tersebut. Sesuai dengan SAK EMKM (2016:par. 3.9), UMKM perlu menyajikan laporan keuangan minimum terdiri dari (1) laporan posisi keuangan pada akhir periode, (2) laporan laba rugi, dan (3) catatan atas laporan keuangan (calk).

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, pelaku usaha dapat melakukan evaluasi kinerja pada setiap periodenya guna pengembangan usaha. Manfaat lain dalam pencatatan akuntansi dengan benar dan penyajian laporan keuangan sesuai SAK EMKM dapat membantu pelaku usaha guna memberikan keyakinan pada pihak eksternal dalam proses penanaman dan penambahan modal usaha agar dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan atas segala aktifitas yang berkaitan dengan pengelolaan usaha.

b. Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran sebagai salah satu bidang yang paling berpengaruh pada jumlah pendapatan yang berasal dari penjualan. Melihat kegiatan pemasaran adalah aktifitas untuk menarik perhatian pasar sehingga calon konsumen melakukan proses pengambilan keputusan untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Hal ini menuntut perhatian lebih agar dapat memaksimalkan pendapatan dengan memperluas target pasar dan strategi yang akan diterapkan dalam menggait para calon konsumen, namun kondisi nyata UMKM di Luwu Timur mendapati suatu bentuk masalah di aspek pemasaran.

Pada aspek pemasaran masalah utama yang mendominasi adalah rendahnya akses pemasaran ditandai dengan kebanyakan UMKM masih memasarkan produknya antar kecamatan hal ini disebabkan oleh produk yang belum memiliki daya saing yang tinggi, metode pemasaran yang belum maksimal walaupun melalui media sosial namun desain iklan yang masih kurang menarik perhatian calon konsumen, dan jenis produk yang dihasilkan tidak memiliki nilai ciri khas daerah setempat sehingga rendah tingkat keunikan yang dapat dijadikan sebagai nilai jual suatu produk. Berdasarkan permasalahan akses pemasaran membuat peluang ekspor produk dari Luwu Timur juga semakin rendah. Melihat kondisi kurangnya pengidentifikasian nilai keunikan dari Luwu Timur yang dapat di dituangkan ke dalam produk, maka diperlukan identifikasi jenis produk ataupun komoditas yang memiliki potensi untuk di ekspor dalam memperluas pasar. Salah satu hal yang dapat menunjang perluasan pasar dengan pengambilan keputusan strategi promosi yang tepat, hal ini memerlukan pengasahan *skill* untuk pelaku agar mendalami serta mengetahui peran aspek pemasaran terlebih dahulu kemudian dikenalkan dengan strategi pemasaran yang sesuai dengan jenis bisnis yang dijalankan. Saat ini metode promosi beraneka ragam seperti pengiklanan melalui media massa maupun penjualan secara langsung (*direct selling*) sebelum melakukan pengambilan keputusan salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan yang tepat sasaran dengan mengolah data produksi

maupun data penjualan yang dimiliki menggunakan *data mining* seperti penarikan informasi tersembunyi dari tambang data untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam bidang promosi.

c. Aspek Sumber daya Manusia (SDM)

Aspek sumber daya manusia sebagai pelaku utama sekaligus penggerak UMKM dalam menjalani proses bisnis dan sebagai aset yang menentukan keberlangsungan hidup suatu usaha, tentunya aspek ini pula memerlukan perlakuan khusus utamanya bagi mereka pelaku UMKM yang masih perlu pendampingan dalam mengelola tenaga kerja yang dimiliki agar mampu meningkatkan kinerja serta memberikan pengaruh positif dalam pengembangan UMKM di Luwu Timur. Dalam pengembangan tersebut terdapat beberapa titik yang menjadi pokok masalah utama yaitu rendahnya kualitas SDM hal ini dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan terakhir pemilik UMKM di Luwu Timur didominasi oleh lulusan SMA dan sebagian besar dari mereka masih kurang minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dengan data lulusan sarjana pelaku UMKM dari Luwu Timur itu hanya ada sekitar 9.9% dan kebanyakan dari mereka belum mengimplementasikan keilmuannya ke dalam pengembangan daerah masing-masing setempat, permasalahan selanjutnya adalah rendahnya produktivitas SDM hal ini ditandai oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan potensi sumber daya alam seperti komoditas lada dengan pengelolaan yang dilakukan oleh SDM setempat, tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan masih tinggi sehingga pola pikir untuk mengembangkan diri menjadi minim. Permasalahan selanjutnya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait peran UMKM dalam membangun perekonomian, minat masyarakat untuk berwirausaha masih rendah karena UMKM dipandang sebagai pekerjaan alternatif jika masyarakat tidak memperoleh pekerjaan di instansi/perusahaan tertentu. Berdasarkan permasalahan tersebut menyebabkan tidak ratanya jumlah pelaku UMKM di tiap kecamatan sehingga masih diperlukan sosialisasi terhadap urgensi keberadaan UMKM dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Fenomena

jenis usaha yang terbentuk didominasi oleh jenis usaha kuliner namun masih memerlukan edukasi terkait pengolahan sumber daya mentah menjadi produk jadi yang dapat dijadikan bahan baku utama usaha kuliner.

d. Aspek Operasional

Aspek operasional meliputi seluruh proses produksi mulai dari penentuan suplier bahan baku hingga menghasilkan produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Operasional setiap UMKM perlu didukung oleh perencanaan yang matang serta tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan bidang mereka masing-masing, namun dapat dilihat berdasarkan hasil kuisisioner bahwa terdapat beberapa masalah yang menjadi penghambat dalam pengembangan UMKM di Luwu Timur.

Pada aspek operasional terdapat beberapa permasalahan pada UMKM Luwu Timur yaitu rendahnya akses produksi hal ini ditandai dengan fasilitas untuk mengelola bahan baku masih belum terfasilitasi dengan baik, akses pemberian modal yang masih tidak merata sehingga proses pengembangan UMKM menjadi terhambat, belum optimalnya pengambilan bahan baku yang bisa dilakukan sektor lokal tanpa harus memesan dari luar Luwu Timur hal ini yang menyebabkan tingginya biaya transaksi usaha, belum memiliki perencanaan bisnis yang matang, SOP penunjang kinerja perusahaan juga belum dimiliki oleh seluruh UMKM dan tenaga kerja di UMKM tidak seluruhnya memiliki keahlian yang sesuai dengan jobdesk pekerjaannya sehingga masih kurang maksimal dalam pelaksanaan operasionalnya, dan legalitas yang belum dimiliki oleh seluruh pelaku UMKM sehingga akses perluasan pasar dari tiap UMKM terbatas.

e. Aspek Teknologi Informasi

Aspek Teknologi Informasi saat ini menjadi aspek yang penting mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih UMKM juga harus melakukan modernisasi dengan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan setiap proses bisnisnya. Berdasarkan penggunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan UMKM akan memudahkan perkembangannya dan mampu meningkatkan daya

saing dari tiap UMKM. Namun melihat kondisi yang terjadi saat ini di Luwu Timur penggunaan teknologi informasi masih sangatlah minim.

Dalam perjalanannya, didapati bahwa perkembangan UMKM Luwu Timur masih terkesan lambat. Hal ini disebabkan ketertinggalan dalam mengadopsi teknologi informasi di dalam usahanya. Jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, mereka senantiasa memiliki kepedulian terhadap penggunaan teknologi baru dalam menunjang bisnisnya. Sistem yang digunakan oleh UMKM di Luwu Timur masih memanfaatkan sistem yang tradisional, sementara saat ini zaman sudah semakin canggih disertai dengan keberadaan teknologi yang modern. Maka tentu sangat minim peluang untuk mampu bersaing di dunia usaha jika sistem ini tetap dipertahankan. Terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam menjalankan proses bisnis UMKM yaitu mereka telah menggunakan teknologi informasi namun masih rendah akses bagi setiap UMKM hal ini ditandai pada bidang pemasaran dan penjualan belum maksimal dalam pemanfaatan dengan cakupan pemasaran yang masih didominasi oleh pemasaran antar kecamatan, hal itu terjadi pula dalam bidang keuangan yang rata-rata UMKM masih melakukan pencatatan manual tanpa melibatkan teknologi informasi sehingga penelusuran biaya masih sulit diidentifikasi dan belum terstandarisasi dan permasalahan selanjutnya yaitu tidak adanya website atau akses informasi satu pintu bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang tertarik untuk membuka UMKM, pusat informasi yang berisi terkait info pasar, modal dan lain sebagainya ini belum disediakan.

#### 4.1.3 Analisis SWOT

##### a. Kekuatan

- 1) Luwu Timur memiliki sektor perkebunan rakyat dengan ketersediaan lahan yang cukup luas dan hasil perkebunan yang hanya dihasilkan pada beberapa daerah saja di Indonesia, antara lain yang kakao, Kelapa Sawit, Kelapa, dan Lada. Beberapa komoditas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama dalam pengolahan produk dalam negeri sehingga menambah nilai jual karena telah melewati proses produksi dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi.

- 2) Sektor Peternakan di Luwu Timur juga cukup potensial, diantaranya peternakan babi, sapi potong, kambing, dan kerbau. Beberapa aneka makanan dari Indonesia menggunakan bahan baku utama daging hewan ternak hal ini dapat menunjang proses penjualan hasil hewan ternak untuk menambah pendapatan per kapita dari kabupaten Luwu Timur itu sendiri.
- 3) Luwu Timur memiliki kawasan hutan yang cukup luas yang menawarkan potensi untuk pengembangan usaha kayu dan produk hutan non kayu. Hal ini mampu mendorong usaha furniture yang dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk usaha mata pencaharian serta mampu dijadikan sebagai ciri khas dari Luwu Timur serta merambak pasar internasional jika hal ini ditekuni dengan baik untuk pengelolaannya.
- 4) Kawasan perairan yang cukup luas membuat hasil laut dapat dijadikan sebagai bahan baku utama untuk olahan makanan seperti abon baik dari ikan air asin maupun ikan air tawar. Jumlah hasil tangkapan per tahunnya mencapai kurang lebih 10 juta ton hal ini merupakan angka yang besar untuk mencukupi kebutuhan penduduk serta dapat dimanfaatkan dalam pengolahan industri untuk menambah nilai jual dari hasil tangkapan ikan tersebut.
- 5) Daerah pariwisata yang cukup potensial, tercatat 37 objek wisata di Luwu Timur, di antaranya Danau Matano, Danau Towuti, Air Terjun Salu' Anuang, Pantai Lemo, Bulu' Poloe. Seluruh objek wisata tersebut dapat dijaga kelestariannya untuk tetap menarik pengunjung lokal maupun pengunjung mancanegara salah satunya juga didukung oleh aspek sejarah La Galigo yang bermula di Luwu Timur hal ini akan menambah nilai jual dan daya tarik turis-turis lokal maupun mancanegara untuk datang berkunjung ke Luwu Timur.
- 6) Tersedianya fasilitas pendukung sektor pariwisata, seperti adanya 38 unit hotel dan 57 unit rumah makan. Didukung oleh hotel-hotel dan rumah-rumah makan dengan cita rasa Indonesia akan menunjang prospek kunjungan wisata di Luwu Timur

b. Kelemahan

- 1) Pengelolaan UMKM yang pada umumnya belum profesional. Hal ini ditandai dengan berbagai macam masalah seperti pada perencanaan strategis yang belum matang ketika menjalankan suatu usaha, manajemen sistem kerja yang belum semua UMKM jalankan , dan pengelolaan keuangan yang masih konvensional seperti tidak memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi sehingga sulit untuk mebgidenifikasi alur kas dari suatu usaha dan mempersulit dalam pengukuran kinerja usaha.
- 2) Aspek pemasaran yang masih didominasi oleh penjualan antar kecamatan dalam kabupaten. Masih sangat jarang pelaku UMKM yang berhasil menjual produknya ke luar kabupaten. Hal ini disebabkan oleh minimnya ciri khas produk sehingga rendahnya tingkat ekspor produk, produk yang dipasarkan bukan olahan dari komoditas asli Luwu Timur hanya mencakup produk jadi yang dijual kembali di wilayah lokal sehingga produk-produknya tidak mencerminkan karakter dari Luwu Timur itu sendiri serta sistem pemasaran yang masih kurang skill dalam desain iklan sehingga iklan yang disebarakan kurang menarik perhatian pembeli.;
- 3) Kualitas sumber daya manusia masih rendah karena tingkat pemahaman terkait pentingnya melanjutkan juga masih rendah, perlu dilakukan perbaikan pola pemikiran untuk pengembangan SDM secara keberlanjutan. Hal ini juga dilihat dari data pelaku UMKM yang masih didominasi oleh pelaku usaha dengan Pendidikan tertinggi SMA/ sederajat.
- 4) Jenis usaha yang masih fokus pada sektor konsumsi yang kurang tahan lama. Kondisi seperti ini menyulitkan UMKM untuk dipasarkan di luar kabupaten karena jenis produk didominasi oleh kuliner dan belum melakukan pengolahan lebih lanjut terkait olahan komoditas yang dapat bertahan lama sehingga menambah nilai jual untuk produk itu di ekspor keluar daerah selain Luwu Timur.

- 5) Produk yang dijual masih kurang memiliki daya saing. Produk yang dipasarkan masih sangat umum dan belum memiliki keunggulan untuk menarik pasar di luar Kabupaten. Hal ini disebabkan oleh pelaku UMKM yang tidak melakukan pengidentifikasian terkait kebutuhan pasar serta tidak melakukan analisa terhadap hal-hal yang telah ditawarkan oleh kompetitor sehingga produk yang dipasarkan masih sulit untuk menggeser loyalitas pasar terhadap produk-produk lain yang sudah lama lebih dulu terjun dipasaran.
- 6) Pemanfaatan teknologi masih sangat minim dalam pengolahan atau pembuatan produk industri rumahan maupun industri menengah yang metodenya masih konvensional sehingga sulit mencapai efektifitas dan efisiensi pada proses produksi produk-produk tertentu yang dihasilkan dan menjadikan produk yang dijual belum memiliki nilai tambah atau nilai keunikan yang bisa menambah ketertarikan pasar untuk membeli dan sebagai daya saing dipasaran.
- 7) Belum adanya pendataan yang komprehensif terkait perkembangan UMKM di Luwu Timur sehingga menyebabkan tindakan untuk pengelolaan yang mendukung men uju proses pengembangan UMKM masih sangatlah kurang, hal ini terinbas pada produk yang tidak variatif, pemanfaatan teknologi yang masih rendah, manajemen operasional dalam menjalankan usaha masih tidak efektif serta belum adanya strategi bisnis terkniyang dimanfaatkan untuk pengembangan usaha masing-masing pelaku UMKM.
- 8) Penjualan yang masih terbatas pada penjualan bahan mentah tanpa memberikan perlakuan / pengelolaan khusus pada masing-masing bahan baku utama sehingga tidak menghasilkan produk setengah jadi ataupun produk jadi. Hal ini membuat produk- produk yang ditawarkan dari UMKM Luwu Timur belum memiliki nilai tambah.
- 9) Minimnya ketersediaan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha dan pekerja UMKM, hal ini perlu untuk menjadi perhatian bagi beberapa pemangku kepentingan dalam

memajukan perkembangan UMKM di Luwu Timur serta mampu bersaing dalam kanca nasional maupun internasional.

- 10) Modal usaha yang masih terbatas. Pada umumnya pelaku UMKM masih mengandalkan uang pribadi sebagai modal usaha. Hal ini menyebabkan lingkup pasar atau hasil produksi dari UMKM masih terbilang sedikit dan belum bisa memperluas karena terbatasnya modal yang dimiliki untuk mengembangkan usaha dari masing-masing UMKM tersebut.
- 11) Masih kurangnya pelestarian dari seluruh objek wisata serta pengembangan yang dilakukan juga masih kurang sehingga belum terlaksana dukungan dalam proses eksistensi dari masing-masing objek wisata agar lebih dikenal dan menarik perhatian turis lokal maupun mancanegara.

c. Peluang

- 1) Adanya komitmen politik dari pemerintah daerah. Pengembangan UMKM didukung oleh misi Kabupaten Luwu Timur untuk mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjejaring luas hal ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan penjangkaran UMKM sehingga mudah untuk diberikan perlakuan khusus sesuai dengan jenis dan kebutuhan UMKM.
- 2) Perkembangan pesat yang dialami oleh Morewali membuka banyak kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM di Luwu Timur untuk melakukan beberapa langkah pengembangan UMK seperti mulai meluaskan eksistensi produk mereka, belajar mengidentifikasi peluang produk ataupun jasa yang dibutuhkan sehingga bisa menjadi ide bisnis baru, serta mampu menggunakan metode ATM (amati, tiru modifikasi) hal-hal yang dilakukan oleh UMKM di Morowali dalam pengembangan usahanya.
- 3) Besarnya potensi sumber daya alam yang memiliki ciri khas tertentu dari Luwu Timur sehingga dapat memberikan daya tarik bagi pasar untuk melirik produk-produk setempat serta menjadi sumber daya utama dalam pengelolaan industri manufaktur.

- 4) Tersedianya SDM angkatan Kerja dalam jumlah besar sehingga proses pengembangan daerah utamanya melalui UMKM tidak perlu melibatkan warga luar namun bisa memanfaatkan serta mengelola angkatan kerja lokal sehingga dapat menjadikan SDM lebih berkualitas.
- 5) Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang pemasaran serta perluasan target pasar dari produk dan jasa serta mendukung proses operasional dalam UMKM di Luwu Timur.
- 6) Pembangunan Smelter di Luwu Timur yang berpeluang menciptakan berbagai UMKM pendukung yang dapat mengelola limbah dari hasil industri tersebut maupun menjadi pemasok dari kebutuhan produk atau jasa tertentu yang timbul dari proses bisnis industri smelter tersebut sehingga menciptakan ide serta lapangan usaha baru di Luwu Timur.
- 7) Adanya Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan besar yang dapat mendukung pengembangan UMKM sehingga mempermudah dalam proses pendanaan program-program yang akan dijalankan serta pengelolaan pelaku UMKM menjadi lebih terencana untuk beberapa waktu kedepan.

d. Tantangan

- 1) UMKM tampaknya belum menjadi pilihan karir yang bergensi sehingga membuat angkatan kerja tidak terlalu tertarik menjadi pelaku usaha, maupun bekerja pada UMKM. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemahaman terkait pentingnya UMKM sebagai salah satu pilar penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
- 2) Letak Luwu Timur yang cukup jauh dari Kota Makassar dan akses yang masih terbatas sehingga membuat biaya distribusi menjadi mahal berimbas pada harga produk yang ditawarkan juga akan semakin mahal dan jenis produk yang ditawarkan terbatas pada produk tahan lama.  
Produk UMKM dari Kota/Kabupaten lain yang juga terus dikembangkan. Hal ini membuat produk UMKM dari Luwu Timur harus mampu bersaing dengan produk UMKM dari kota/kabupaten lain sehingga dapat meningkatkan daya saing.

#### 4.1.4 Analisis IFAS dan EFAS

Setelah melakukan analisa pada aspek kekuatan dan aspek kelemahan yang berasal dari internal terkait selanjutnya perlu untuk dilakukan analisis strategi menggunakan *Internal Strategic Factor Analysis Summary* (IFAS) dan akan dikawinkan secara silang dengan aspek peluang dan ancaman yang berasal dari eksternal terkait kemudian dianalisis menggunakan *External Strategic Factor Analysis Summary* (EFAS). Berikut adalah hasil dari analisis IFAS dan EFAS tersebut.

**Tabel 4. 1 Strategi IFAS dan EFAS UMKM di Luwu Timur**

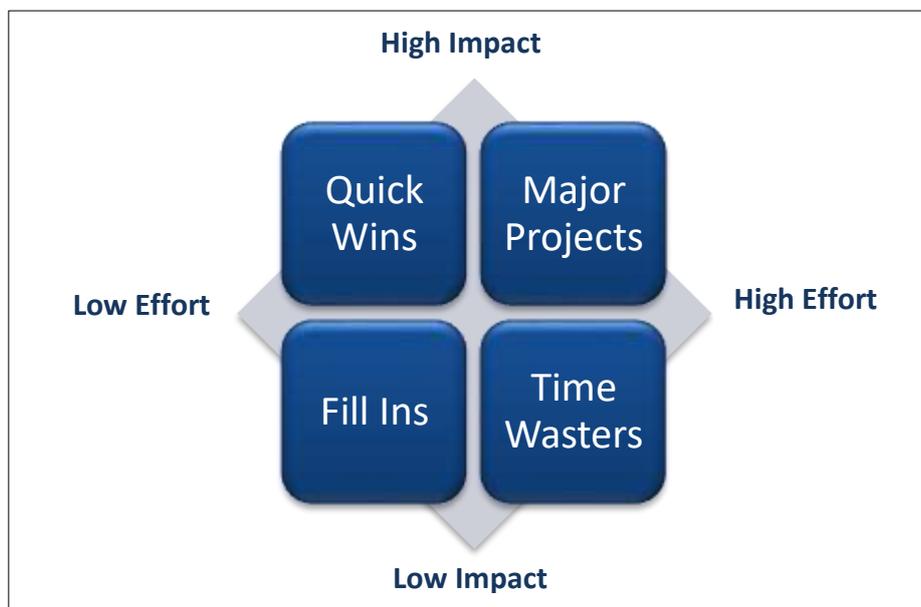
IFAS EFAS	<b><u>Kekuatan (<i>Strenght</i>)</u></b>	<b><u>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</u></b>
<b><u>Peluang (<i>Opportunity</i>)</u></b>	<b><u>STRATEGI-SO</u></b> Ekspansi UMKM di Luwu timur	<b><u>STRATEGI-WO</u></b> Digitalisasi seluruh proses bisnis UMKM di Luwu Timur
<b><u>Ancaman (<i>Threats</i>)</u></b>	<b><u>STARTEGI-ST</u></b> Pengadaan kuisisioner terkait kondisi pasar dan proses bisnis untuk memaksimalkan kualitas produk/jasa yang ditawarkan.	<b><u>STRATEGI-WT</u></b> Pelatihan dan pendampingan untuk angkatan kerja maupun pelaku UMKM yang sedang menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS pada persilangan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*) strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan ekspansi UMKM di Luwu Timur dengan perluasan pasar, penambahan fasilitas dan pengelolaan SDM untuk menciptakan bisnis proses yang mampu meningkatkan perekonomian setempat. Pada persilangan kelemahan (*Weakness*) dan peluang (*Opportunity*) strategi yang dapat dilakukan dengan digitalisasi pada seluruh proses yang terlibat dalam pengembangan UMKM untuk memudahkan dalam bidang

manajerial dibidang operasional, SDM maupun keuangan. Pada persilangan persilangan kekuatan (*Strength*) dengan ancaman (*Threats*) strategi yang dapat dilakukan dengan melakukan penyebaran kuisisioner yang mengandung informasi untuk kondisi pasar serta proses bisnis dari masing-masing UMKM. Pada persilangan kelemahan (*Weakness*) dengan peluang (*Opportunity*) strategi yang dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk seluruh SDM angkatan kerja khususnya SDM usia produktif baik yang telah memiliki UMKM berjalan maupun yang baru merintis usahanya, hal ini penting untuk dilakukan agar seluruh alur bisnisnya dapat dikawal serta diberikan evaluasi berdasarkan pencapaian kinerja yang diukur tiap periode tertentu

#### 4.2 Analisis Isu Strategis dalam Pengembangan UMKM

*Quick wins* adalah program-program yang membutuhkan sumber daya yang tidak terlalu besar, tetapi dampak yang besar. *Quick wins* dibuat untuk menyusun langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam jangka waktu pendek. Berikut ini matriks yang digunakan untuk menentukan *quick wins* serta mengidentifikasi fokus perubahan



Gambar 4. 1 Matriks *Quick Wins*

Berdasarkan hasil pengambilan data yang telah dilakukan, berikut ini hasil analisis *quick wins* sebagai acuan untuk menyusun Roadmap Pengembangan UMUM Luwu Timur.

➤ <i>Pemanfaatan teknologi informasi</i>	➤ <i>Pengembangan Produk unggulan Luwu Timur</i>
➤ <i>Pendataan yang terpercaya, terbaru, dan komprehensif terkait perkembangan UMKM</i>	➤ <i>Pengembangan sarana dan prasarana penunjang</i>
➤ <i>Ketersediaan Modal Usaha</i>	➤ <i>Peningkatan kualitas sumber daya manusia</i>
➤ <i>Ketersediaan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan</i>	➤ <i>Perubahan Mindset</i>
➤ <i>Program Pembinaan UMKM yang komprehensif</i>	
➤ <i>Pengembangan usaha kuliner</i>	➤ <i>Penjualan produk tidak tahan lama dan tidak unik</i>

**Gambar 4. 2 Quick Wins Pengembangan UMKM Luwu Timur**

Berdasarkan matriks di atas dapat disimpulkan bahwa *quick wins* dalam pengembangan UMKM Luwu Timur adalah:

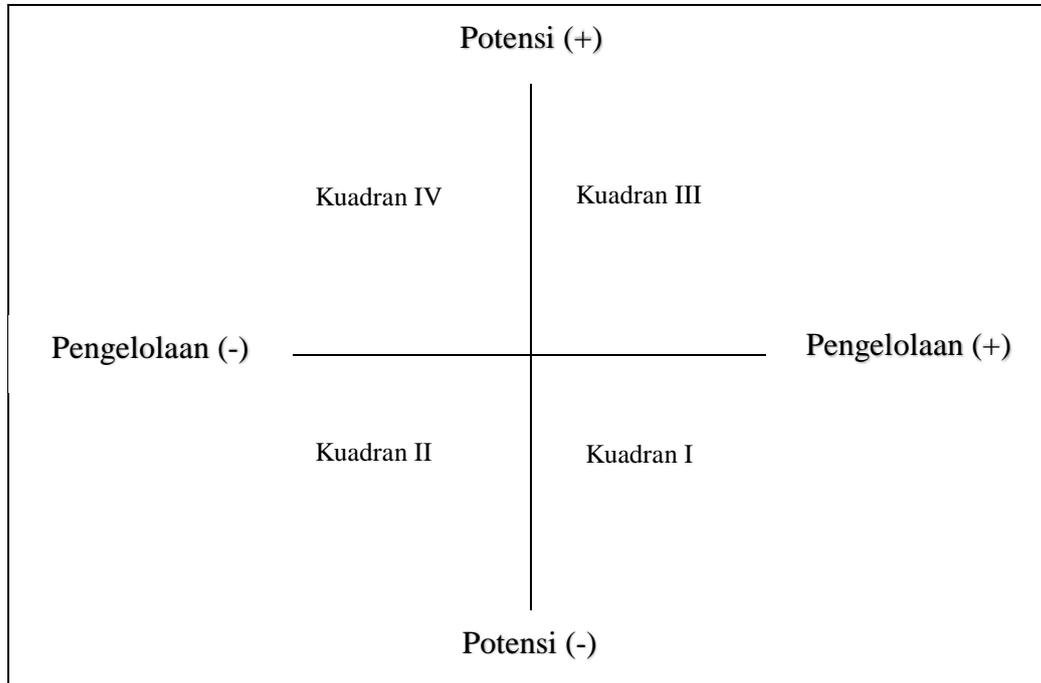
1. Pendataan yang terpercaya, terbaru, dan komprehensif terkait perkembangan UMKM
2. Ketersediaan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
3. Program Pembinaan UMKM yang komprehensif
4. Digitalisasi Proses Bisnis
5. Ketersediaan Modal Usaha

Selain itu, matriks di atas juga mengidentifikasi fokus perubahan yang perlu dilakukan oleh Luwu Timur untuk mengembangkan UMKM. Fokus perubahan ini adalah program yang penting, dan memiliki dampak besar, tetapi juga membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Adapun fokus perubahan dari pengembangan UMKM Luwu Timur adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Perubahan Mindset Wirausaha
3. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang
4. Pengembangan Lada sebagai produk unggulan Luwu Timur

### 4.3 Analisis Produk Potensial di Luwu Timur

Analisis *Boston Consulting Group* (BCG) digunakan dalam roadmap ini untuk mengidentifikasi produk potensial di Luwu Timur



**Gambar 4. 3** Matriks *Boston Consulting Group*

a. Potensi pengembangan besar dan hasil pengelolaan besar

1) Komoditas Lada

Berdasarkan hasil analisis, komoditas lada memiliki potensi pengembangan dan hasil pengelolaan yang besar sehingga dikategorikan masuk di kuadran 3. Komoditas lada asal Luwu Timur telah berkembang dan masuk ke pasar nasional, sehingga komoditas ini memiliki potensi untuk dikembangkan agar mencapai pasar internasional. Komoditas lada memiliki pasar yang luas dan sudah tersebar di berbagai daerah di luar Luwu Timur dan memiliki nilai produksi yang tinggi.

2) Sektor Pariwisata

Berdasarkan hasil analisis, sektor peternakan memiliki potensi pengembangan dan hasil pengelolaan yang besar sehingga dikategorikan masuk di kuadran 3. Sektor pariwisata memiliki potensi pasar yang besar dengan banyaknya objek wisata di Luwu Timur seperti danau dan

permandian air panas di beberapa titik di Luwu Timur. Selain objek wisata, hasil kerajinan di Luwu Timur dapat dimanfaatkan dalam menarik wisatawan. Misalnya memperlihatkan wisatawan berbagai hasil kerajinan serta cara membuatnya

### 3) Sektor Perikanan

Berdasarkan hasil analisis, sektor perikanan memiliki potensi pengembangan dan hasil pengelolaan yang besar sehingga dikategorikan masuk di kuadran 3. Sektor perikanan di Luwu Timur memiliki peluang yang besar dalam pasar. Sektor perikanan di Luwu Timur memiliki area perairan yang banyak tersebar di berbagai daerah dan memiliki nilai produksi yang besar.

## b. Potensi pengembangan besar dan hasil pengelolaan rendah

### 1) Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil analisis, komoditas kelapa sawit memiliki potensi pengembangan besar namun memiliki hasil pengelolaan yang rendah sehingga dikategorikan masuk di kuadran 4. Kelapa sawit termasuk hasil perkebunan yang bernilai tinggi, namun untuk pengelolaannya tidak dapat dilakukan oleh usaha menengah kebawah. Komoditas ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar.

## c. Potensi pengembangan kecil dan hasil pengelolaan besar

### 1) Sektor Peternakan

Berdasarkan hasil analisis terkait potensi pengembangan dan pengelolaan sektor peternakan dikategorikan masuk di kuadran 1 yaitu cash cows. Pada kuadran ini diindikasikan bahwa potensi yang dimiliki oleh sektor peternakan tinggi namun pengelolaan bisnisnya melambat. Hal ini menandakan bahwa mereka mampu menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang lebih besar dari pada investasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan bisnis mereka. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah populasi ternak di Luwu Timur cukup besar dengan nilai 36.112 ekor namun pengelolaan belum maksimal pada seluruh hewan ternak tersebut.

d. Potensi pengembangan kecil dan hasil pengelolaan kecil

1) Barang Campuran

Berdasarkan hasil analisis terkait potensi pengembangan dan pengelolaan bidang usaha campuran dikategorikan masuk di kuadran 2. Pada kuadran ini diindikasikan bahwa potensi yang dimiliki oleh bidang usaha barang campuran rendah dan pengelolaan bisnisnya juga rendah. Hal ini menandakan bahwa produk-produk yang dipasarkan tidak menghasilkan uang tunai dalam jumlah besar atau membutuhkan investasi yang lebih tinggi. Namun, produk tersebut dianggap sebagai produk profitabilitas negatif terutama karena uang yang sudah diinvestasikan dalam produk tersebut dapat digunakan di tempat lain.

Berdasarkan pemetaan produk pada matriks BCG, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang memiliki potensi untuk dikembangkan masyarakat Luwu Timur adalah produk yang berada di kuadran 3 atau *stars* diantaranya komoditas lada, sektor pariwisata, dan sektor perikanan.

#### 4.4 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Berdasarkan analisis SWOT dan analisis BCG yang telah dilakukan, berikut ini rincian tujuan dari pengembangan UMKM di Luwu Timur.

**Tabel 4. 2 Tujuan Pengembangan UMKM Luwu Timur**

Harapan	Tujuan		
	Uraian	Indikator	Target
<b><i>Quick Wins</i></b>			
Pendataan yang terpercaya, terbaru, dan komprehensif terkait perkembangan UMKM	Tersedianya informasi yang lengkap dan komprehensif terkait kebutuhan UMKM dan potensi sumber daya sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan	Ketersediaan database	100%
Ketersediaan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku UMKM	Persentase pelaku UMKM yang meningkat keterampilan dan	50%

dan keterampilan		pengetahuannya	
Program Pembinaan UMKM yang komprehensif	Program Pembinaan UMKM yang tepat sasaran	Ketercapaian target setiap program	80%
Digitalisasi Proses Bisnis	Peningkatan penjualan produk	Peningkatan revenue UMKM	20% dari baseline
	Akses informasi yang terbuka terkait program pembinaan UMKM	Tersedianya website yang memberikan informasi komprehensif dan terbaru terkait program pembinaan UMKM	100%
Ketersediaan Modal Usaha	Peningkatan modal usaha UMKM	Persentase UMKM yang meningkat modal usahanya minimal 20% dari baseline	30%
<b>Fokus Perubahan</b>			
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang mendukung pengembangan UMKM	Persentase gap pengetahuan dan kompetensi pelaku usaha UMKM	Di bawah 30%
Perubahan Mindset Wirausaha	Mindset yang mendukung pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang memiliki mindset yang sesuai untuk pengembangan UMKM	80%
Pengembangan sarana dan prasarana penunjang	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pengembangan UMKM	Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang UMKM	50%
Berkembangnya produk unggulan Luwu Timur	Persentase kenaikan jumlah produk unggulan Luwu Timur	100%	Berkembangnya produk unggulan Luwu Timur

b. Sasaran

Berdasarkan analisis SWOT dan analisis BCG yang telah dilakukan, berikut ini rincian sasaran dari pengembangan UMKM di Luwu Timur.

**Tabel 4. 3 Sasaran Pengembangan UMKM Luwu Timur**

Harapan	Sasaran		
	Uraian	Indikator	Target
<b>Quick Wins</b>			
Pendataan yang terpercaya, terbaru, dan komprehensif terkait perkembangan UMKM	Tersedianya database UMKM	Persentase UMKM yang berhasil didata	100%
Ketersediaan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	Tersedianya fasilitas pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti program pengembangan pengetahuan dan keterampilan	50%
Program Pembinaan UMKM yang komprehensif	Tersedianya pendataan program komprehensif yang dapat diakses terkait program pembinaan UMKM yang tersedia	Persentase program yang didata	100%
Digitalisasi Proses Bisnis	Pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan jangkauan pemasaran	Persentase jumlah pelaku usaha memanfaatkan teknologi informasi dalam memasarkan produk	80%
	Pelaku usaha dapat mengakses informasi mengenai program pembinaan UMKM yang lengkap dan terbaru	Persentase pelaku UMKM yang dapat mengakses informasi dari website	100%
Ketersediaan Modal Usaha	Tersedianya akses untuk memperoleh tambahan modal usaha	Persentase UMKM yang memperoleh tambahan modal di luar modal sendiri	30%
<b>Fokus Perubahan</b>			

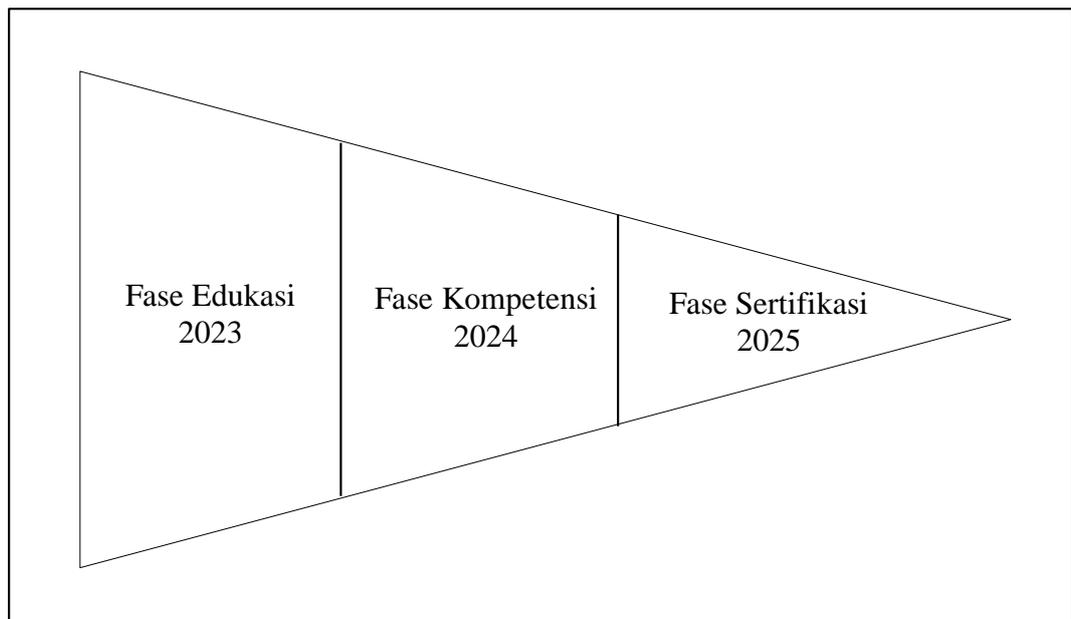
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha UMKM	100% dari baseline
Perubahan Mindset Wirausaha	Tersedianya program untuk perubahan mindset	Persentase pelaku usaha yang mengikuti program perubahan mindset	80%
Pengembangan sarana dan prasarana penunjang	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk pengembangan UMKM	Tersedianya rencana jangka pendek, Panjang dan menengah penyediaan fasilitas UMKM	100%
		Tersedianya sarana dan prasarana sesuai rencana	80%
Pengembangan Lada sebagai produk unggulan Luwu Timur	Program pembinaan produk unggulan	Persentase produk unggulan yang mendapat intervensi	100%

## **BAB V**

### **ROADMAP PENGEMBANGAN UMKM**

#### **5.1 Konsep Roadmap Pengembangan UMKM Luwu Timur**

Roadmap merupakan peta atau panduan yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Pada kajian kali ini dilakukan untuk menyusun roadmap pengembangan UMKM di Luwu Timur. Roadmap disusun berdasarkan tiga fase yaitu fase edukasi yang ditargetkan pada tahun 2023, fase kompetensi yang ditargetkan pada tahun 2024, dan fase sertifikasi yang ditargetkan pada tahun 2024.



**Gambar 5. 1 Fase Roadmap Pengembangan UMKM Luwu Timur**

##### **5.1.1 Fase Roadmap**

Kajian Roadmap Pengembangan UMKM di Luwu Timur dilakukan melalui tiga fase utama yaitu fase edukasi, fase kompetensi, dan fase sertifikasi. Ketiga fase ini menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi untuk mencapai tujuan pengembangan UMKM menjadi UMKM naik kelas.

a. Fase Edukasi

Pada fase pertama ini, masyarakat khususnya para pelaku UMKM diberikan pemahaman terkait urgensi membangun UMKM dalam membantu perekonomian, menanamkan mindset berwirausaha, dan membantu pelaku UMKM dalam membangun usaha yang layak.

b. Fase Kompetensi

Pada fase kedua ini, para pelaku UMKM diarahkan untuk meningkatkan kualitas dari usahanya. Peningkatan kualitas ini dilakukan dari sisi individual atau sumber daya manusia, baik itu sebagai pemilik UMKM maupun para tenaga kerja pada setiap proses bisnis mulai dari keuangan, pemasaran, hingga operasional UMKM.

c. Fase Sertifikasi

Pada fase sertifikasi, dilakukan upaya ekspansi UMKM yang dianggap memiliki potensi yang kuat dalam pasar, baik itu menuju pasar nasional maupun pasar internasional. Ada banyak faktor yang dapat mendukung ekspansi UMKM tercapai beberapa diantaranya adalah kemudahan dalam membentuk badan hukum untuk UMKM.

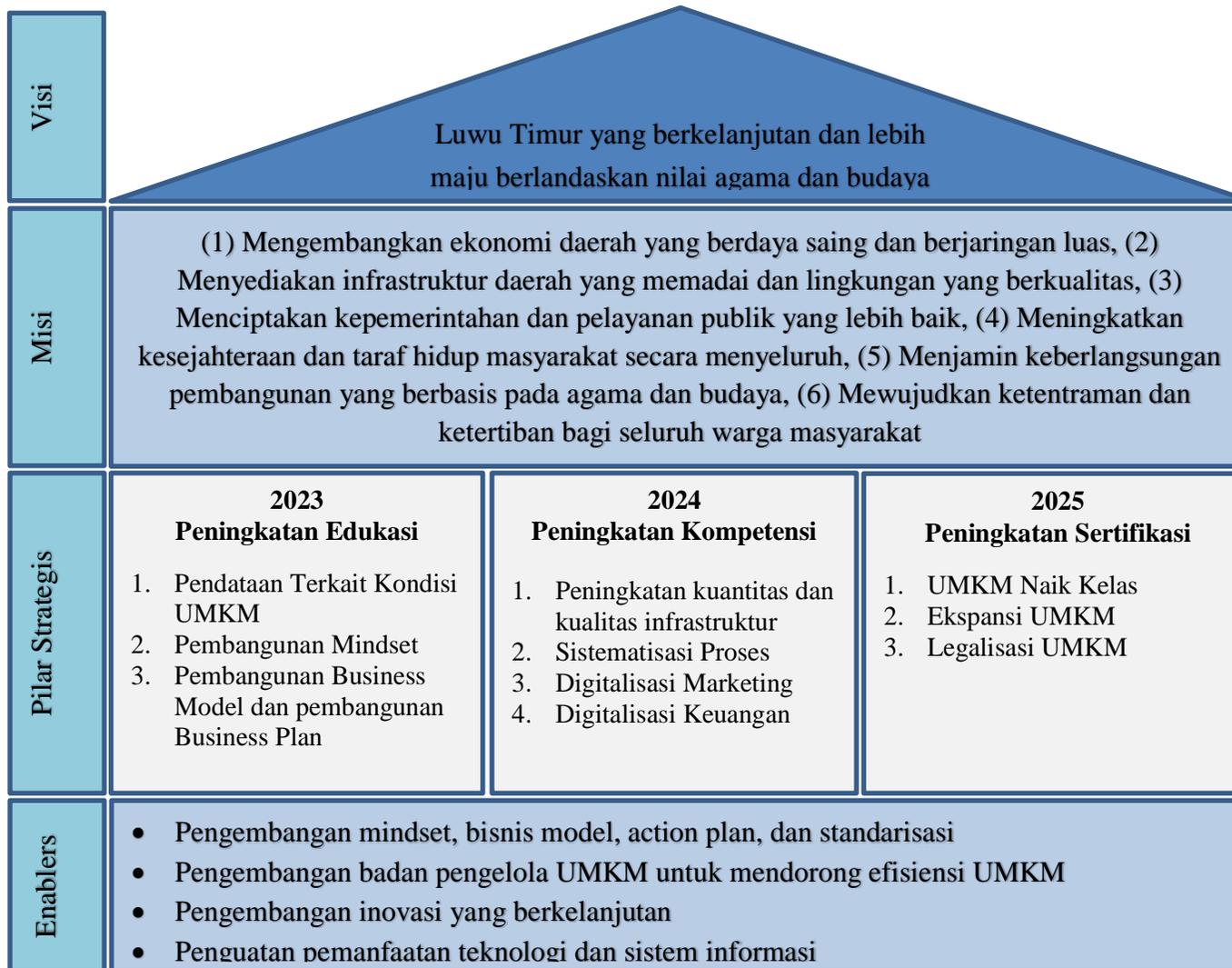
### 5.1.2 Rencana Aksi

Tiap fase yang diperoleh dari hasil analisis SWOT dijadikan dasar dalam menyusun rencana aksi yang diintegrasikan dengan tujuan serta sasaran sebagai bentuk langkah-langkah yang akan dilakukan di 3 tahun kedepan. Berikut adalah rencana aksi peta jalan (roadmap) UMKM dibagi dalam tahapan usulan program pengentasan masalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 4 Roadmap Pengembangan UMKM Luwu Timur**

<b>Tahun 2023 Fase Edukasi</b>	<b>Tahun 2024 Fase Kompetensi</b>	<b>Tahun 2025 Fase Sertifikasi</b>
1. Pendataan Terkait Kondisi UMKM 2. Pembangunan Mindset 3. Pembangunan Business Model dan pembangunan Business Plan	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur 2. Sistematisasi Proses 3. Digitalisasi Marketing 4. Digitalisasi Keuangan	1. UMKM Naik Kelas 2. Ekspansi UMKM 3. Legalisasi UMKM

Untuk memahami lebih jelas bagaimana konsep kajian roadmap pengembangan UMKM di Kabupaten Luwu Timur, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 5. 2 Konsep Roadmap Pengembangan UMKM Luwu Timur**

## 5.2 Program Pengembangan UMKM

Rencana aksi dan kegiatan didapatkan dari hasil pemaparan *roadmap* untuk setiap fase pada sub-bab sebelumnya. Rencana aksi adalah langkah yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan. Setelah itu, akan ada juga kegiatan yang akan mendukung realisasi dari rencana aksi.

### 5.2.1 Rencana Aksi Fase Edukasi (Tahun 2023)

**Tabel 5. 1 Rencana Aksi Fase Edukasi**

<b>Fase</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan</b>
Edukasi (2023)	Pendataan Terkait Kondisi UMKM	Pembuatan database dan website Satu Pintu Informasi UMKM di Lutim
	Pembangunan Mindset	Seminar Pengembangan SDM Unggul Berbasis Mindset UMKM
	Pembangunan Business Model dan Business Plan	Workshop UMKM

a. Pembuatan database dan website Satu Pintu Informasi UMKM di Lutim

Bentuk kegiatan langkah awal dari fase edukasi adalah pendataan melalui pembuatan database dan website satu pintu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang tertarik untuk memulai UMKM maupun seluruh pelaku UMKM. Website tersebut dirancang dengan database yang berisi tentang informasi pasar, informasi modal, akses dalam pengolahan SDM yang berupa pelatihan, dan informasi terbaru dari instansi terkait maupun *stakeholder*. Hal ini memudahkan seluruh pelaku UMKM untuk memperoleh informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang dilakukan dalam proses bisnis UMKM masing-masing. Tidak hanya bermanfaat bagi pelaku UMKM namun dapat juga dijadikan sebagai referensi untuk masyarakat dalam mencari produk-produk UMKM.

Dengan dibuatnya sebuah Sistem Informasi berbasis Web untuk mengenalkan produk-produk unggulan yang telah dihasilkan oleh UMKM, diharapkan masyarakat juga dapat mengakses Informasi mengenai UMKM dalam

kaitannya untuk mengenal produk-produk unggulan yang dapat dibeli oleh masyarakat, dengan kualitas yang tidak kalah bagusnya dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau pengusaha besar. Sistem Informasi pengenalan Produk Unggulan berbasis Web dapat di akses oleh siapapun yang membutuhkan informasi mengenai UMKM di Luwu Timur dan sekitarnya, dengan lebih cepat, dibandingkan harus mencari daftar UMKM yang ada di instansi Pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM untuk memperluas akses komunikasi melalui pemberian fasilitas teknologi informasi berbasis web yang dapat digunakan sebagai media komunikasi secara global.

b. Seminar Pengembangan SDM Unggul Berbasis Mindset UMKM

Salah satu bentuk kegiatan pengembangan UMKM selanjutnya adalah membuat seminar dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul berbasis pembangunan *mindset* UMKM bagi masyarakat maupun pelaku UMKM. Perencanaan kegiatan seminar akan meliputi kegiatan peningkatan jiwa kewirausahaan dengan menemukan ide bisnis yang memiliki peluang, merancang visi usaha yang besar, membangun motivasi yang kuat, menemukan diversifikasi dari usaha masing-masing, menumbuhkan kecintaan terhadap bisnis sendiri dan fokus pada keinginan pasar. Peserta seminar akan diajarkan cara untuk mendefinisikan masalah dan sumber daya yang ada disekitarnya kemudian dikonversi menjadi sebuah inovasi berupa ide bisnis yang memenuhi kebutuhan pasar serta nilai potensial yang tinggi. Setelah merumuskan ide usaha kemudian peserta seminar dibimbing untuk merancang visi yang ingin dituju melalui pengembangan usahanya sehingga memperkuat dorongan motivasi-motivasi dalam berusaha, karena motivasi sangat berpengaruh dalam pengembangan usaha. Berdasarkan pembangunan motivasi diperlukan juga pengembangan diversifikasi dari produk masing-masing usaha agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, diversifikasi adalah tindakan untuk membuat suatu produk menjadi lebih beragam dan tidak berpaku pada satu jenis saja. Peserta juga dipahamkan terkait cara

mendefinisikan kebutuhan produk yang akan di konversi masuk pada nilai-nilai produk agar bisa berfokus pada keinginan pasar dan menumbuhkan loyalitas konsumen terhadap UMKM.

c. Workshop UMKM

Kegiatan selanjutnya dengan membuat kegiatan workshop yang membahas terkait pembekalan *business plan* dan *business model* dan praktik dalam menyusun *business plan* dan *business model*. *Business plan* merupakan perencanaan tertulis terkait seluruh aspek kegiatan bisnis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Dalam pelaksanaan pembekalan dalam penyusunan *business plan* peserta akan dibimbing terkait perencanaan terpadu seperti pemasaran, keuangan, manufaktur dan sumber daya manusia. *Business plan* dikembangkan untuk membantu pelaku usaha memahami bagaimana formulasi rencana bisnis dan argumentasi yang mendukung mengenai perencanaan bisnis tersebut dilakukan. Kegiatan praktik penyusunan *business plan* dilaksanakan pada tahap ini. Mitra secara mandiri menyusun dan dilakukan pendampingan oleh tim. Kegiatan selanjutnya yang akan dijadikan bahan dalam workshop adalah *business model*. *Business model* adalah perencanaan strategi yang digunakan oleh pemilik bisnis untuk merancang model bisnis dan rancangan pendukung lain seputar bisnis. Setelah dilakukan pembekalan terkait *business model* maka langkah selanjutnya dengan memberikan praktik kepada peserta untuk membuat *business model* dari masing-masing jenis usaha mereka. Melalui penyusunan *business plan* dan *business model* diharapkan setiap UMKM mampu mengambil strategi yang tepat untuk fokus terhadap kebutuhan pasar.

### 5.2.2 Rencana Aksi Fase Kompetensi (Tahun 2024)

**Tabel 5. 2 Rencana Aksi Fase Kompetensi**

<b>Fase</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan</b>
Kompetensi (2024)	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur	Pengadaan Infrastruktur
	Standarisasi Proses Bisnis	Pelatihan dan Pendampingan Standarisasi Laporan Keuangan
	Digitalisasi Proses Bisnis	Seminar Program Digitalisasi UMKM Luwu Timur
		Workshop Digitalisasi Keuangan
		Workshop Digitalisasi Pemasaran

a. Pengadaan Infrastruktur

Program ini merupakan program untuk memberikan bantuan sarana dan prasana kepada pelaku UMKM yang membutuhkan. Database terkait kondisi infrastruktur UMKM didapatkan dari website Satu Pintu Informasi UMKM yang direncanakan selesai pada tahun 2024. Dengan memanfaatkan database tersebut diharapkan pengadaan infrastruktur kepada UMKM yang membutuhkan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

b. Pelatihan dan Pendampingan Standarisasi Laporan Keuangan

Program atau kegiatan ini merupakan kegiatan mentoring dan konsolidasi terkait pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan dengan sasaran kegiatan adalah seluruh pelaku UMKM atau yang khusus bekerja pada bagian keuangan. Pelatihan dan pendampingan ini diharapkan mampu membantu UMKM agar pengelolaan dan laporan keuangannya dapat sesuai standar.

c. Seminar Program Digitalisasi UMKM Luwu Timur

Seminar ini diadakan dengan tujuan agar masyarakat khususnya pelaku UMKM menyadari akan pentingnya digitalisasi pada proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Untuk pelaku UMKM tentang urgensi digitalisasi bisnis. *Follow up* dari kegiatan ini adalah pelatihan dan praktek digitalisasi pada

bagian keuangan dan pemasaran yang merupakan aspek yang urgen untuk didigitalisasi

d. Workshop Digitalisasi Keuangan

Program atau kegiatan ini merupakan *follow up* dari kegiatan seminar Program Digitalisasi UMKM. Kegiatan ini terdiri dari pemberian materi serta praktik terkait digitalisasi keuangan. Kegiatan ini menargetkan seluruh pelaku maupun pekerja UMKM di Luwu Timur. Kegiatan ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam digitalisasi keuangan.

e. Workshop Digitalisasi Pemasaran

Sama seperti workshop digitalisasi keuangan, program atau kegiatan ini juga merupakan *follow up* dari kegiatan seminar Program Digitalisasi UMKM. Kegiatan ini terdiri dari pemberian materi serta praktik terkait digitalisasi pemasaran. Kegiatan ini menargetkan seluruh pelaku maupun pekerja UMKM di Luwu Timur. Kegiatan ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam digitalisasi pemasaran.

5.2.3 Rencana Aksi Fase Sertifikasi (Tahun 2025)

**Tabel 5. 3 Rencana Aksi Fase Edukasi**

<b>Fase</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan</b>
Sertifikasi (2025)	Legalisasi UMKM	Workshop Legalitas UMKM: Pedoman Hukum Praktis
	Ekspansi UMKM	Workshop Analisis Estimasi Biaya
		Alokasi Modal Usaha pada UMKM Potensial

		Pendampingan UMKM dalam Perluasan Pasar
	UMKM Naik Kelas	Pendampingan Produk Unggul (Lada) ke Pasar Internasional

a. Workshop Legalitas UMKM: Pedoman Hukum Praktis

Program atau kegiatan ini terdiri dari pemberian materi serta praktik dalam membuat izin usaha serta pendaftaran badan hukum. Kegiatan ini menargetkan seluruh pelaku UMKM di Luwu Timur. Kegiatan ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan UMKM nya dengan adanya legalitas usaha. Kegiatan ini direncanakan bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Luwu Timur dalam memberikan kemudahan akses legalitas UMKM berbadan hukum sebagai salah satu benefit kegiatan.

b. Workshop Analisis Estimasi Biaya

Kegiatan ini terdiri dari pemberian materi serta praktik terkait terkait pengelolaan identifikasi biaya dan penetapan harga jual. Kegiatan ini menargetkan seluruh pelaku maupun pekerja UMKM di Luwu Timur. Kegiatan ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam mengoptimalkan biaya produksi usahanya.

c. Alokasi Modal Usaha pada UMKM Potensial

Program ini merupakan program untuk memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM yang berpotensi dalam pasar. Database terkait UMKM yang berpotensi didapatkan dari website Satu Pintu Informasi UMKM yang direncanakan selesai pada tahun 2024. Dengan memanfaatkan database tersebut diharapkan bantuan modal kepada UMKM potensial dapat dilaksanakan dengan maksimal.

d. Pendampingan UMKM dalam Perluasan Pasar

Program ini dirancang untuk memfasilitasi pelaku UMKM potensial seperti memberikan mentoring, pengadaan *focus group discussion*, serta memberikan pendanaan dalam mengikuti kegiatan pameran produk atau kegiatan perluasan pasar nasional dan internasional. Misalnya program Business Matching Forum, Program Merdeka Ekspor, dan *event* serupa lainnya. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk mencapai akses pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

Bentuk pengawasan dan pendampingan berupa pemberian fasilitator atau mentor untuk tiap UMKM yang akan membantu mereka dalam menerapkan seluruh strategi yang telah dirumuskan, kemudian akan dilakukan *focus group discussion* untuk melakukan sesi diskusi seperti *problem solving* untuk para UMKM terkait seluruh kendala yang mereka rasakan serta solusi dari tiap masalah tersebut. Selain itu kegiatan yang mendukung perluasan pasar adalah bantuan pemasaran produk dan informasi pasar, pembekalan terkait akses UMKM ke *e-commerce*, pemberian fasilitasi penataan lokasi usaha, peluang, peta usaha, bantuan alat/perengkapan usaha, atau revitalisasi sarana dan prasana di tempat usaha, pembinaan kemitraan dan jaringan usaha.

e. Pendampingan Produk Unggul (Lada) ke Pasar Internasional

Salah satu komoditas yang memiliki peluang di pasar internasional adalah lada, maka untuk mewujudkan UMK naik kelas komoditas lada perlu untuk ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan standar internasional. Pendampingan yang akan dilakukan berupa pemberian materi terkait standarisasi produk, sertifikasi pelaku UMKM dan sertifikasi produk yang dihasilkan. Standarisasi produk perlu dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas lada agar bisa tahan lama dan cita rasa yang tetap stabil. Kemudian seluruh pelaku UMKM yang terlibat dalam produk lada perlu diberikan pemahaman terkait pentingnya sertifikasi sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing agar menjadi tenaga ahli dalam masing-masing bidang dan mampu meningkatkan kinerja SDM. Setelah pelaku UMKM tersertifikasi kemudian dilakukan sertifikasi

produk untuk memberikan legalitas bagi setiap produk agar mampu memasuki pasar internasional

Rincian kegiatan dari seluruh rencana aksi kemudian dijabarkan berdasarkan aspek bisnis yang terdiri dari keuangan, pemasaran, SDM, operasional dan IT. Rincian kegiatan kedua disusun berdasarkan fase roadmap yaitu fase edukasi, fase kompetensi dan fase sertifikasi. Rincian kegiatan yang telah disusun sebagai berikut.

**Tabel 5. 4 Rincian Kegiatan Berdasarkan Aspek Bisnis**

No.	Nama Kegiatan	Instansi Terkait/Stakeholder	Sasaran	Fase Roadmap			Aspek Bisnis				
				Edukasi	Kompetensi	Sertifikasi	Pembiayaan	Pelatihan	Pendampingan	Akses Pasar	
1	Pembuatan database dan website Satu Pintu Informasi UMKM di Lutim	- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur - Mitra Swasta	Lembaga penanggung jawab UMKM	v							v
2	Seminar Pengembangan SDM Unggul Berbasis Mindset UMKM	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur - Mitra Swasta	Individu	v				v			
3	Workshop UMKM	- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kab. Luwu Timur - Mitra Swasta	Individu	v				v			
4	Pengadaan Infrastruktur	- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kab. Luwu Timur - Mitra Swasta	Individu		v		v				

5	Pelatihan dan Pendampingan Standarisasi Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Lembaga Konsultan Keuangan</li> <li>- Mitra Swasta</li> </ul>	Individu		v			v	v	
6	Seminar Program Digitalisasi UMKM Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kab. Luwu Timur</li> <li>- Mitra Swasta</li> </ul>	Individu		v			v		
7	Workshop Digitalisasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kab. Luwu Timur</li> <li>- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Lembaga Konsultan Keuangan</li> <li>- Mitra Swasta</li> </ul>	Individu		v			v	v	
8	Workshop Digitalisasi Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kab. Luwu Timur</li> <li>- Mitra Swasta</li> </ul>	Individu		v			v		
9	Workshop Legalitas UMKM: Pedoman Hukum Praktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kab. Luwu Timur</li> </ul>	Produk			v		v		

		- Mitra Swasta								
10	Workshop Analisis Estimasi Biaya	- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kab. Luwu Timur - Mitra Swasta	Individu			v		v		
11	Alokasi Modal Usaha pada UMKM Potensial	- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kab. Luwu Timur - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Lembaga Konsultan Keuangan - Mitra Swasta	Debitur			v	v			
12	Pendampingan UMKM dalam Perluasan Pasar	- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kab. Luwu Timur - Mitra Swasta	Individu			v		v	v	
13	Pendampingan Produk Unggul (Lada) ke Pasar Internasional	- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kab. Luwu Timur - Mitra Swasta	Pelaku UMKM Lada			v		v	v	

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kontribusi berbagai sektor UMKM pada PDRB Luwu Timur perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja UMKM. Berdasarkan data PDRB tahun 2020 tercatat bahwa bidang usaha pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan memberikan sumbangsi sekitar 45% pada perekonomian daerah setempat. Besarnya potensi sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun suatu UMKM. Mulai dari sektor perkebunan, perikanan, kehutanan, peternakan, dan pariwisata. Salah satu sumber daya unggul yang dimiliki Luwu Timur adalah lada yang sudah dipasarkan di luar daerah dan memiliki potensi untuk dipasarkan pasar internasional. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, UMKM mampu menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang besar.

Roadmap pengembangan disusun dalam tiga fase diantaranya fase edukasi, kompetensi, dan sertifikasi. Fase edukasi merupakan proses pemahaman terhadap potensi berwirausaha bagi masyarakat Luwu Timur dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dari masyarakat. Fase kompetensi merupakan fase untuk meningkatkan kemampuan sumber daya pelaku UMKM secara individu atau dalam organisasi usaha. Fase sertifikasi merupakan fase yang memberikan jaminan pada produk maupun pelaku UMKM bahwa produk ataupun SDM sudah terstandarisasi. Standar tersebut akan mendorong UMKM naik kelas. Secara periode waktu, tahun 2023 akan fokus pada pendataan, tahun 2024 peningkatan kualitas, dan tahun 2025 UMKM naik kelas. Fase edukasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 memiliki rencana aksi diantaranya pendataan terkait kondisi UMKM, pemahaman potensi berwirausaha, dan pembuatan business plan. Pada fase kompetensi yang dilaksanakan pada tahun 2024 memiliki rencana aksi diantaranya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, standarisasi proses bisnis, dan digitalisasi proses bisnis. Tahapan terakhir adalah fase sertifikasi yang

dilaksanakan pada tahun 2025 memiliki rencana aksi diantaranya legalisasi UMKM, ekspansi UMKM, dan UMKM naik kelas.

Roadmap ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten Luwu Timur maupun stakeholder terkait dalam menetapkan kebijakan terkait UMKM dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM. Instansi dan stakeholder terkait mencakup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur dan Mitra Swasta.

## **6.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, diperlukan beberapa rekomendasi untuk menunjang perencanaan pengembangan UMKM di Luwu Timur. Adapun rekomendasi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.

- a. Membentuk tim pengelola UMKM yang menjadi *leading sector* dengan fungsi koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD terkait
- b. Perumusan kebijakan pemerintah yang mengatur dan menetapkan pengembangan UMKM di Luwu Timur sebagai landasan dalam melakukan perencanaan dan pengembangan perekonomian Luwu Timur
- c. Perumusan *Grand Design* pengembangan UMKM yang terintegrasi pada program-program prioritas yang terkoneksi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Luwu Timur.
- d. Menentukan produk yang akan menjadi prioritas untuk pendampingan yang diharapkan naik kelas atau ekspor
- e. Melakukan proses pendampingan terhadap UMKM secara terstruktur, tertelusur, dan berkelanjutan
- f. Menyiapkan infrastruktur pendukung untuk mendorong proses digitalisasi UMKM
- g. Menargetkan adanya produk UMKM yang naik kelas pada tahun ke-tiga dan bisa menembus pasar ekspor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, F. et al., 2021. Penerapan Analisis SWOT Terhadap Penentuan Strategi Pemasaran (Studi Kasus Seblak dan Baso Aci Wak Acan Pekanbaru). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, pp. 2904-2910.
- Arrazy, M. & Primadini, R., 2021. Potensi Subsektor Perikanan pada Provinsi-Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, XIV(1), pp. 1-13.
- BAPPEDA. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026*. Luwu Timur: BAPPEDA Kabupaten Luwu Timur
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Pemerintah Kab Luwu Timur, 2019, *Perikanan*, dilihat 7 Desember 2022, <<https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/potensi-daerah/perikanan>>
- Sinaga, B. R., 2022. Considering Boston Consulting Group's Matrix in Strengthening Competitiveness and Good Governance in Indonesia: A Literature Review Perspective. *Journal of Governance and Administrative* , I(1), pp. 19-25.
- Statistik, B. P., 2021. *Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka*, Luwu Timur: BPS Kabupaten Luwu Timur.
- Sulfahmi, P., Asmiani, N. & Thamsi, A. B., 2020. Analisis Manfaat Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Kab Luwu Timur Menggunakan Metode Analisis Location Qution dan Analisis Shift-Share. *GEOSAPTA*, VI(2), pp. 81-84.
- Timur, L., 2021. *Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026*, Luwu Timur: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Widyawati, F. R., 2017. Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Economia*, XIII(1), pp. 14-27.

## LAMPIRAN

Lampiran 1:

Kuisisioner Kajian Pengembangan Peta Jalan (Roadmap) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kab. Luwu Timur Tahun 2022:

Pertanyaan	Salah Satu Jawaban Responden
1. Nama pemilik usaha	Nurjannah
2. Pendidikan terakhir	D3
3. Nama usaha Anda	Dapur Malili River
4. Sektor usaha Anda bergerak dibidang apa?	Pengolahan Ikan
5. Bidang Usaha Anda	Kuliner
6. Apa jenis usaha Anda? (Contoh : Kuliner Bakso, Fashion Pakaian Bayi)	Kuliner Abon Ikan Bandeng
7. Kecamatan tempat Anda berusaha ?	Malili
8. Tahun berapa usaha Anda berdiri ?	2019
9. Jangkauan pemasaran Anda	Antar Kecamatan
10. Bagaimana Anda memasarkan produk Anda ?	Secara Langsung, Social Media (Instagram, Facebook, Whatsapp)
11. Usaha anda berperan sebagai apa?	Membuat atau memproduksi barang/jasa
12. Modal usaha Anda ?	Kurang dari 50 Juta (Usaha Mikro)
13. Hasil penjualan tahunan Anda ?	Kurang dari 300 Juta (Usaha Mikro)
14. Apakah keuangan usaha dan keuangan pribadi Anda dikelola secara terpisah ?	Ya
15. Apakah Anda memiliki laporan keuangan usaha ?	Ya
16. Bagaimana Anda membuat laporan keuangan?	Secara manual, mencatat di buku
17. Bagaimana Anda memperoleh modal usaha ?	Modal sendiri
18. Badan hukum perusahaan anda ?	UMKM
19. Apakah Anda sudah memiliki izin usaha dari pemerintah ?	Ya
20. Jenis legalitas atau izin usaha apa yang Anda miliki?	NPWP (Nomor Induk Wajib Pajak), NIB (Nomor Induk Berusaha)
21. Legalitas produk Anda?	SPP- PIRT, - Halal MUI
22. Apakah Anda memiliki struktur organisasi?	Ya
23. Apakah Anda memiliki prosedur operasional standar (SOP) dalam menjalankan usaha?	Ya
24. Apakah Anda memiliki pembagian tugas yang spesifik dalam menjalankan usaha	Ya
25. Apakah anda memiliki bisnis model dalam menjalankan usaha Anda ?	Tidak

26. Apakah Anda memiliki perencanaan bisnis dalam menjalankan usaha ?	Ya
27. Jumlah tenaga kerja Laki-laki ?	Kurang dari 10 orang
28. Jumlah tenaga kerja Perempuan ?	Kurang dari 10 orang
29. Ijazah terakhir dari tenaga kerja Anda	SMA
30. Apakah Anda mudah memperoleh tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai dengan yang Anda butuhkan?	Ya
31. Apakah Anda mudah memperoleh tenaga kerja yang memiliki karakteristik pribadi (mis. sikap kerja, kemampuan komunikasi, dll) sesuai dengan yang dibutuhkan?	Ya
32. Apakah anda pernah memberikan pelatihan atau sertifikasi pada tenaga kerja anda?	Tidak
33. Apakah Anda memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia?	Ya
34. Apakah menurut Anda sistem pengelolaan sumber daya manusia yang Anda terapkan sudah efektif?	Ya
35. Apakah anda memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan usaha Anda ?	Ya
36. Penggunaan teknologi informasi mendukung usaha anda dalam aspek apa saja ?	Pemasaran, Keuangan, Penjualan dan Pembelian
37. Jenis alat teknologi informasi apa yang Anda gunakan dalam menjalankan usaha Anda ?	Handphone, Komputer atau Laptop
38. Apakah program-program pemerintah Kab. Luwu Timur mendukung jalannya usaha Anda?	Ya
39. Dalam aspek apa saja Pemerintah mendukung usaha Anda?	Promosi dan Pemasaran

Lampiran 2:

Rekomendasi Tim Pengendali Mutu (TPM) Terhadap Laporan Kajian Penyusunan  
Road Map UMKM Luwu Timur, Tahun 2022

**RAPAT PEMAPARAN LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN  
ROADMAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

NAMA : Prof.Dr.Ir.Jasruddin,M.Si.  
JABATAN : Tim Ahli  
HARI/TANGGAL : Rabu,23 November 2022  
TEEMPAT : FT UNHAS/Daring  
KEGIATAN : Laporan Ahir Penelitian UMKM

CATATAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan telah menggambarkan persoalan UMKM di Kabupaten Luwu Timur secara garis besar</li><li>2. Diperlukan analisis data yang lebih rinci agar nampak masalah pada setiap komponen UMKM.</li></ol>



REKOMENDASI
-------------

1. Data table 2.2 dan 2.3 pada laporan mohon dilengkapi dengan data potensi daerah agar nampak persentase potensi daerah yang telah berhasil dikelola oleh UMKM
2. Mohon disebutkan UMKM yang produknya telah dipasarkan pada tingkat nasional dan internasional (jika ada). Data ini penting agar pada saat ada training pengelola UMKM, ada Tim UMKM yang dapat dijadikan Best Practise
3. Mohon dijelaskan potensi Teknologi informasi yang dimiliki oleh pengelola UMKM tetapi belum dimanfaatkan. Perlu ditelusuri mengapa potensi itu belum dimanfaatkan
4. Sebaiknya dibuat klasterisasi UMKM berdasarkan, nilai asset dan potensi yang dimiliki sehingga dapat disarankan prioritas pengembangannya
5. Perlu penjelasan lebih rinci tentang potensi SDM pengelola UMKM ditinjau dari jenis usaha dan perannya pada UMKM. Dengan demikian pengembangan SDM pengelola UMKM di Kabupaten Luwu Timur tepat sasaran
6. Perlu ada analisis regulasi penggunaan dana desa 1M perdesa. Dengan demikian dapat disarankan penggunaan dana desa yang memungkinkan untuk pengembangan UMKM

Makassar, 23

November 2022

Prof..Dr.Ir.Jasruddin,M.Si.

**RAPAT**  
**PENYUSUNAN ROADMAP PENGEMBANGAN USAHA**  
**MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022**

NAMA : Prof. Dr. Alimuddin, SE., MM., Ak., CPMA.  
JABATAN : Anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemda Lutim  
HARI/TANGGAL : Rabu, 23 November 2022  
TEMPAT : Ruang Rapat Lantai 3 Ged JK COT dan Link Zoom  
KEGIATAN : Rapat Laporan Akhir Penyusunan Road Map

**CATATAN**

- Kondisi objektif: penggabungan kekayaan perusahaan dengan pribadi; masih memanfaatkan modal sendiri; pemasaran masih dalam wilayah sendiri; masih kurangnya usaha yang memiliki isin-isin berkaitan dengan usaha; rendahnya kualitas SDM; dan pemanfaatan teknologi masih sangat sederhana.
- Penyusunan road map untuk UMKM secara keseluruhan.
- Belum memperlihatkan keterlibatan OPD terkait pada rhasil oad map yang diusulkan.

**REKOMENDASI**

1. Perlu dicarikan model pembukuan perusahaan yang sedethana, sesuai kebutuhan perusahaan;
2. Penggunaan pinjaman untuk pengembangan usaha hanya untuk memenuhi kebutuhan pesanan yang besar;
3. Perlunya kolaborasi untuk memajukan pemasaran produk UMKM antar pengusaha UMKM, antar UMKM dengan perusda, atau dengan perusahaan besar;
4. Pihak pemda perlu lebih aktif menerbitkan isin usaha pada perusahaan yang sudah beroperasi;
5. Pengembangan SDM UMKM sebaiknya berdasar kebutuhan UMKM (teller made);
6. Sebaiknya pemngembangan teknologi untuk pemasaran dan produksi;
7. Perlunya road map untuk setiap jenis komoditi agar lebih fokus pengembangan;
8. Perlunya ditentukan tugas dan tanggungjawab setiap OPD terkait dalam pengembangan UMKM; dan
9. Perlunya UMKM menjaga lingkungan usaha agar terbebas dari polusi

Makassar, 23 November 2022



Prof.Dr. Alimuddin, SE., MM., Ak., CPMA

**RAPAT PEMAPARAN LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN ROADMAP  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NAMA : Prof. Abrar Saleng  
JABATAN : Tim Kelitbanan Pemkab Lutim  
HARI/TANGGAL : Rabu, 23 November 2022  
TEEMPAT : Online dan Fak.Teknik Unhas  
KEGIATAN : Penyempurnaan Road Map UMKM Luwu Timur.

**CATATAN**

- a. Perlu diperiksa kembali konsistensi unsur dan llingkup dalam laporan kajian.
- b. Untuk aspek keuangan selain pengolahan yg penting juga adalah pelaporan
- c. Oleh karena itu jika memungkinkan pelatihan khusus cara membuat laporan keuangan kegiatan UMKM.
- d. Legalitas UMKM juga perlu perhatian khusus. baik mengenai kelembagaanya maupun terkait dengan perizinan kegiatan usahanya.
- e. Perlu kejelasan strategis kemitraan. kolaborasi dan sinergitas dengan pihak lain agar UMKM dipastikan bisa berkembang secara continutas..

**REKOMENDASI**

- a. Mhn rekomendasinya jelas alamat dan lembaga yg melaksanakan.
- b. Mhn konkrito atas semua rekomendasi dan operasionalnya
- c. Rekomendasi harus juga diperhatiakn tahapan dan jenjang serta alat ukur keberhasilanya.

Makassar, 23 November 2022

  
Prof. Abrar Saleng

**RAPAT PEMAPARAN LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN ROADMAP  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

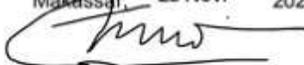
NAMA : Prof. Dr. H. Supardin, M.H.I.  
JABATAN : Anggota Majelis Kelitbangan  
HARI/TANGGAL : 23 Nov 2022  
TEEMPAT : Zoom  
KEGIATAN : Seminar Hasil UMKM

CATATAN

1. Belum ditemukan kesepahaman UMKM yang Merupakan usaha yang dapat menumbuhkan UMKM masyarakat Lurim secara spesifik di bidang yang dijadikan sebagai usaha yang ril di tengah masyarakat.
2. Belum ditemukan kerja sama antara sesama Stakeholder dalam menyamakan persepsinya.

REKOMENDASI

Makassar, 23 Nov. 2022

  
**H. Supardin**

**RAPAT PEMAPARAN LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN ROADMAP  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NAMA : Dr. Abdul Talib Mustafa, M.Si  
JABATAN : Tenaga Ahli  
HARI/TANGGAL : Rabu, 23 November 2022  
TEEMPAT : Zoom Meeting  
KEGIATAN : Ekspose dan Diskusi Laporan Akhir

**CATATAN**

1. Pada point 2.1.6 Narasi Dukungan Pemerintah, belum mengungkap dukungan tersebut secara lebih detail, paling tidak secara sectoral.
2. Tentang pembinaan UMKM yang komprehensif, belum terumuskan focus pengembangan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Uraian mengenai Road Map pengembangan UMKM, belum terbaca aspek keterlibatan actor atau para pelaku pengembangan UMKM ke depan.

**REKOMENDASI**

1. Pada point 2.1. 6. agar juga diuraikan keberadaan masing-masing SKPD dalam pengembangan UMKM selama ini. Seperti peran Dinas Sosial dengan program KUBE dan UEP. Peran Dinas Perindagdal dalam pembinaan Industri Kecil atau pada teknologi/proses produksi, Dinas Koperasi dan UKM dalam peningkatan kemampuan manajerial UMKM, akses modal, dan perizinan. Dinas Tenaga Kerja pada aspek pembinaan keterampilan pelaku usaha (SDM).  
Sebaiknya memang ada FGD yang mengikut sertakan SKPD/OPD atau keterangan tersebut bisa ditelusuri di Renja dan LAKIP SKPD-SKPD tersebut.
2. Pada focus pengembangan UMKM agar bersifat komprehensif, maka sebaiknya juga dirumuskan atau ditambah : peningkatan pemahaman dan pemanfaatan Teknologi Informasi (digital Sistem) dalam pemasaran produk UMKM.
3. Pada format atau narasi tentang Road Map Pengembangan UMKM juga terdapat unsur Aktor/Pelaksana kegiatan. Ini penting, untuk menghindari kesan jika hanya SKPD tertentu saja yang bertugas atau bertanggung jawab dalam pengembangan UMKM.  
Laporan tim juga sebaiknya membantu Pemkab Luwu Timur dalam mengekstrapolasi teori-teori yang ada untuk implementasi kebijakan. Misal tentang actor/pelaksana kegiatan hendaknya tidak hanya menjadi domain pemkab saja sebagai actor tunggal, melainkan juga memberi ruang bagi multipihak untuk dapat berpartisipasi. Misal perbankan, BUMN (dengan CSR nya), media untuk promosi usaha, dll.

Makassar, 23 November 2022



Dr. Abdul Talib Mustafa, M.Si

**RAPAT PEMAPARAN LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN ROADMAP  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NAMA : Haeril Al Fajri  
JABATAN : Anggota Majelis Kelitbangan dan Pengendali Mutu  
HARI/TANGGAL : Rabu, 23 November 2022  
TEMPAT : Via Zoom  
KEGIATAN : Laporan Akhir Roadmap Pengembangan UMKM

CATATAN

Penyusunan Roadmap Pengembangan UMKM sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengembangan UMKM sebagai salah satu pilar penyangga ekonomi masyarakat. Sehingga Roadmap ini harus memotret secara menyeluruh tentang UMKM di Kabupaten Luwu Timur. Saya berharap dengan adanya roadmap ini pemerintah daerah memiliki grand desain kebijakan strategis dalam upaya pengembangan UMKM secara berkelanjutan dan simultan.

REKOMENDASI

1. Harus termuat kembali bidang usaha UMKM sebagaimana pemaparan awal
2. Memotret keterkaitan Bidang usaha UMKM dengan potensi daerah
3. Membuatan rekemondasi spesifik tentang kebijakan pemerintah dengan Organisasi Perangkat daerah tentang pengembangan UMKM

Makassar, 23 November 2022

  
Haeril Al Fajri

**RAPAT PEMAPARAN LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN ROADMAP  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NAMA : Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.  
JABATAN : Anggota Majelis LitBang  
HARI/TANGGAL : Rabu, 23 November 2022  
TEMPAT : ZoomMeet  
KEGIATAN :

**CATATAN**

1. Kajian belum cukup menunjukkan pentingnya pengembangan UMKM dalam jangka panjang, mengingat resources "tambang" bersifat terbatas.
2. Kajian belum menunjukkan adanya kemudahan mendapatkan informasi UMKM, khususnya bagi pelaku pemula atau calon-calon pelaku usaha.
3. Kajian belum mengidentifikasi jenis usaha yang unggul dan bernilai ekonomi tinggi, sehingga usaha tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
4. Strategi yang ditawarkan masih dapat dikembangkan, sehingga bantuan pengembangan usaha tidak berfungsi seperti memberi "ikan", tetapi "kail".

**REKOMENDASI**

1. Perlu dilengkapi dengan analisis informasi pentingnya pengembangan UMKN nontambang
2. Diperlukan tersedianya akses informasi bagi peminat dan pelaku usaha: ada dinas yang menjadi leading sector dan ada link/web informasi.
3. Perlu data base dan informasi yang terus dapat dilengkapi dan dikembangkan, termasuk jenis-jenis usaha di bidang pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
4. Perlu dibentuk kelompok usaha dengan "investor" dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga mendorong kemandirian usaha dan sekaligus rasa tanggung jawab.

Makassar,

2022



Prof. Abdul Pirol, M.Ag.

Lampiran 3:

**REKOMENDASI ROADMAP UMKM LUWU TIMUR**

Tenaga Ahli	Rekomendasi	Halaman Perbaikan	Keterangan
Prof.Dr.Ir.Jasruddin,M. Si	Data table 2.2 dan 2.3 pada laporan mohon dilengkapi dengan data potensi daerah agar Nampak persentase potensi daerah yang telah berhasil dikelola oleh UMKM	14	
	Mohon disebutkan UMKM yang produknya telah dipasarkan pada tingkat nasional dan internasional (jika ada). Data ini penting agar pada saat ada training pengelola UMKM, ada Tim UMKM yang dapat dijadikan Best Practise	15	
	Mohon dijelaskan potensi Teknologi informasi yang dimiliki oleh pengelola UMKM tetapi belum dimanfaatkan. Perlu ditelusuri mengapa potensi itu belum dimanfaatkan	28	
	Sebaiknya dibuat klasterisasi UMKM berdasarkan, nilai asset dan potensi yang dimiliki sehingga dapat disarankan prioritas pengembangannya	38	
	Perlu penjelasan lebih rinci tentang potensi SDM pengelola UMKM ditinjau dari jenis usaha dan perannya pada UMKM. Dengan demikian pengembangan SDM pengelola UMKM di Kabupaten Luwu Timur tepat sasaran	27	
	Perlu ada analisis regulasi penggunaan dana desa 1M perdesa. Dengan demikian dapat disarankan penggunaan dana desa yang memungkinkan untuk pengembangan	53	

	UMKM		
Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag	Perlu dilengkapi dengan analisis informasi pentingnya pengembangan UMKM non tambang	12	
	Diperlukan tersedianya akses informasi bagi peminat dan pelaku usaha : ada dinas yang menjadi leading sector dan ada link/web informasi.	48	
	Perlu data base dan informasi yang terus dapat dilengkapi dan dikembangkan, termasuk jenis-jenis usaha dibidang pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi	48	
	Perlu dibentuk kelompok usaha dengan “investor” dari masyarakat untuk masyarakat , sehingga mendorong kemandirian usaha dan sekaligus rasa tanggung jawab.	53	
Prof. Dr. Alimuddin, SE., MM., Ak., CPMA	Perlu dicarikan model pembukuan perusahaan yang sederhana, sesuai kebutuhan perusahaan	51	
	Penggunaan pinjaman untuk pengembangan usaha hanya untuk memenuhi kebutuhan pesanan yang besar		
	Perlunya kolaborasi untuk memajukan pemasaran produk UMKM antar pengusaha UMKM, antar UMKM dengan perusda atau dengan perusahaan besar	52	
	Pihak pemda perlu lebih aktif menerbitkan izin usaha pada perusahaan yang sudah beroperasi	53	
	Pengembangan SDM UMKM sebaiknya berdasarkan kebutuhan UMKM (Teller Made)	48	
	Sebaiknya pengembangan teknologi untuk pemasaran dan produksi	51	
	Perlunya roadmap untuk setiap jenis komoditas agar lebih fokus pengembangan		
	Perlunya ditentukan tugas dan tanggung jawab setiap OPD terkait dalam pengembangan UMKM	56	

	Perlunya UMKM menjaga lingkungan usaha agar terbebas dari polusi		
Prof. Dr. H. Supardin., M.H.I	Belum ditentukan kesepahaman UMKM yang merupakan usaha yang dapat menumbuhkan UMKM masyarakat Lutim secara spesifik di bidang yang dijadikan sebagai usaha yang ril di tengah masyarakat	15	
	Belum ditemukan kerja sama antara sesama stakeholder dalam menyamakan persepsinya.	56	
Prof. Abrar Saleng	Perlu diperiksa kembali konsistensi unsur dan lingkup dalam kajian		
	Untuk aspek keuangan selain pengolahan yang penting juga pelaporan, maka perlu dibuatkan pelatihan khusus keuangan kegiatan UMKM	51	
	Legalitas UMKM juga perlu perhatian khusus. Baik mengenai kelembagaan maupun terkait dengan perizinan kegiatan usahanya	53	
	Perlu kejelasan strategis kemitraan. Kolaborasi dan sinergitas dengan pihak lain agar UMKM dipastikan bisa berkembang secara continuitas	56	
	Mohon rekomendasinya jelas alamat dan lembaga yang melaksanakan	56	
	Mohon konkrit atas semua rekomendasi dan operasinya	56	
	Rekomendasi harus juga diperhatikan tahapan dan jenjang serta alat ukur keberhasilannya	44	
Haeril Al Fajri	Harus termuat kembali bidang usaha UMKM sebagaimana pemaparan awal		
	Memotret keterkaitan Bidang usaha UMKM dengan potensi daerah	14	
	Membuat rekomendasi spesifik tentang kebijakan pemerintah dengan organisasi perangkat daerah tentang pengembangan UMKM	56	
Dr. Abdul Talib Mustafa, M. Si	Pada poin 2.16 narasi dukungan pemerintah belum mengungkap dukungan tersebut secara detail,	24	

	paling tidak secara sectoral		
	Tentang pembinaan UMKM yang komprehensif, belum terumuskan fokus pengembangan melalui pemanfaatan teknologi informasi	44	
	Uraian mengenai roadmap pengembangan UMKM, belum terbaca aspek keterlibatan aktor atau para pelaku pengembangan UMKM	56	
	Pada point 2.1. 6. agar juga diuraikan keberadaan masing-masing SKPD dalam pengembangan UMKM selama ini. Seperti peran Dinas Sosial dengan program KUBE dan UEP. Peran Dinas Perindagdal dalam pembinaan Industri Kecil atau pada teknologi/proses produksi, Dinas Koperasi dan UKM dalam peningkatan kemampuan manajerial UMKM, akses modal, dan perizinan. Dinas Tenaga Kerja pada aspek pembinaan keterampilan pelaku usaha (SDM). Sebaiknya memang ada FGD yang mengikut sertakan SKPD/OPD atau keterangan tersebut bisa ditelusuri di Renja dan LAKIP SKPD-SKPD tersebut.	56	
	Pada focus pengembangan UMKM agar bersifat komprehensif, maka sebaiknya juga dirumuskan atau ditambah : peningkatan pemahaman dan pemanfaatan Teknologi Informasi (digital Sistem) dalam pemasaran produk UMKM.	51	
	Pada format atau narasi tentang Road Map Pengembangan UMKM juga terdapat unsur Aktor/Pelaksana kegiatan. Ini penting, untuk menghindari kesan jika hanya SKPD tertentu saja yang bertugas atau bertanggung jawab dalam pengembangan UMKM. Laporan tim juga sebaiknya membantu Pemkab Luwu Timur dalam mengekstrapolasi teori-teori		

	yang yang ada untuk implementasi kebijakan. Misal tentang actor/pelaksana kegiatan hendaknya tidak hanya menjadi domain Pemkab saja sebagai actor tunggal, melainkan juga memberi ruang bagi multipihak untuk dapat berpartisipasi. Misal perbankan, BUMN (dengan CSRNya), media untuk promosi usaha, dll.		
--	--	--	--